



**DISNAKERTRANS
PROVINSI JAWA TENGAH**

RENJA RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	50
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	58
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.....	61
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026	61
4.2 Manajemen Risiko Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2026	152
4.3 Dukungan Terhadap 136 Program Daerah.....	183
BAB V PENUTUP	188
LAMPIRAN (MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH)	
a. Identifikasi Risiko	
b. Analisis Risiko	
c. Penetapan Risiko Prioritas	
d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian	

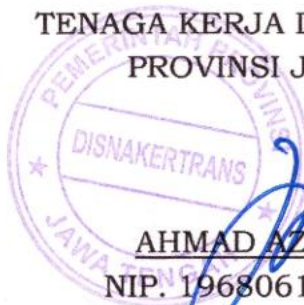
LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, Desember 2025

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH



AHMAD AZIZ, S.E., M.Si.

NIP. 19680617 199803 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, maupun perencanaan pembangunan tahunan.

Mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 84 Ayat 1 diamanatkan bahwa setelah penyampaian Rancangan Awal RKPD, Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja PD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkembang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 disusun dalam upaya mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yaitu **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**, dengan prioritas daerah meliputi : (a)Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis; (b)Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan; (c)Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter. Prioritas daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai RPJMD, dan juga dalam rangka untuk membangun sinergi, keselarasan, kerja sama, kolaborasi, dan sinkronisasi antarsektor agar pembangunan dapat berjalan maksimal, serta mendukung pencapaian Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2026 memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat sebagaimana hasil evaluasi pembangunan tahun 2024 dalam upaya pencapaian pembangunan jangka menengah, visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta masukan DPRD dalam Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan konsistensi dengan peraturan dan kebijakan antara lain Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045, RPJMN Tahun 2025 – 2029,

Rancangan Awal RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, dan Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah Tahun 2026.

Renja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, reviu rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 dan mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 - 2029, yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;
 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
 24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas dan Badan;
 25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sesuai

dengan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Renja adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya pelayanan pada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026
- 4.2. Manajemen Risiko Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
- 4.3. Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Manajemen Risiko Perangkat Daerah

- a. Identifikasi Risiko
- b. Analisis Risiko
- c. Penetapan Risiko Prioritas
- d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Realisasi indikator program Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 telah memenuhi target kinerja yang direncanakan sebanyak 13 indikator, sedangkan yang melebihi target kinerja dengan tingkat realisasi diatas 150% sebanyak 5 indikator program.

Indikator program yang telah memenuhi target kinerja Renja Tahun 2024 yaitu:

- a. Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3, dengan tingkat realisasi sebesar 100,00%
- b. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, dengan tingkat realisasi sebesar 100,37%
- c. Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi, dengan tingkat realisasi sebesar 100,00%
- d. Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas, dengan tingkat realisasi sebesar 102,95%
- e. Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja, dengan tingkat realisasi sebesar 109,10%
- f. Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal, dengan tingkat realisasi sebesar 111,34%
- g. Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal, dengan tingkat realisasi sebesar 100,01%
- h. Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian, dengan tingkat realisasi sebesar 121,88%
- i. Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi, dengan tingkat realisasi sebesar 121,88%
- j. Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan tingkat realisasi sebesar 100,73%
- k. Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk, dengan tingkat realisasi sebesar 100,00%
- l. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan tingkat realisasi sebesar 102,74%
- m. Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah, dengan tingkat realisasi sebesar 100,14%

Indikator program yang melebihi target kinerja Renja Tahun 2024 dengan tingkat realisasi diatas 150% yaitu:

- a. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri, dengan tingkat realisasi 423,96%
- b. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran, dengan tingkat realisasi 167,47%
- c. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian, dengan tingkat realisasi 224,55%
- d. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi, dengan tingkat realisasi 221,74%

- e. Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan, dengan tingkat realisasi 152,32%

Jika dikaitkan dengan pencapaian target akhir Renstra Tahun 2024-2026 s/d Tahun 2024, maka ada 6 indikator program belum memenuhi target, 7 indikator program telah memenuhi target, dan 5 indikator program yang melebihi target.

Indikator program yang belum memenuhi target akhir Renstra Tahun 2024-2026 s/d Tahun 2024 yaitu:

- a. Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3, dengan tingkat realisasi sebesar 98,00%
- b. Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas, dengan tingkat realisasi sebesar 96,79%
- c. Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja, dengan tingkat realisasi sebesar 92,31%
- d. Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor informal, dengan tingkat realisasi sebesar 99,43%
- e. Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk, dengan tingkat realisasi sebesar 99,90%
- f. Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah, dengan tingkat realisasi sebesar 94,70%

Indikator program yang telah memenuhi target akhir Renstra Tahun 2024-2026 s/d Tahun 2024 yaitu:

- a. Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, dengan tingkat realisasi sebesar 100,35%
- b. Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi, dengan tingkat realisasi sebesar 121,39%
- c. Persentase peningkatan pencari kerja yang di tempatkan di sektor formal, dengan tingkat realisasi sebesar 103,79%
- d. Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian, dengan tingkat realisasi sebesar 115,49%
- e. Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi, dengan tingkat realisasi sebesar 115,49%
- f. Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan tingkat realisasi sebesar 100,33%
- g. Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dengan tingkat realisasi sebesar 101,11%

Indikator program yang melebihi target akhir Renstra Tahun 2024-2026 s/d Tahun 2024 dengan tingkat realisasi diatas 150% yaitu:

- a. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri, dengan tingkat realisasi sebesar 349,86%
- b. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran, dengan tingkat realisasi sebesar 166,65%
- c. Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian, dengan tingkat realisasi sebesar 222,20%
- d. Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi, dengan tingkat realisasi

sebesar 212,50%

- e. Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan, dengan tingkat realisasi sebesar 150,38%

Tercapainya kinerja program diatas target yang telah direncanakan, didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2024.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain penyebarluasan informasi pelatihan/promosi pelatihan yang masif melalui media sosial, melaksanakan kemitraan dengan pihak ketiga untuk pemenuhan instruktur pelatihan maupun pemenuhan sarana pelatihan, adanya bantuan peralatan untuk peserta pelatihan sebagai modal dalam berwirausaha, pemeliharaan gedung workshop serta pengadaan sarana dan prasarana pelatihan untuk mendukung kegiatan pelatihan institusional di BLK maupun pelatihan MTU (mobile training unit). Serta didukung adanya kebijakan daerah tahun 2024 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kebijakan tersebut menyebabkan pelatihan yang dilaksanakan jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya, dengan sasaran manfaat pelatihan bagi pencaker (pencari kerja) di daerah Kabupaten/Kota miskin serta termasuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau keluarga yang tidak mampu di daerah dilaksanakannya pelatihan.

Upaya-upaya yang dilakukan sehingga indikator persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi melebihi target yang telah direncanakan, antara lain meningkatkan mutu dan kualitas LPK melalui bimbingan teknis (bimtek) dan akreditasi LPK, memfasilitasi pencaker yang ingin melakukan uji kompetensi secara mandiri, koordinasi intensif antar lintas sektor, baik dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun dengan Pusat/Kemnaker dan Lembaga Sertifikasi Profesi, BNSP dan sebagainya.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegia tan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025			
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN													
				Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,94	28,86	26,40	26,40	100,00	26,40	26,67	99,00
				Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89,60	89,99	89,58	89,91	100,37	89,91	89,59	99,99
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	%	-	44,00	-	-	-	-	-	-
				Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3	%	-	-	-	-	-	-	-	-
				Persentase perusahaan dilakukan pengujian higiene, kesehatan kerja	%	-	76,00	-	-	-	-	-	-
				Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	%	56,95	80,00	55,17	55,17	100,00	55,17	56,43	99,09

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	%	30,53	32,99	29,41	29,41	100,00	29,41	30,00	98,26
		Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	%	62,32	62,00	62,08	62,08	100,00	62,08	62,21	99,82
		Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	Laporan	65,00	-	60,16	60,16	100,00	60,16	60,00	92,31
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
		Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	31,42	38,50	38,14	38,14	100,00	38,14	30,59	97,36
		Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	8,26	-	-	-	-	-	-
		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	3,49	6,16	2,88	12,21	423,96	12,21	3,20	91,69

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
				Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	%	47,13	65,37	46,90	78,54	167,46	78,54	46,98	99,68
				Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	9,55	11,96	9,45	21,22	224,55	21,22	9,50	99,48
				Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	2,40	2,27	2,30	5,10	221,74	5,10	2,35	97,92
				Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	4,68	4,20	4,40	4,53	102,95	4,53	4,60	98,29
				Persentase kenaikan tenaga kerja yg dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	%	13,30	24,16	13,13	20,00	152,32	20,00	13,22	99,40
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	%	27,59	27,27	29,09	29,09	100,00	29,09	26,67	96,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
							Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	29,23	26,35	30,77	30,77	100,00	30,77	27,69	94,73
				%	-	100,00	-	-	-	-	-	-
				%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				%	40,00	-	20,00	20,00	100,00	20,00	30,00	75,00
				%	12,00	32,00	12,61	12,61	100,00	12,61	10,20	85,00
				%	24,80	22,00	24,94	24,94	100,00	24,94	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
				Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	%	33,33	-	25,00	25,00	100,00	25,00	20,00	60,01
				Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (BLK Semarang 1)	%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan promosi program pelatihan di bidang pertanian (BPK Transmigrasi)	%	-	66,00	-	-	-	-	-	-
				Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi (BPK Transmigrasi)	%	66,67	-	66,67	66,67	100,00	66,67	66,67	100,00
				Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	%	40,00	-	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00
				Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) (BPK Transmigrasi)	%	6,40	76,00	6,40	6,40	100,00	6,40	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
				Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian (BPK Transmigrasi)	%	64,00	86,00	64,00	64,00	100,00	64,00	64,00	100,00
				Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (BPK Transmigrasi)	%	100,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya (Bidang Lattas)	%	66,67	83,33	75,00	75,00	100,00	75,00	50,00	75,00
				Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan/koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan/TNA dikalikan 100 persen (BLK Semarang 2)	Unit	19,00	-	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
				Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT) (BLK Semarang 2)	%	71,00	76,00	71,00	71,00	100,00	71,00	-	-
				Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (BLK Semarang 2)	%	4,77	30,96	4,77	4,77	100,00	4,77	3,42	71,70
				Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja (BLK Semarang 2)	%	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas (Bidang Lattas)	%	21,00	21,00	21,00	25,50	121,43	25,50	20,67	98,43

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
									Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
					Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (BLK Semarang 2)	%	0,00	90,32	-	-	-	-	8,00	#DIV/0!
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan (BLK Semarang 2)	%	0,00	0,14	-	-	-	-	4,00	#DIV/0!
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
					Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	-	65,71	-	-	-	-	-	-
					Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	74,28	-	62,85	68,57	109,10	68,57	68,57	92,31
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	-	90,00	-	-	-	-	-	-
					Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	%	34,29	-	28,57	68,57	240,01	68,57	31,43	91,66
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
						Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	%	60,00	78,00	75,00	75,00	100,00	75,00	50,00	83,33
			%	2,26	2,83	2,83	2,83	100,00	2,83	1,51	66,81
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI											
		Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	%	3,81	3,97	3,61	4,40	121,88	4,40	3,71	97,38
		Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	%	3,81	4,96	3,61	4,40	121,88	4,40	3,71	97,38
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	%	80,00	3,45	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00
		Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	%	11,43	3,60	10,00	27,12	271,20	27,12	8,57	74,98
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
				Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	98,40	98,50	98,00	98,72	100,73	98,72	98,20	99,80
				Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,80	49,72	49,75	49,75	100,00	49,75	49,77	99,94
				Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	97,70	98,41	96,15	98,78	102,74	98,78	96,69	98,97
				Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	46,81	43,00	44,27	44,33	100,14	44,33	45,54	97,29
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	%	27,08	25,00	26,87	26,87	100,00	26,87	26,97	99,59

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	%	-	47,44	-	-	-	-	-	-
				Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,81	-	49,74	49,74	100,00	49,74	49,79	99,96
				Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator hubungan Industrial	%	-	27,00	-	-	-	-	-	-
				Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	%	97,70	-	96,15	98,78	102,74	98,78	96,69	98,97
				Prosentase perusahaan dengan kategori rawan/ setengah rawan	%	35,50		36,70	36,71	100,03	36,71	36,00	101,41
				Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Bipartit	%	-	73,00	-	-	-	-	-	-

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program/Kegiatan Tahun 2024 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Target Akhir Renstra 2024 - 2026 s/d Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	
								Target Renja PD Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
				Persentase perusahaan yang telah dibina pembuatan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	%	80,00	17,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00
			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	%	2,28	2,28	2,28	2,28	100,00	2,28	2,16	94,74

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja program pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024 sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut selain karena didukung melalui anggaran APBD, juga didukung melalui anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), APBN atau luncturan dari Kementerian. Selain itu, penggunaan media online (zoom) dan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan juga menambah capaian kinerja.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3			26,40		26,40		
2	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja				26,67		26,67	
3	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan			89,58		89,58		
4	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan				80,96		80,96	
5	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi				8,39		8,39	
6	Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi			38,14		38,14		
7	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi				14,09		14,09	
8	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri			2,88		12,21		
9	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri				75,13		75,13	
10	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran			46,90		78,54		

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata				22,40		22,40	
12	Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian			9,45		21,22		
13	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian				9,60		9,60	
14	Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi			2,30		5,10		
15	Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas			4,40		4,53		
16	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas				64,00		64,00	
17	Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan			13,13		20,00		
18	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas				72,00		72,00	
19	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja			62,85		68,57		
20	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah				68,57		68,57	
21	Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal			71,03		73,76		
22	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal				42,00		42,00	
23	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal			68,10		68,11		
24	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal				68,30		68,30	
25	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal				20,00		20,00	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2024	Proyeksi Capaian Tahun 2025	Catatan Analisis
				2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi				66,89		66,89	
27	Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian			3,61		4,40		
28	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian				1,20		1,20	
29	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi			3,61		4,40		
30	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi				1,04		1,04	
31	Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan			98,00		98,72		
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)				47,56		47,56	
33	Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk			49,75		49,75		
34	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk				49,77		49,77	
35	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial			96,15	96,69	98,78	96,69	
36	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah			44,27	43,13	44,33	43,13	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian didasarkan pada indikator urusan ketenagakerjaan dan ketramigrasian yang mendasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 untuk menyusun Renja 2026 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta Kementerian/Lembaga maupun kerjasama antar provinsi dalam rangka pencapaian kinerja Renstra Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan dan hambatan yang berdampak terhadap pencapaian serta tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan pelayanan OPD.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan dan Ketramigrasian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu:

a. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Sakernas Agustus) sebesar 4,66 %, turun 0,12 % dibanding pada Agustus 2024.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2025 terdiri dari 21,30 juta orang penduduk bekerja dan 1,04 juta orang pengangguran (4,66%). Apabila dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja dan jumlah

Penduduk yang bekerja berdasarkan pendidikan yang ditamatkan masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebanyak 40,14 %. Angka tersebut turun sebesar 1,37 % jika dibandingkan tahun 2024. Penduduk yang bekerja dengan pendidikan tamatan SMP sebanyak 20,17 %, turun sebesar 0,11 % dibandingkan tahun 2024. Penduduk yang bekerja dari pendidikan tamatan SMK sebanyak 16,03 %, meningkat sebesar 0,94 % dibandingkan tahun 2024; tamatan SMA sebanyak 14,10 %. Persentase kumulatif pekerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Diploma IV/S1/S2/S3 masih merupakan yang terkecil yaitu 9,56 %.

- b. Berkurangnya Instruktur di BLK Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), formasi baru belum sebanding dengan instruktur yang pensiun.
- c. Kurangnya kualitas instruktur BLK Pemerintah dalam menjalankan program pelatihan.
- d. Terbatasnya staf/pegawai yang dapat memahami SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).
- e. Kurang masifnya sosialisasi dan informasi jenis pelatihan dan fungsi BLK/LPK di tiap daerah.
- f. Belum semua LPK melakukan *Training Need Analysis* (TNA) kebutuhan pelatihan secara berkelanjutan.
- g. Sarana dan prasarana pelatihan yang masih kurang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi industri/perusahaan.
- h. Terbatasnya fasilitasi kegiatan untuk UJK (Uji Kompetensi) dan Sertifikasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).
- i. Pemahaman program pemagangan masih terbatas belum sesuai dengan ketentuan/pedoman.
- j. Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin serta produktivitas pencari kerja dan tenaga kerja.

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

- a. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat.
- b. Banyak lowongan kerja yang kebutuhannya belum terpenuhi, hal ini dikarenakan beberapa hal:
 - 1) Belum optimalnya penyebaran informasi lowongan kerja
 - 2) Kompetensi calon pencaker belum sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna tenaga kerja/perusahaan
 - 3) Belum ada transportasi/akses transportasi menuju lokasi perusahaan, sehingga tenaga kerja kesulitan untuk berangkat kerja
 - 4) Biaya sewa tempat tinggal/rumah/kamar/kost untuk tenaga kerja di sekitar perusahaan mahal
 - 5) Upah dan lowongan kerja tidak sesuai dengan minat pencaker
- c. Pencari kerja yang sudah terdaftar melalui bursa kerja online, setelah diterima bekerja di perusahaan tidak melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat.
- d. Peserta pemberdayaan, baik pencari kerja dan masyarakat maupun PMI purna dan keluarganya tidak bisa mengembangkan pembekalan untuk berwirausaha. Karena antusias masyarakat melanjutkan usaha rendah dan mudah menyerah saat hasil tidak sesuai yang

diharapkan. Selain itu tidak ada fasilitasi modal untuk sarana usaha dan modal usaha, serta keterbatasan akses pasar.

- e. Alokasi penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi tidak seimbang dengan jumlah animo masyarakat Jawa Tengah yang telah mendaftar sebagai calon transmigran. Jumlah animo tahun 2019 sebanyak 2.358 KK (Kepala Keluarga), kuota dari Pusat = 243 KK (APBD dan APBN), realisasi penempatan sebanyak 185 KK. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 telah mendukung dengan pola *sharing* dengan provinsi tujuan penempatan transmigrasi (Provinsi Kalimantan Utara) untuk sebanyak 100 KK. Pada tahun 2020 dengan animo sebanyak 1.263 KK dan tidak ada penempatan dikarenakan pandemi Covid-19, juga sudah tidak dilaksanakan pola *sharing* dimulai tahun 2020. Pada tahun 2021 telah menempatkan calon transmigran pada daerah tujuan transmigrasi sebanyak 10 KK dan di tahun 2022 ditempatkan sebanyak 53 KK dari animo transmigrasi yang sebanyak 1.003 KK. Sedangkan pada tahun 2023 telah dilakukan penempatan calon transmigran sebanyak 20 KK dari animo transmigrasi sebanyak 673 KK. Untuk penempatan transmigran tahun 2024, sebanyak 16 KK dari animo transmigrasi sebanyak 360 KK. Penempatan transmigrasi tahun 2025 sebanyak 19 KK (73 jiwa) dari animo transmigrasi sebanyak 390 KK.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

- a. Masih banyak perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak. Dari 10.932 perusahaan, perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebanyak 2.985 perusahaan atau 19,07 % (Data Disnakertrans Prov.Jateng per Desember 2024). Sehingga masih ada 7.947 perusahaan yang belum menerapkan tata kelola kerja yang layak.
- b. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial, masih tingginya perselisihan penempatan tenaga kerja dan kasus pekerja migran.
- c. Adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- d. Terjadinya peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Data PHK tahun 2025 sebanyak 18.101 orang, meningkat dari data PHK tahun 2024 sebanyak 8.232 orang dan yang dirumahkan tahun 2024 sebanyak 3.719 orang, sehingga jumlah keseluruhan 11.951 orang.
- e. Adanya demo atau aksi unjuk rasa dari SP/SB terkait dengan penetapan upah minimum.
- f. Permasalahan hubungan industrial dan jaminan sosial tidak

termonitor dengan baik.

- g. Kurangnya pemahaman peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan. Dari 4.266 perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit, yang sudah membentuk LKS Bipartit sebanyak 1.965 perusahaan (Data Desember 2024).
- h. Terdapat perubahan formula penghitungan Upah minimum berdasarkan PP No.49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
Penetapan Upah Minimum tahun 2026 didasarkan pada PP No.49 Tahun 2025 yang didalamnya terdapat formula penghitungan Upah minimum. Sebagai dasar penghitungan menggunakan data perekonomian yang bersumber dari BPS yaitu Pertumbuhan Ekonomi tingkat provinsi untuk UMP dan UMSP, Pertumbuhan Ekonomi tingkat kabupaten/kota untuk UMK dan UMSK, serta inflasi tingkat provinsi/kabupaten/kota. Selanjutnya untuk indeks tertentu dalam formula penghitungan Upah minimum ditentukan nilainya oleh Dewan Pengupahan, untuk UMP dan UMK dalam rentang 0,5 s.d. 0,9, sedangkan UMSP dan UMSK berdasarkan Keputusan dari Dewan Pengupahan baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- i. Terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, sebagai tindak lanjut dari UU No.13/2023 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja dan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023. Serta PP No.78/2015 tentang Pengupahan yang terkait dengan Standar Struktur Dan Skala Upah, diganti dengan PP No.36/2021 jo. PP No.51/2023 jo. PP No.49/2025.
- j. Banyak mediator di kabupaten/kota yang dipindahtugaskan di luar Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Beberapa rumusan permasalahan di Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Masih tingginya angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan belum terlaksananya standarisasi K3 di tempat kerja. Adanya berbagai faktor bahaya antara lain lalu lintas, jalan raya, faktor fisika, faktor kimia, faktor lingkungan kerja dan faktor kecelakaan kerja di perusahaan. Adanya sumber-sumber produksi di tempat kerja yang belum menerapkan K3 dan belum diterapkannya budaya K3 oleh masyarakat.
- b. Terbatasnya jumlah pegawai Pengawas Ketenagakerjaan baik Pengawas Ketenagakerjaan umum maupun spesialis. Jumlah pegawai Pengawas Ketenagakerjaan se-Jawa Tengah sebanyak 129 orang per September 2025, dan diperkirakan semakin turun menjadi 120 orang pada bulan Januari 2026. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah.
- c. Masih tingginya pekerja anak di Jateng yang bekerja di sektor informal.

Data Tahun 2024, Penduduk Usia Kerja (PUK) usia 10-17 tahun yang bekerja sebanyak 328.986 orang.

- d. Masih kurangnya perlindungan hak normatif pekerja perempuan di sektor formal maupun informal. Hal ini ditunjukkan belum sepenuhnya hak normatif tenaga kerja perempuan dilaksanakan. Pembinaan perusahaan yang terkait dengan penghapusan diskriminasi perempuan di tempat kerja (EEO), target perusahaan yang dibina di tahun 2024 sebanyak 30 perusahaan. Dari 25 perusahaan yang telah selesai dilakukan pembinaan, menunjukkan hasil bahwa tidak ada diskriminasi di tempat kerja, sedangkan 5 perusahaan belum dilakukan pembinaan.
- e. Belum adanya peraturan/regulasi yang mengatur perlindungan pekerja perempuan di sektor informal.
- f. Masih lemahnya kebijakan perlindungan dan penempatan TKI ke luar negeri dan kurangnya koordinasi kelembagaan penempatan TKI.

Permasalahan tersebut diatas akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian nasional/internasional bahwa kinerja pelayanan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading* dalam penurunan jumlah pengangguran di Jawa Tengah harus didukung oleh seluruh OPD pemangku kepentingan, berkolaborasi dan bersinergi dengan *stakeholder* terkait. Untuk mewujudkan pekerjaan yang layak (*decent work*) bagi masyarakat, dilakukan dengan memberikan dan memfasilitasi masyarakat terhadap kebutuhan pelatihan khususnya bagi pencari kerja supaya berkompeten, memberikan akses untuk mencari pekerjaan/penyediaan lapangan kerja, serta menjaga hubungan industrial yang kondusif antara pengusaha dan pekerja serta pelayanan pengawasan ketenagakerjaan yang dampaknya akan menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran. Disamping itu, pengembangan program transmigrasi dilaksanakan untuk mendukung program pengembangan daerah wilayah terdepan dan tertinggal di wilayah perbatasan sebagai perwujudan satu kesatuan dari negara kesatuan Indonesia dan keadilan dalam menikmati hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun pengembangan Pembangunan dan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memiliki tantangan dan peluang. **Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diuraikan dengan membagi ke dalam bidang pelayanan yang diberikan, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:**

1. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu:

- a. Globalisasi dan persaingan bebas bagi tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri serta pengakuan sertifikasi kompetensi oleh perusahaan/pelaku usaha yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja.
- b. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil/kompetensi sesuai dengan keahlian sektor perusahaan/industri serta pelatihan kerja yang dilaksanakan belum mengacu pada kebutuhan pasar/pengguna

tenaga kerja.

- c. Produktivitas sangat diharapkan di perusahaan baik produksi maupun jasa namun masih rendah dan minimnya penerapan produktivitas dalam dunia kerja.
- d. Revitalisasi BLK melalui peningkatan sarana dan prasarana BLK.

Peluang pengembangan pelayanan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas yaitu:

- a. Adanya dukungan kebijakan dari segi program dan penganggaran yang responsif gender (ARG).
- b. Perpres No.68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, bab membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi guna melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan dan penganggaran dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah.
- c. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor:400/76 tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2023-2026. Dalam rangka revitalisasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi guna peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Jawa Tengah dan adanya langkah strategis oleh pemangku kepentingan sesuai ketentuan Pasal 22 (ayat 2).
- d. Perpres No.1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) akan mendorong terbentuknya LPD (Lembaga Produktivitas Daerah) yang dibentuk oleh Gubernur untuk lebih meningkatkan gerakan produktivitas di daerah.

2. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

- a. Jumlah Pengangguran di Jawa Tengah masih relatif tinggi sehingga membutuhkan banyak mekanisme untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja.
- b. Jumlah TKA yang dipekerjakan masih relatif banyak sehingga masih diperlukan mekanisme pengendalian.
- c. Perlu peningkatan dan penyebarluasan akses informasi tentang peluang kerja dalam dan luar negeri agar secara cepat dan mudah diketahui oleh masyarakat.
- d. Perlu adanya peningkatan kualitas dari pencari kerja untuk bisa mengisi lowongan-lowongan kerja yang tersedia.

Peluang pengembangan pelayanan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu:

- a. Adanya dukungan kebijakan dari segi program dan penganggaran yang responsif gender (ARG).
- b. Pengembangan aplikasi Ayo Kerjo yang terintegrasi dengan aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni), sebagai fasilitas penyebarluasan informasi pasar kerja dan menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja.
- c. Peluang kesempatan kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan

adanya kebijakan pemerintah mengenai KUR guna pengembangan kewirausahaan/UMKM.

- d. UU Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, memberikan perlindungan pada pekerja migran dari sejak berangkat dan di negara tujuan dan sampai kembali ke Indonesia. Hal ini memberikan peluang kesempatan kerja yang berkeadilan dengan memberikan perlindungan yang optimal pada Pekerja Migran Indonesia.
 - e. Perpres No.57 Tahun 2023 tentang Wajib Laporkan Lowongan Ketenagakerjaan, bahwa pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melalui sistem informasi ketenagakerjaan dan/atau pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di daerah.
 - f. Telah terbentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Disnakertrans Prov.Jawa Tengah untuk mendukung pencapaian kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP): Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal. Mendasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta RPJMN dan RPJPD Prov.Jawa Tengah. Dengan terbentuknya ULD tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan dan peluang kesempatan kerja serta perlindungan bagi disabilitas di Provinsi Jawa Tengah (bagi perusahaan swasta wajib mempekerjakan tenaga kerja disabilitas 1% dari jumlah pegawai dan untuk instansi pemerintah atau perusahaan daerah/nasional (BUMD/BUMN) wajib mempekerjakan tenaga kerja disabilitas sebanyak 2% dari jumlah pegawai).
3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
- Tantangan pengembangan pelayanan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:
- a. Di Jawa Tengah masih banyak perusahaan yang belum mempunyai peraturan perusahaan sehingga perlu untuk meningkatkan kesadaran pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan.
 - b. Terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, sebagai tindak lanjut dari UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja dan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023. Serta PP No.78/2015 tentang Pengupahan yang terkait dengan Standar Struktur Dan Skala Upah, diganti dengan PP No.36/2021 jo. PP No.51/2023 jo. PP No.49/2025.
 - c. Adanya Indikator Utama Pembangunan (IUP) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi. Untuk mendorong capaian kinerja IUP tersebut baik untuk penerima upah (formal) maupun bukan penerima upah (informal) yang mendapatkan perlindungan

jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peluang pengembangan pelayanan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yaitu:

- a. Adanya dukungan kebijakan dari segi program dan penganggaran yang responsif gender (ARG).
- b. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta aktif Jamsostek sebanyak 104.911 perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di aplikasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) tahun 2025 sebanyak 263.663 perusahaan. sehingga masih ada peluang sebanyak 158.752 perusahaan untuk menjadi peserta aktif Jamsostek.
- c. Jumlah perusahaan di Jawa Tengah yang wajib membuat LKS Bipartit berjumlah 4.266 perusahaan, sedangkan yang sudah membentuk LKS Bipartit sebanyak 2.178 perusahaan. Jadi masih ada peluang sebanyak 2.088 perusahaan.
- d. Rata-rata UMK di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp. 2.437.073,89 sudah melebihi target UMP sebesar Rp. 2.169.349,00. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diperlukan penerapan Struktur Upah dan Skala Upah di perusahaan.

4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Tantangan pengembangan pelayanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Masih tingginya angka kecelakaan kerja.
- b. Masih rendahnya perlindungan norma kerja.
- c. Masih rendahnya perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Masih rendahnya kepatuhan norma ketenagakerjaan.
- e. Beralihnya pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peluang pengembangan pelayanan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yaitu:

- a. Adanya dukungan kebijakan dari segi program dan penganggaran yang responsif gender (ARG).
- b. Adanya regulasi terkait pelaksanaan peraturan di bidang norma ketenagakerjaan bagi pengusaha atau pemberi kerja.
- c. Adanya program nasional dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pengawasaan norma kerja perempuan dan anak yaitu pengurangan pekerja anak/anak yang bekerja yang dikembalikan ke dunia pendidikan dengan penarikan pekerja anak dikembalikan ke dunia sekolah. Terkait hal tersebut, kegiatan penarikan pekerja anak di kembalikan ke dunia sekolah sangat mendukung Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
- d. Adanya standarisasi dan sertifikasi K3 di tempat kerja bagi perusahaan yang menggunakan mesin dan peralatan yang memenuhi standar K3.

- e. Adanya aplikasi SIKATIGA, aplikasi SIP2K3 dan aplikasi SILADU diantaranya untuk mempermudah, mempercepat penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pengaduan kasus ketenagakerjaan dan juga untuk menghapuskan gratifikasi dalam pelayanan ketenagakerjaan (pelayanan pengaduan dan penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pembinaan norma ketenagakerjaan, pelayanan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, pelayanan pemeriksaan dan pengujian objek K3, pelayanan penerbitan produk pelayanan K3, pelayanan WLKP/Wajib Lapor Ketenagakerjaan, pelayanan penetapan kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan kerja, perhitungan klaim jaminan kecelakaan kerja, dan pelayanan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan).
- f. Penggunaan aplikasi Norma100 dari Kemnaker mendukung kegiatan dan capaian kinerja penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, yang merupakan salah satu solusi meningkatkan cakupan perusahaan yang diperiksa oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan melalui *self assessment* terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan oleh perusahaan.

Adapun formulasi dari isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis akan ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu tahun 2026.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 memuat program/kegiatan setelah dilakukan identifikasi program/kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD kemudian dibandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang direncanakan yaitu tahun 2026. Jumlah pagu indikatif Rancangan Awal RKPD sebesar Rp. 106.581.363.000,00. Setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan yang direncanakan pada tahun 2026, maka pagu indikatif menjadi sebesar Rp. 89.667.936.000,00 yang terdiri dari beberapa program sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 246.740.000,00, program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Program (Sekretariat). Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026, pagu indikatif menjadi Rp. 121.635.000,00.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.645.081.000,00, program ini dilaksanakan oleh Bidang Pentatrans (Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026, pagu indikatif menjadi Rp. 1.510.000.000,00.

c. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.469.888.000,00, program ini

dilaksanakan oleh Bidang Lattas (Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja) dan 4 UPTD/BLK di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, yaitu Balai Latihan Kerja Industri, Balai Latihan Kerja Pertanian, Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata, Balai Pengembangan Produktivitas. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026, pagu indikatif menjadi Rp. 7.572.217.000,00.

d. Program Hubungan Industrial

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.191.461.000,00, program ini dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026, pagu indikatif menjadi Rp. 950.000.000,00.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.933.667.000,00, program ini dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan 1 UPTD yaitu Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditambah 6 Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026, pagu indikatif menjadi Rp. 1.748.312.000,00.

f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, diusulkan kegiatan-kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 146.673.000,00. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026, pagu indikatif menjadi Rp. 150.000.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pentatrans (Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi) untuk penempatan transmigrasi dan Balai Latihan Kerja Pertanian untuk melakukan pelatihan bagi calon transmigran.

g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 91.947.853.000,00. Setelah dilakukan analisa kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026, pagu indikatif menjadi Rp. 77.615.772.000,00. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas dan 6 UPTD/Balai di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.3**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	71,07%	876.290	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	71,07%	1.007.325
			Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	68,50%	596.003			Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	68,50%	450.915
			Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	21,75%	78.000			Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	21,75%	14.290
			Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	67,30%	94.788			Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	67,30%	37.470
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jawa Tengah	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	2,06%	116.673	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jawa Tengah	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	2,06%	90.000
			Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	1,20%	30.000			Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	1,20%	60.000
3	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	85,71%	246.740	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	85,71%	121.635

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	68,00%	747.043	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jawa Tengah	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	68,00%	375.000
			Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	73,00%	1.778.391			Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	73,00%	893.372
			Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	9,28%	424.346			Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	9,28%	331.323
			Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	14,29%	108.505			Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	14,29%	93.677
			Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	83,68%	1.559.283			Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	83,68%	1.550.000
			Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	9,60%	2.667.870			Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	9,60%	2.065.542

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	23,38%	2.184.450			Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	23,38%	2.263.303
5	Program Hubungan Industrial	Jawa Tengah	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	41,99%	173.250	Program Hubungan Industrial	Jawa Tengah	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	41,99%	141.605
			Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	49,80%	496.868			Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	49,80%	295.084
			Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	96,75%	332.139			Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	96,75%	297.039
			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,75%	189.204			Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,75%	216.272
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jawa Tengah	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	80,80%	1.469.705	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Jawa Tengah	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	80,80%	1.300.000
			Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	27,06%	463.962			Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	27,06%	448.312
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Tengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00%	703.260	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Tengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00%	378.365

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00%	85.277.641			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100,00%	71.324.564
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	100,00%	1.702.178			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	100,00%	1.300.000
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian	100,00%	1.536.513			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian	100,00%	1.111.155
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	100,00%	853.598			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	100,00%	1.350.000
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	100,00%	920.130			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	100,00%	851.688

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	100,00%	954.533			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	100,00%	1.300.000

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan masyarakat, yaitu untuk menjaring kegiatan aspirasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi–Asosiasi, pemerintah kabupaten/kota maupun hasil pengumpulan informasi sendiri terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun 2026.

Usulan program/kegiatan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang bersumber dana APBN Tahun 2026 merupakan usulan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, untuk kemudian disampaikan ke Kementerian terkait yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Transmigrasi. Usulan dari pemerintah kabupaten/kota disertai Kerangka Acuan Kinerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah melakukan rekapitulasi usulan-usulan dari pemerintah kabupaten/kota, selanjutnya disampaikan ke Kementerian terkait. Khusus untuk tahun 2026, rekapitulasi usulan tersebut dikompilasi oleh Bapeda Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian dibawa oleh Gubernur Jawa Tengah ke Kementerian-kementerian terkait. Usulan-usulan tersebut untuk mendukung Asta Cita Presiden ke-3 yaitu “melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi”. Usulan program/kegiatan APBN 2026 dari 35 kabupaten/kota dan Bidang/UPTD Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 36.934.475.912,00 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI (BIDANG LATTAS)			29.234.628.312	
1.1	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Dana APBN (Pelatihan Plate Welder SMAW 3G UP/PF, Plate Welder GMAW 3G UP/PF, Practical Office Advance, Front Liner, Pengoperasian Instalasi Kontrol Industri Berbasis PLC, Menjahit Pakaian Wanita Dewasa, Pengoperasian Mesin Bubut, Penggambaran Model 3D dengan CAD, Sepeda Motor Konvensional)	Jawa Tengah		1.287.137.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Balai Latihan Kerja Industri
1.2	Pelatihan Berbasis Kompetensi (Barista, Tour Guide, Housekeeping)	Jawa Tengah		760.730.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata
1.3	Tailor Made Training (TMT)	Jawa Tengah		53.622.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata
1.4	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi APBN	Jawa Tengah		710.469.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Balai Latihan Kerja Pertanian
1.5	Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri	Jawa Tengah		2.937.340.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Lattas
1.6	Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP)	Jawa Tengah		54.140.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Lattas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
1.7	Bimbingan Peningkatan Produktivitas	Jawa Tengah		122.475.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Balai Pengembangan Produktivitas
1.8	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Jawa Tengah		147.525.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Balai Pengembangan Produktivitas
1.9	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jawa Tengah		281.900.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Lattas
1.10	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kab.Demak		126.589.500	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
1.11	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Pelatihan Kejuruan Jahit, Rias, Boga, POA, Las, Motor dan AC)	Kab.Demak		469.590.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
1.12	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kab/Kota (8 Laptop, 1 Printer)	Kab.Demak		178.065.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
1.13	Pengadaan sarana pelatihan kerja Kab/Kota (8 unit AC)	Kab.Demak		32.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
1.14	Bimtek Perijinan dan Management Pengelola LPK	Kab.Kudus		79.040.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
1.15	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang dilanjutkan dengan program pemagangan dalam negeri	Kab.Kudus		196.240.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
1.16	Peningkatan Peralatan Pelatihan (menjahit, pengelasan, otomotif mobil, bisnis manajemen, komputer/IT, tata boga dan tata kecantikan)	Kab.Kudus		1.699.866.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
1.17	Kebutuhan peralatan program teknik kendaraan ringan kejuruan otomotif	Kab.Wonogiri		1.768.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
1.18	Kebutuhan peralatan program content creator kejuruan teknologi informasi	Kab.Wonogiri		537.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
1.19	Kebutuhan paket pelatihan pengembangan pariwisata dan potensi daerah (Pembuatan roti dan kue 4 paket, menjahit 5 paket, internet marketing 4 paket, desain grafis 4 paket, pengelola administrasi perkantoran 3 paket, content creator 2 paket, pengelasan 4 paket, pengoperasian mesin bubut 2 paket, teknisi kendaraan ringan sistem injeksi 2 paket, teknisi sepeda motor sistem konvensional 2 paket, social media officer 1 paket, spooring balancing kendaraan ringan 2 paket, drafter CAD mekanikal 2 paket, pembuatan batik tulis 3 paket)	Kab.Wonogiri		3.130.400.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
1.20	Pelatihan Kewirausahaan	Kab.Wonogiri		250.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
1.21	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Kab.Wonogiri		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
1.22	Pelatihan Pengukuran Produktivitas	Kab.Wonogiri		50.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
1.23	Pemagangan Dalam Negeri	Kab.Wonogiri		166.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
1.24	Pelatihan Menjahit pakaian wanita dewasa	Kab.Temanggung		110.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.25	Pelatihan menjahit sesuai style	Kab.Temanggung		110.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.26	Pelatihan pembuatan roti dan kue	Kab.Temanggung		55.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.27	Pelatihan tata boga	Kab.Temanggung		55.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.28	Pelatihan desain grafis muda	Kab.Temanggung		55.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.29	Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran	Kab.Temanggung		55.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.30	Pelatihan Juru Gambar Bangunan Gedung	Kab.Temanggung		55.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
1.31	Service Sepeda Motor Injeksi	Kab.Temanggung		110.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.32	Pelatihan Barista	Kab.Temanggung		55.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.33	Pelatihan Digital Marketing	Kab.Temanggung		55.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.34	Peralatan Pelatihan Kejuruan Otomotif	Kab.Temanggung		186.185.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.35	Peralatan Kejuruan TIK	Kab.Temanggung		534.750.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.36	Peralatan Kejuruan Fashion Technology	Kab.Temanggung		252.080.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.37	Peralatan Kejuruan Barista	Kab.Temanggung		65.527.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Temanggung
1.38	Pelatihan Kejuruan Otomotif	Kab.Banyumas		5.922.680.920	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM Kab.Banyumas
1.39	Pelatihan Kejuruan Las	Kab.Banyumas		3.801.211.392	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM Kab.Banyumas
1.40	Pelatihan Kejuruan TIK	Kab.Banyumas		2.168.065.500	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM Kab.Banyumas
1.41	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kab.Pati		500.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati
2	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (BIDANG PENTA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA)			4.808.756.600	
2.1	Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Kab.Demak		535.000.400	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
2.2	Bursa Kerja/Job Fair	Kab.Demak		233.427.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
2.3	Pelayanan Antar Kerja	Kab.Demak		105.335.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
2.4	Perluasan Kesempatan Kerja (Budidaya Ayam Kampung)	Kab.Kudus		231.350.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
2.5	Perluasan Kesempatan Kerja (Pembuatan Aneka Kripik)	Kab.Kudus		238.850.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
2.6	Bimtek Management Usaha PMI Purna dan Keluarganya	Kab.Kudus		65.210.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
2.7	Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri	Kab.Blora		132.390.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
2.8	Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Padat Karya Produktif	Kab.Blora		210.050.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
2.9	Job Fair Daerah	Kab.Blora		115.500.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
2.10	Pemberdayaan masyarakat perlakuan khusus penyandang disabilitas (difabel) dan lansia (pelatihan kerajinan tangan dan tata boga)	Kab.Wonogiri		195.350.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
2.11	Job Fair/Bursa Kerja	Kab.Wonogiri		120.350.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Wonogiri
2.12	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia	Kab.Magelang		180.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Magelang
2.13	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Kab.Magelang		95.226.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Magelang
2.14	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab.Magelang		426.969.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Magelang
2.15	Padat Karya Produktif	Kab.Purbalingga		200.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Purbalingga
2.16	Tenaga Kerja Mandiri	Kab.Purbalingga		170.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Purbalingga
2.17	Pelatihan Menjahit bagi Penyandang Disabilitas	Kota Pekalongan		166.424.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
2.18	Pelatihan Menjahit dan Barber bagi Pencaker Disabilitas	Kota Tegal		289.610.200	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
2.19	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab.Tegal		259.595.000	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Tegal
2.20	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Kab.Tegal		315.495.000	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Tegal
2.21	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Job Fair/Bursa Kerja)	Kab.Pati		130.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati
2.22	Perlindungan PMI (Pemberdayaan PMI Purna Penempatan)	Kab.Pati		115.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati
2.23	Perlindungan PMI (Penyediaan Layanan Terpadu pada CPMI untuk Sosialisasi Prosedur Penempatan PMI)	Kab.Pati		38.125.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati
2.24	Pelayanan Antar Kerja (Padat Karya Produktif)	Kab.Pati		134.000.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati
2.25	Pelayanan Antar Kerja (Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri)	Kab.Pati		105.500.000	Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati
3	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (BIDANG HI)			1.245.413.000	
3.1	Perusahaan Besar dan Menengah yang Mendapatkan Pemahaman Tata Cara Pengesahan ePP	Jawa Tengah		194.034.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
3.2	Edukasi Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jawa Tengah		129.470.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
3.3	Pelaku Hubungan Industrial yang Mendapatkan Edukasi Program Jaminan Sosial	Jawa Tengah		96.413.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
3.4	Layanan Data dan Informasi	Jawa Tengah		253.251.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
3.5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab.Demak		99.565.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
3.6	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Demak		99.565.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
3.7	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab.Demak		99.565.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
3.8	Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Kab.Kudus		68.200.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
3.9	Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Kab.Kudus		109.750.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
3.10	Bimbingan Teknis Pencegahan Perselisihan dan/atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Kab.Kudus		47.800.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
3.11	Bimbingan Teknis Pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Kab.Kudus		47.800.000	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Kudus
4	PROGRAM PEMBINAAN KETENAGAKERJAAN (BIDANG WASNAKER)			0	
4.1	-	Jawa Tengah			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng
5	PROGRAM DAERAH TERTINGGAL, KAWASAN PERBATASAN, PERDESAAN DAN TRANSMIGRASI			1.371.518.000	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume (Rp)	Catatan
5.1	Perpindahan dan Penempatan Transmigran	Jawa Tengah		939.090.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.2	Dukungan Manajemen dan Layanan Kantor	Jawa Tengah		82.428.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Jateng - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.3	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Kab.Blora		200.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
5.4	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Blora		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Blora
5.5	Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Tegal		50.000.000	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Tegal
6	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			274.160.000	
6.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab.Demak		115.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
6.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab.Demak		159.160.000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab.Demak
JUMLAH BESARAN/VOLUME (Rp)				36.934.475.912	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional Pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, yang terdiri dari:

- 1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
- 3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- 4) memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
- 5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 7) memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung visi misi Presiden, tercermin dari visi Provinsi Jawa Tengah yaitu **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, dilakukan upaya yang dijabarkan menjadi enam misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
- 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah,

perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; serta

- 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA (Sekretaris Daerah). Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan pada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial, dan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2029 serta mendasarkan pada agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang merupakan bagian dari agenda dan sasaran pembangunan nasional, pembangunan bidang ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional. Agenda dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Transmigrasi.

1. Kementerian Ketenagakerjaan

Visi dan Misi Kementerian Ketenagakerjaan merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan nasional, pembangunan bidang

ekonomi, pembangunan lintas bidang dan pembangunan wilayah demi terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional

a. Visi

Visi Kementerian Ketenagakerjaan adalah **“Terwujudnya ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, produktif, dan berkeadilan menuju Indonesia emas 2045”**.

b. Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- 1) mengembangkan ekosistem pelatihan vokasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini dan mendatang;
- 2) mengembangkan sistem informasi pasar kerja yang andal secara kolaboratif untuk perluasan dan pemerataan kesempatan kerja;
- 3) meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, hubungan industrial yang harmonis dan penegakan norma ketenagakerjaan & K3 yang berkeadilan;
- 4) memperkuat tata kelola birokrasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme;
- 5) membangun ekosistem pengembangan diri pegawai yang inklusif dan kondusif.

c. Tujuan

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan adil serta memperkuat perlindungan, kesejahteraan dan produktivitas pekerja;

Indikator Kinerja Tujuan-1: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Nilai)

- 2) meningkatnya tata kelola Kementerian Ketenagakerjaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Indeks Kinerja Tujuan-2: Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)

d. Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan. Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK). Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama (IKSS/IKU) ini didukung oleh sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

- laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja;
- persentase lulusan vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
- jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan;
- jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial;
- persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan;

- peningkatan jumlah kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3;
- tingkat kepuasan stakeholder terhadap rencana tenaga kerja;
- persentase lulusan politeknik ketenagakerjaan yang bekerja dan/atau magang;
- jumlah penerima manfaat sistem informasi pasar kerja yang bekerja.

2) Meningkatnya tata kelola dan pelayanan publik Kementerian Ketenagakerjaan yang profesional dan berintegritas. Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. IKSS/IKU ini didukung oleh sejumlah Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

- indeks SPBE/Indeks Pemerintahan Digital;
- persentase kualitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal;
- persentase temuan hasil pemeriksaan menurun Kementerian Ketenagakerjaan;
- tingkat tata kelola manajemen internal Inspektorat Jenderal;
- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) general dan tematik;
- opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- tindak lanjut temuan BPK;
- Nilai Kinerja Anggaran (NKA);
- nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) hasil Penjaminan Kualitas (PK);
- tingkat maturitas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

2. Kementerian Transmigrasi

Dalam RPJMN 2025-2029, secara eksplisit Kementerian Transmigrasi mendapatkan mandat utama pada Prioritas Nasional 2 (PN 2), yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, serta Prioritas Nasional 6 (PN 6), yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disusunlah Visi dan Misi Kementerian Transmigrasi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029.

a. Visi

Visi Kementerian Transmigrasi tahun 2025 - 2029 adalah:

“Terwujudnya Transformasi Transmigrasi yang mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi baru melalui Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi yang didukung dengan SDM unggul guna menciptakan Kesejahteraan untuk Semua dalam

**rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**

b. Misi

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah Misi Kementerian Transmigrasi Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi;
- 2) Membangun kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan guna memastikan kesejahteraan bagi semua transmigran;
- 3) Menciptakan SDM transmigrasi yang unggul dan berdaya saing dengan semangat patriotisme untuk mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi;
- 4) Membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi untuk mewujudkan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi;
- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan transmigrasi berbasis sinergi dan kolaborasi multisektor dan revitalisasi kawasan transmigrasi;
- 6) Mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola Kementerian Transmigrasi yang unggul dengan mengedepankan nilai BerAKHLAK, digitalisasi, dan transparansi dalam peningkatan kualitas kebijakan, kapasitas SDM, pengawasan internal, serta layanan data dan informasi ketransmigrasian yang akurat dan terintegrasi.

c. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 2025 - 2029 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya kepastian hukum hak atas tanah dan optimalisasi pemanfaatan lahan transmigrasi guna mendukung keberlanjutan program transmigrasi

Indikator Tujuan 1 adalah:

- Persentase lahan transmigrasi yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah
- Persentase lahan transmigrasi yang telah dimanfaatkan sesuai rencana tata ruang dan rencana pengembangan kawasan

- 2) Terwujudnya kawasan transmigrasi berbasis sumber daya lokal khususnya sumber daya manusia lokal untuk mendukung swasembada pangan, memperkuat ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan transmigran

Indikator Tujuan 2 adalah:

- Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran lokal
- Persentase transmigran lokal yang ditempatkan

- Jumlah kawasan transmigrasi yang mengembangkan usaha berbasis potensi sumber daya lokal
 - Persentase transmigran lokal yang telah mendapatkan program pemberdayaan ekonomi
 - Persentase penduduk lokal dan transmigran yang dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal
- 3) Terciptanya kualitas SDM unggul, terampil, dan berdaya saing serta mampu mempercepat pembangunan dan kemandirian kawasan transmigrasi

Indikator Tujuan 3 adalah:

- Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran patriot
 - Persentase tenaga ahli dan profesional yang berkontribusi dalam program transmigrasi
- 4) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi melalui industrialisasi dan hilirisasi komoditas lokal potensial menjadi komoditas unggulan dan diversifikasi aktivitas ekonomi

Indikator Tujuan 4 adalah:

- Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran Karya Nusantara
 - Persentase transmigran Karya Nusantara yang ditempatkan
 - Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 Kawasan Transmigrasi
 - Persentase desa maju dan desa mandiri di kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian
 - Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi
 - Persentase peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
- 5) Tercapainya pembangunan dan revitalisasi kawasan transmigrasi melalui skema sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan organisasi sosial

Indikator Tujuan 5 adalah:

- Nilai rata-rata indeks transformasi 45 kawasan transmigrasi
 - Nilai rata-rata indeks transformasi kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian
 - Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi
 - Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
- 6) Terwujudnya tata kelola Kementerian Transmigrasi yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik yang akurat dan terintegrasi

Indikator Tujuan 6 adalah:

- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Transmigrasi
- Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi
- Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Transmigrasi
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi
- Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi

d. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada kurun waktu 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya persentase lahan transmigrasi yang tersertifikasi dan dimanfaatkan secara produktif

Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1.1.1 Persentase kepastian hukum status lahan yang terselesaikan
- 1.1.2 Persentase dukungan fasilitasi legalisasi tanah Transmigrasi

- 2) Terciptanya ekosistem dalam pengembangan kawasan yang berbasis potensi lokal dan penguatan kapasitas masyarakat transmigran

Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1.2.1 Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan melalui penguatan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi lokal
- 1.2.2 Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran lokal
- 1.2.3 Persentase transmigran lokal yang ditempatkan

- 3) Terwujudnya SDM yang unggul melalui pendampingan dan transfer pengetahuan untuk mendukung kemandirian kawasan transmigrasi

Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1.3.1 Persentase tenaga ahli dan profesional yang berkontribusi dalam mewujudkan SDM Unggul di kawasan transmigrasi
- 1.3.2 Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran patriot

- 4) Terwujudnya pemerataan perekonomian di Indonesia melalui pengembangan kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi yang berdaya saing

Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1.4.1 Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi
- 1.4.2 Persentase desa maju dan desa mandiri di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian

- 1.4.3 Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi
 - 1.4.4 Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
 - 1.4.5 Persentase pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk transmigran Karya Nusantara
 - 1.4.6 Persentase transmigran yang ditempatkan melalui program Trans Karya Nusantara
 - 1.4.7 Persentase peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri di kawasan transmigrasi
- 5) Terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, serta integrasi sosial yang harmonis

Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1.5.1 Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi
 - 1.5.2 Persentase dukungan kegiatan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/dunia usaha yang dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
 - 1.5.3 Nilai rata-rata indeks transformasi 45 kawasan transmigrasi
 - 1.5.4 Nilai rata-rata indeks transformasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian
- 6) Terimplementasinya reformasi birokrasi yang berorientasi pada nilai BerAKHLAK, kapasitas SDM unggul, percepatan digitalisasi, pengawasan internal, serta transparansi layanan data dan informasi ketransmigrasian

Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1.6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Transmigrasi
- 1.6.2 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Transmigrasi
- 1.6.3 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Transmigrasi
- 1.6.4 Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi
- 1.6.5 Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Transmigrasi

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 difokuskan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yaitu **“Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional”**, dengan prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
- b. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
- c. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan dan prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah maka dilaksanakan program-program pembangunan sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- d. Program Hubungan Industrial
- e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
- f. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

3.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah : **“Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja”** dan **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi”**.

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja
3. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja		Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR)	%	69,54
1.1		Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	%	74,39
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,15
1.2		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah	56,4
1.3		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	%	10
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	79,8
2.1		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	3,01

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Angka	87,6

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026

Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang memuat rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 serta perkiraan maju tahun 2027 seperti tertuang dalam tabel 4.1.

Rumusan program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif tahun 2026 yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan RKPD yang ditetapkan.

Tabel 4.1 Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													77.655.772.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi										Angka	79,8		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga											77.237.407.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Kerja dan Transmigrasi													
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								Angka	87,6	77.237.407.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								77.237.407.000		
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan					%	100	851.688.000	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Kesehatan Kerja (Balai K3)									
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43.560.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	12	43.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.600.000		
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				960.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan	12	960.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokume n	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03 .0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				18.000.000		
										Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokume n	1	18.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						69.520.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	69.520.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.223.000		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.223.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3.266.000		
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.266.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000		
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06 .0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12.461.000		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.461.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2.550.000		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2.550.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.020.000		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	33.020.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						543.268.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	36	543.268.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.08 .0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.812.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.812.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08 .0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				202.900.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	202.900.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08 .0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				332.556.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	332.556.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						177.340.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan			Unit	50	177.340.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan							
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				94.940.000		
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	94.940.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0008					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				10.000.000		
										Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.400.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	72.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri					%	100	1.300.000.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						54.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume n	12	54.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokume n		2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.03.0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2.000.000		
										Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokume n	1	2.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						177.354.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar			%	100	177.354.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								layanan							
				X.XX.01.1.06 .0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.970.000		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.970.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.303.000		
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.303.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.273.000		
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.273.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.160.000		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.160.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.100.000		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1.100.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				113.548.000		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	113.548.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						879.596.000		
							Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun				Laporan	27	879.596.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.920.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	1.920.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.200.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	180.200.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				697.476.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	697.476.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						187.050.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	15	187.050.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.860.000		
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	19.860.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				11.000.000		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	11.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0007					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				62.300.000		
										Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	62.300.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				93.890.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									atau Bangunan Lainnya						
										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	93.890.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata					%	100	1.280.000.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						45.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	12	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				45.000.000		
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	45.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						146.073.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	146.073.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12.350.000		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.350.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan				4.439.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Perlengkapan Kantor						
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.439.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.811.000		
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	2.811.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34.500.000		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.800.000		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	10.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				3.000.000		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	3.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06 .0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.173.000		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	78.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.177.000		
							Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan				Unit	22	150.177.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07 .0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.177.000		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	150.177.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						872.800.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Daerah								
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	36	872.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	5.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				301.800.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	301.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				565.500.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	565.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						65.950.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	9	65.950.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				34.500.000		
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	34.500.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				31.450.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	31.450.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian					%	100	1.111.155.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						53.286.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	12	53.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				53.286.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume n	12	53.286.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						144.495.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	144.495.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.601.000		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.601.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06 .0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000		
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				158.000		
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokume n	1	158.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06 .0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105.736.0 00		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	105.736.0 00	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						26.201.00 0		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			Unit	1	26.201.00 0	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.07 .0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				26.201.00 0		
										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	26.201.00 0	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						765.173.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	36	765.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.000.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	125.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				639.173.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	639.173.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						122.000.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	40	122.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				55.000.000		
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	55.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	7.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0007					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				15.000.000		
										Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	15.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas					%	100	1.350.000.000	Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						34.800.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	12	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				34.800.000		
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	34.800.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						104.076.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	104.076.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				21.093.000		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	21.093.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				27.908.000		
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	27.908.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.671.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.671.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				9.124.000		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	9.124.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				16.720.000		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	16.720.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.560.000		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	18.560.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						765.080.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	36	765.080.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.400.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.400.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.000.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	225.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				538.680.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	538.680.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						446.044.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Pemerintahan Daerah								
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	40	446.044.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.679.000		
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	13.679.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				38.733.000		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	38.733.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.09 .0007					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				17.000.000		
										Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	17.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
				X.XX.01.1.09 .0009					Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				376.632.000		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	6	376.632.000	SUB BAGIAN TATA USAHA	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaia n, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si					%	100	71.344.564.000	SEKRETARI AT	
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						62.755.977.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	12	62.755.977.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				62.251.652.000		
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	420	62.251.652.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				412.980.000		
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	412.980.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
				X.XX.01.1.02.0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				91.345.000		
										Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	91.345.000	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50.000.000		
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokume n	1	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.03 .0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000		
										Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokume n	2	50.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.100.000		
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan			%	100	36.100.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.05.0005					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		
										Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				7.300.000		
										Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	7.300.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0010					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.900.000		
										Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	10.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.05.0011					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-				7.900.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Undangan						
										Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	7.900.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.234.695.000		
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	1.234.695.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				32.385.000		
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	32.385.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				62.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Kantor						
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	62.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				54.093.000		
										Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	54.093.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				108.000.000		
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	108.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.632.000		
										Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	21.632.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.06 .0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				63.500.000		
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	63.500.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.06 .0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				875.085.000		
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	875.085.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.06 .0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				18.000.000		
										Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n	12	18.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						26.048.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			Unit	30	26.048.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				26.048.000		
										Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	26.048.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.653.036.000		
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan			Laporan	40	6.653.036.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								daerah yang disusun						IAN	
				X.XX.01.1.08 .0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.08 .0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.125.458.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	1.125.458.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.08 .0003					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				145.939.000		
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	145.939.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWA IAN	
				X.XX.01.1.08 .0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				5.376.639.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.376.639.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						588.708.000		
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	75	588.708.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				198.407.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	198.407.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0005					Pemeliharaan Mebel				10.000.000		
										Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	10.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				62.800.000		
										Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	62.800.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0008					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				65.000.000		
										Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	65.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				157.496.000		
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	157.496.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				62.010.000		
										Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	62.010.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
				X.XX.01.1.09.0011					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.995.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	32.995.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											418.365.000		
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								Angka	3,01	418.365.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								418.365.000		
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi					%	100	418.365.000	SEKRETARIAT	
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						418.365.000		
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	81	418.365.000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				X.XX.01.1.01 .0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				277.284.0 00		
										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	5	277.284.0 00	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01 .0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.691.0 00		
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	100.691.0 00	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01 .0008					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				28.290.00 0		
										Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	17	28.290.00 0	SUB BAGIAN PROGRAM	
				X.XX.01.1.01 .0010					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				12.100.00 0		
										Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokume n	1	12.100.00 0	SUB BAGIAN PROGRAM	
Meningka tkan Penduduk													12.012.16 4.000	Dinas Tenaga Kerja dan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Yang Bekerja														Transmigra si	
	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR)										%	69,54		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si	
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja											6.303.845.000		
			Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten								%	10	6.303.845.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si	
				2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								6.303.845.000		
						Persentase lembaga pelatihan					%	14,29	93.677.000	Bidang Pelatihan Kerja dan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						yang terakredita si								Produktivit as Tenaga Kerja	
				2.07.03.1.02			Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja						93.677.000		
								Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga			%	31,82	93.677.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	
				2.07.03.1.02.0001					Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				93.677.000		
										Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK	26	93.677.000	Pokja Standarisasi dan Sertifikasi	
						Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi					%	9,28	331.323.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan						331.323.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Klaster Kompetensi								
								Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri			%	33,33	331.323.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				279.463.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	165	279.463.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemagangan	
				2.07.03.1.01.0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana				51.860.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Lembaga Pelatihan Kerja						
										Jumlah Kesepakatan/Koordina si dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	51.860.000	Pokja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Pemaganga n	
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian					%	10	2.065.542.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A	
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						2.065.542.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK			%	100	3.845.000	Pokja Pemasaran	
				2.07.03.1.01.0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				3.845.000		
										Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	3.845.000	Pokja Pemasaran	
								Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang			%	55,6	2.036.697.000	Pokja Pelatihan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Pertanian							
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				2.036.697.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	580	2.036.697.000	Pokja Pelatihan	
								Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja			%	100	25.000.000	Pokja Pelatihan	
				2.07.03.1.01.0003					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				25.000.000		
										Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	4	25.000.000	Pokja Pelatihan	
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di					%	83,68	1.550.000.000	Balai Latihan Kerja Industri Kelas A	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Balai Latihan Kerja Industri									
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						1.550.000.000		
								Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri			%	83,68	1.550.000.000	Pokja Pelatihan	
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				1.550.000.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	264	1.550.000.000	Pokja Pelatihan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata					%	23,38	2.263.303.000	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A	
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						2.263.303.000		
								Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan			%	23,38	2.218.553.000	Pokja Pelatihan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.03.1.01.0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				2.218.553.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	424	2.218.553.000	Pokja Pelatihan	
								Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK			%	40	11.750.000	Pokja Pemasaran	
				2.07.03.1.01.0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				11.750.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	8	11.750.000	Pokja Pemasaran	
								Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja			%	100	33.000.000	Pokja Pelatihan	
				2.07.03.1.01.0003					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				33.000.000		
										Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	3	33.000.000	Pokja Pelatihan	
		Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja											1.781.635.000		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan								%	63,15	121.635.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.02	PROGRAM PERENCANAA N TENAGA KERJA								121.635.000		
						Persentase Kabupaten/ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah					%	85,71	121.635.000	SEKRETARIAT	
				2.07.02.1.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						121.635.000		
								Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja			%	84	121.635.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				2.07.02.1.01.0001					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				51.510.000		
										Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokume n	1	51.510.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				2.07.02.1.01.0003					Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				31.605.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang	35	31.605.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
				2.07.02.1.01.0004					Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				38.520.000		
										Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang	35	38.520.000	SUB BAGIAN PROGRAM	
			Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja								%	74,39	1.660.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								1.510.000.000		
						Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal					%	21,75	14.290.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.04.1.01			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kot a						14.290.000		
								Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan			%	58,82	14.290.000	Pokja Penempata n Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.01 .0006					Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				14.290.000		
										Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	49300	14.290.000	Pokja Penempata n Tenaga Kerja Dalam Negeri	
						Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal					%	68,5	450.915.000	Bidang Penempata n Tenaga Kerja dan Transmigra si	
				2.07.04.1.01			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kot a						320.609.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .			%	47,68	320.609.000	Pokja Pelindunga n Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempata n Kerja	
				2.07.04.1.01 .0005					Perluasan Kesempatan Kerja				320.609.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	210	320.609.000	Pokja Pelindunga n Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempata n Kerja	
				2.07.04.1.04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						130.306.000		
								Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui			%	51,25	110.697.000	Pokja Pelindunga n Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempata	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal						n Kerja	
				2.07.04.1.04 .0001					Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				27.063.000		
										Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	80	27.063.000	Pokja Pelindunga n Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempata n Kerja	
				2.07.04.1.04 .0004					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				83.634.000		
										Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	60	83.634.000	Pokja Pelindunga n Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempata	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
														n Kerja	
								Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan			%	1,68	19.609.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
				2.07.04.1.04.0002					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik				15.089.000		
										Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan	10	15.089.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.04.1.04.0003					Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				4.520.000		
										Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang	100	4.520.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
						Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi					%	67,71	37.470.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				2.07.04.1.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						37.470.000		
								Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di			%	38,63	37.470.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								bidang keahlian menengah tinggi							
				2.07.04.1.03.0001					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				37.470.000		
										Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	37.470.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
						Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal					%	44,05	1.007.325.000	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
				2.07.04.1.01			Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						356.380.000		
								Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja			%	75	356.380.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.01.0001					Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				69.870.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	69.870.000	Pokja Penempata n Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.01 .0002					Pelayanan Antar Kerja				245.290.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang	1040	245.290.000	Pokja Penempata n Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.01 .0003					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				24.860.000		
										Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	200	24.860.000	Pokja Penempata n Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.01 .0004					Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				16.360.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	50	16.360.000	Pokja Penempata n Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.02			Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a						3.820.000		
								Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan			%	60	3.820.000	Pokja Penempata n Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.02 .0002					Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				3.820.000		
										Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	2	3.820.000	Pokja Penempata n Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						638.040.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja			%	83,33	638.040.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.03.0003					Job Fair/Bursa Kerja				638.040.000		
										Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	638.040.000	Pokja Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
				2.07.04.1.05			Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						9.085.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)			%	100	9.085.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	
				2.07.04.1.05.0001					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				9.085.000		
										Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang	200	9.085.000	Pokja Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Perluasan Kesempatan Kerja	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI								150.000.000		
						Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian					%	1,2	60.000.000	Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A	
				3.32.03.1.01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						60.000.000		
								Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan			%	100	60.000.000	Pokja Pelatihan	
				3.32.03.1.01.0006					Pelatihan Transmigrasi				60.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah Calon Transmigran/Transmigr an yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	10	60.000.00 0	Pokja Pelatihan	
						Persentase penempata n transmigras i terhadap animo transmigras i					%	2,06	90.000.00 0	Bidang Penempata n Tenaga Kerja dan Transmigra si	
				3.32.03.1.01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						90.000.00 0		
								Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi			%	10,3 1	90.000.00 0	Pokja Transmigra si	
				3.32.03.1.01 .0001					Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu)				90.000.00 0		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Daerah Provinsi						
										Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	1	90.000.000	Pokja Transmigra si	
		Meningka tnya Produktiv itas Tenaga Kerja											3.926.684.000		
			Tingkat Produkti vitas Tenaga Kerja								Juta Rupiah	56,4	3.926.684.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigra si	
				2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA								1.268.372.000		
						Persentase perusahaan yang menerapka n peningkata n					%	68	375.000.000	Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivit as Tenaga Kerja	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						produktivitas									
				2.07.03.1.03			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						334.000.000		
								Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas			%	21,5	334.000.000	Pokja Produktivitas	
				2.07.03.1.03.0001					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				334.000.000		
										Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	275	334.000.000	Pokja Produktivitas	
				2.07.03.1.04			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi						41.000.000		
								Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di			%	2	41.000.000	Pokja Produktivitas	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								perusahaan							
				2.07.03.1.04 .0001					Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				41.000.000		
										Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokume n	1	41.000.000	Pokja Produktivit as	
						Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkata n produktivit as dan atau kewirausah aan di Balai Pengemban gan Produktivit as					%	73	893.372.000	Balai Pengemban gan Produktivit as Kelas A	
				2.07.03.1.01			Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						857.088.000		
								Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kese			%	27,78	79.192.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkata	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								pakatan dan kerjasama dengan BLK						n Produktivit as	
				2.07.03.1.01 .0002					Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				79.192.00 0		
										Jumlah Kesepakatan/Koordina si dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	79.192.00 0	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkata n Produktivit as	
								Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swa sta dan lembaga pendidikan diberikan pelatihan peningkatan			%	72,9 9	772.896.0 00	Pokja Pelatihan Produktivit as	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								produktivitas / kewirausahaan							
				2.07.03.1.01 .0001					Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				772.896.0 00		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	861	772.896.0 00	Pokja Pelatihan Produktivit as	
								Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja			%	100	5.000.000	Pokja Pelatihan Produktivit as	
				2.07.03.1.01 .0003					Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				5.000.000		
										Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	1	5.000.000	Pokja Pelatihan Produktivit as	
				2.07.03.1.03			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						36.284.00 0		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swa sta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan			%	5	36.284.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkata n Produktivit as	
				2.07.03.1.03 .0001					Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				36.284.000		
										Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusah aan	12	36.284.000	Pokja Konsultasi dan Kerjasama Peningkata n Produktivit as	
				2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								910.000.000		
						Cakupan Kepesertaa n Jaminan Sosial Ketenagake					%	51,03	131.605.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						rjaan								Sosial	
				2.07.05.1.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						131.605.000		
								Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB			%	93,75	131.605.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
				2.07.05.1.01.0001					Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				53.333.000		
										Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	70	53.333.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.05.1.01 .0002					Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				14.158.000		
										Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusah aan	70	14.158.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
				2.07.05.1.01 .0003					Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				64.114.000		
										Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	35	64.114.000	Pokja Syarat Kerja Dan Jaminan Sosial	
						Persentase LKS Bipartit yang terbentuk					%	49,8	285.084.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.05.1.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						285.084.000		
								Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk			%	50,66	198.536.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.05.1.02.0003					Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				7.716.000		
										Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	1000	7.716.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
				2.07.05.1.02.0004					Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				190.820.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
										Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	36	190.820.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
								Persentase perusahaan yang telah dibina pembuatan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi			%	86,85	86.548.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
				2.07.05.1.02.0005					Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				86.548.000		
										Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	39	86.548.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
						Persentase penyelesaian					%	96,75	216.272.000	Bidang Hubungan Industrial	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						perselisihan hubungan industrial								dan Jaminan Sosial	
				2.07.05.1.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						216.272.000		
								Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI)			%	96,77	47.272.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.05.1.02.0002					Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				47.272.000		
										Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	125	47.272.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
								Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan			%	96,74	169.000.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
														n ketenagakerjaan	
				2.07.05.1.02.0001					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				169.000.000		
										Jumlah Perselisihan yang Dicegah	%	196	169.000.000	Pokja Kelembagaan Hubungan Industrial, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	
						Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanak					%	43,26	277.039.000	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						an struktur dan skala upah									
				2.07.05.1.03			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kot a (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kot a (UMSK)						277.039.000		
								Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota			%	1,41	277.039.000	Pokja Pengupaha n dan Kesejahtera n Tenaga Kerja	
				2.07.05.1.03.0001					Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				225.476.000		
										Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	225.476.000	Pokja Pengupaha n dan Kesejahtera n Tenaga Kerja	
				2.07.05.1.03.0003					Penetapan Upah Minimum				23.197.00		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
									Kabupaten/Kota (UMK)				0		
										Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan	1	23.197.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
				2.07.05.1.03.0005					Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				28.366.000		
										Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	100	28.366.000	Pokja Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
				2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN								1.748.312.000		
						Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan					%	80,8	1.300.000.000	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				2.07.06.1.01			Penyelenggara an Pengawasan Ketenagakerjaa n						1.300.000.000		
								Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan			%	55,21	231.305.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagake rjaan	
				2.07.06.1.01.0002					Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				231.305.000		
										Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus	180	231.305.000	Pokja Penegakan Hukum Ketenagake rjaan	
								Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja			%	37,87	306.975.000	Pokja Norma Keselamata n dan Kesehatan Kerja	
				2.07.06.1.01.0003					Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				306.975.000		
										Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusah aan	92	306.975.000	Pokja Norma Keselamata n dan Kesehatan Kerja	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
												2026			
												Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan			%	62,92	761.720.000	Pokja Norma Kerja	
				2.07.06.1.01.0001					Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				761.720.000		
										Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	500	761.720.000	Pokja Norma Kerja	
						Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3					%	27,06	448.312.000		
				2.07.06.1.01			Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						448.312.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah	Loka si
												2026			
												Targ et	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
								Persentase kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K3 (semula Jumlah laporan penyelenggara n pengawasan ketenagakerjaan)			%	62,86	448.312.000		
				2.07.06.1.01.0003					Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				448.312.000		
										Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusah aan	60	448.312.000		
JUMLAH													89.667.936.000		

4.2. Manajemen Risiko Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, termasuk rencana tindak pengendalian dan rencana penyelesaian risiko. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level sasaran, program dan kegiatan perangkat daerah yang dilakukan proses manajemen risiko adalah sasaran, program dan kegiatan yang dinilai memberikan kontribusi cukup besar pada ketercapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Sasaran/Program/Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatny a penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapa n Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, dan Pengembangan Aplikasi Ayo Kerjo	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er
Meningkatny a penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempua n	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaa n yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang	Melakukan Evaluasi dan Monitoring terkait penyusunan RTK Makro/RTK Mikro pada Dinas di Kab/Kota/ Prov dan perusahaan di Jateng	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				- Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatny a penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempua n	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaa n yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang	Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegawai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing- masing			
Meningkatny a penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempua n	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaa n yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah.	Melakukan Bimtek penyusunan RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan bagi Pegawai Kab/Kota/Provinsi dan perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing			

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatny a penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempua n	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaa n yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang	Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing- masing			
Meningkatny a Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivi tas Tenaga Kerja	- Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan	Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha/pengelola perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		produktivitas tenaga kerja			tingkat produktivitas tenaga kerja menurun			
Meningkatny a Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivi tas Tenaga Kerja	- Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatny a Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivi tas Tenaga Kerja	- Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Memaksimalkan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan, Berkolaborasi dengan stake holder pengusaha, pekerja serikat pekerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er
Meningkatny a Kompetensi Tenaga Kerja	Persentas e Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (<i>Sending Officers</i>)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi - Pemalsuan	Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri			
Meningkatny a Kompetensi Tenaga Kerja	Persentas e Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sending Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi	Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/ permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri			
Meningkatny a kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajeme n Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. - Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikuti Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatny a kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajeme n Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. - Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	- Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku - Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov.Jateng, Biro APBJ Setda Prov.Jateng, Biro Hukum Setda Prov.Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatny a kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajeme n Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/i ntimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjuala n aset	12	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov.Jateng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatny a kualitas pelayanan perangkat daerah di	Indeks Kepuasan Masyarak at Perangkat	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan	12	- Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola	Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditandatangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr	12 Bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan Data dan informasi seadanya/kurang optimal		terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi, menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat. - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi operasional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketrasmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans	dengan baik, sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya, kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik-Kemnaker)	anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.	asi Provinsi Jawa Tengah	
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	- SDM pegawai petugas di subbag	12	- Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan	Penyampaian laporan tidak tepat waktu.	Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS, Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait	Kepala Dinas Tenaga	12 Bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	at Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan Data dan informasi seadanya/kurang optimal		program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi, menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat. - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi operasional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans	- Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik, sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya, kurang menggambarkan kondisi yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik-Kemnaker)	data dan informasi ketenagakerjaan	Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Proporsi Penciptaa n Lapangan Kerja Formal	Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan/atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, <i>miss match</i> dan sebab lainnya)	12	Kurang optimalnya penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Mekanisme Penempatan tenaga kerja	1.Kualifikasi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja 2.Informasi Pasar Kerja tidak tersampaikan kepada Pencari Kerja 3.Pencari Kerja yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme penempatan tenaga kerja	Optimalisasi Program Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi unsur Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan dan Perantaraan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan
PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Persentas e penyerapa n tenaga kerja baru di sektor informal	Pencari Kerja/Masyara kat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	12	Berhentinya kegiatan usaha di sektor informal eks peserta/kelompok masyarakat pasca Pemberdayaan Kewirausahaan maupun Padat Karya Produktif	Pengangguran meningkat	1.Memperketat seleksi calon peserta baik secara administratif maupun teknis 2.Pendampingan memulai usaha terhadap peserta pemberdayaan sejak awal kegiatan sampai pasca kegiatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Pesentase pekerja lulusan pendidika n menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi belum terserap secara optimal pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan tingkat keahlian menengah- tinggi (<i>missmatch</i> tenaga kerja).	12	1.Ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja 2.Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang membutuhkan keahlian menengah- tinggi 3.Kurangnya informasi pasar kerja yang akurat dan mudah diakses oleh lulusan 4.Lemahnya keterkaitan (<i>link and match</i>) antara dunia pendidikan dan dunia kerja	1.Tingginya tingkat <i>missmatch</i> antara pendidikan dan pekerjaan 2.Rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja 3.Menurunnya daya saing tenaga kerja daerah	Penguatan link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha melalui pemetaan kebutuhan keahlian, fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pasar kerja.	Ketua Kelompok kerja Penempat an Tenaga Kerja	12 Bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepeserta an Jaminan Sosial Ketenagak erjaan	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	- Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er 2026

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentas e LKS Bipartit yang terbentuk	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	- Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan - Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, tidak membentuk LKS Bipartit, tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan tidak mendaftarkan pekerja/ buruh pada BPJS Ketenagakerjaan - Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desemb er 2026

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa			
PROGRAM PENGAWASA N KETENAGAK ERJAAN	Persentas e kejadian pelanggar an norma ketenagak erjaan	1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3.Adanya	12	1.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3.Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja; 4.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan.	1.Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja; 3.Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 4.Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	1.Monitoring hasil penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 di perusahaan 2.Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan	1.Kepala Bidang Pengawas an Ketenagak erjaan 2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4.Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5.Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja						

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PERENCANA AN TENAGA KERJA	Persentas e Kegiatan yang dilaksana kan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1.SDM di Dinas yang membidangi ketenagakerjaa n di Kab/Kota/Provi nsi masih belum memahami secara teknis dalam menyusun perencanaan tenaga kerja daerah. 2.Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di Kab/Kota/Provi nsi dalam menyusun kebijakan dan indikator ketenagakerjaa n masih ada yang belum mencantumkan nama program/kegiat an yang sesuai	12	1.Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/kota/Prov belum menyusun RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah). 2.SDM yang kompeten (teknis) dalam perencanaan tenaga kerja di kab/kota/prov banyak yang mutasi, promosi dan pensiun 3.Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan OPD Lintas sektor terkait diluar Disnaker belum memanfaatkan dan menerapkan dokumen RTKD sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Renja PD. 4.Dinas Kab/kota/Prov yang membidangi ketenagakerjaan yang telah menyusun Dokumen RTKD/Perencanaan Tenaga Kerja Makro belum sepenuhnya	1.Dinas Kab/kota/prov kurang tepat dalam menetapkan indikator ketenagakerjaan dalam menyusun RPJMD/RPD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD. Sehingga akan menyebabkan kurang tepat sasaran intervensi pembangunan ketenagakerjaan di daerah/provinsi/kab upaten/kota yang dirumuskan dan dicantumkan pada penetapan tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan sub kegiatan yang seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, Renstra, OPD, dsb). 2.Kurang tepatnya	- Melakukan pembinaan dan pendampingan/fasilitasi pada aparatur/ASN/pegawai kab/kota/provinsi dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di masing-masing daerah. - Melakukan review terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah setiap tahun - Menyampaikan laporan nilai keakurasian indikator hasil proyeksi indikator RTKD tersebut dan realisasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Sasaran manfaat/peserta pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/pe nempatan/perlindungan dan sebagainya diarahkan sesuai dengan yang dibutuhkan/kebutuhan tenaga kerja yang tercakup dalam dokumen RTKD dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau dapat dilihat dari RTK Mikro di Perusahaan (Yang akan dilaporkan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan/WLKP).	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	1 Januari 2026 - 31 Desemb er 2026

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dengan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan pemuthakirannya Kepmendagri 900.1.2850/2025		memanfaatkannya sebagai dasar dalam perencanaan serta penganggaran pada dokumen perencanaan (RPJMD/RPD/Renstra/Renja/RKPD). 5.SDM aparatur di dinas Kab/kota/Prov yang membidangi ketenagakerjaan belum sepenuhnya mempunyai pemahaman yang sama dalam menyusun RTKD dan manfaatnya sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk redesign program, redesign budget, redesign supply dan demand dalam penyerapan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.	sasaran intervensi pembangunan ketenagakerjaan juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, kesenjangan upah/Indeks kesenjangan Gender, tingkat kemiskinan, gini ratio.			

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentas e dokumen perencana an, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundan gan	1.Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD kurang optimal dan tidak dapat disampaikan tepat waktu 2.SDM dibagian penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kesulitan untuk mendapat penjelasan perkembangan pelaksanaan program/kegiat an/sub kegiatan. 3.Kurang update reasoning/alas an atau solusi/upaya yang telah dilakukan tidak	12	1.Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran serta evaluasi kinerja PD kurang optimal dan tidak tepat waktu penyampiannya. 2.SDM petugas di bagian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta pelaporannya kesulitan untuk mendapatkan penjelasan dari unit kerja terkait perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pengarahan pimpinan terhadap permasalahan yang terjadi dan untuk memitigasi kemungkinan resiko yang kiranya terjadi.	1.Progres report dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang berjalan tidak bisa secara rutin dan bulanan untuk diketahui dan laporan yang diminta stakeholder terkait (Bappeda, Biro Bangda, Biro Kesra) tidak bisa segera dipenuhi. 2.Data Dukung dari laporan perkembangan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD baik Program/Kegiatan/S ub Kegiatan dari Internal Dinas dan UPTD tidak dapat segera digunakan untuk menetapkan bahan pertimbangan kebijakan yang harus segera	1.Melakukan Rapat terkait Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi PD baik Renja dan Renstra maupun RKPD. 2.Memberikan pembinaan pada Internal PD terkait indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. 3.Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Pengendalian Operasional dilakukan secara rutin baik per bulananan (baik secara Online atau Offline).	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	1 Januari 2026 - 31 Desemb er 2026

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bisa diikuti secara rutin perkembangan /progres report pelaksanaan dari tiap ketercapaian tidaknya indikator kinerja dan anggaran dari unit kerja 4.Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan data dan infomasi seadanya/kurang optimal			dipenuhi/prioritas.			
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitas perantara an kerja	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan/atau kembali ke pasar kerja	Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Lintas Kab/Kota Program Penempatan Tenaga Kerja	Ketua Kelompok Kerja Penempatan Tenaga Kerja	12 Bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Persentas e penyanda ng disabilitas yang ditempatk an	Penyandang disabilitas pencari kerja belum berhasil ditempatkan di pasar kerja.	12	1.Keterbatasan kesesuaian kualifikasi penyandang disabilitas dengan kebutuhan pasar kerja 2.Masih terbatasnya perusahaan yang membuka lowongan ramah disabilitas 3.Minimnya akses informasi dan pendampingan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas	1.Rendahnya tingkat penempatan kerja penyandang disabilitas 2.Meningkatnya pengangguran pada kelompok rentan 3.Tidak tercapainya target indikator kinerja penempatan tenaga kerja inklusif	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan penempatan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan pendampingan, perluasan jejaring perusahaan ramah disabilitas, dan penguatan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja.	Ketua Kelompok Kerja Penempat an Tenaga Kerja	12 Bulan
PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Persentas e ijin LPTKS yang diterbitka n	Permohonan perizinan LPTKS melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) tidak dapat diproses atau diterbitkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.	12	1.Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen permohonan izin LPTKS 2.Rendahnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan dan prosedur perizinan LPTKS 3.Keterbatasan koordinasi dan verifikasi teknis dalam proses penerbitan izin 4.Perubahan regulasi dan kebijakan perizinan	1.Terhambatnya legalitas operasional LPTKS 2.Tidak tercapainya target indikator kinerja penerbitan izin LPTKS 3.Potensi meningkatnya praktik penempatan tenaga kerja tidak sesuai ketentuan	Optimalisasi pelayanan perizinan LPTKS berbasis OSS-RBA melalui peningkatan kualitas pendampingan pemohon, penguatan verifikasi teknis, dan penyesuaian terhadap regulasi perizinan terbaru.	Ketua Kelompok Kerja Penempat an Tenaga Kerja	12 Bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Presentas e pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupate n/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempat an tenaga kerja	Pelaporan Informasi Pasar Kerja dari Kabupaten/Kot a tidak lengkap, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai standar data yang ditetapkan.	12	1.Perbedaan kapasitas dan pemahaman petugas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pelaporan data pasar kerja 2.Keterbatasan kualitas dan konsistensi input data pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja 3.Kendala integrasi dan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja (SIAPkerja/SIPK/ay o kerjo jateng) 4.Kurangnya koordinasi dan monitoring pelaporan data dari Kabupaten/Kota	1.Data Informasi Pasar Kerja tidak akurat dan tidak mutakhir 2.Terganggunya perencanaan, kebijakan, dan layanan penempatan tenaga kerja 3.Berkurangnya kualitas pengambilan keputusan berbasis data	Optimalisasi pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota melalui penguatan kapasitas petugas, standarisasi data, dan peningkatan integrasi sistem informasi pasar kerja.	Ketua Kelompok Kerja Penempat an Tenaga Kerja	12 Bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Persentas e calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekal an pra pemberan gkatan	PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	12	1.Peraturan dan kebijakan penempatan PMI yang banyak, multisektoral dan sering berubah 2.Keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja lembaga penempatan PMI 3.Masih adanya egosektoral antar stakeholder penempatan PMI 4.Belum optimalnya penyebarluasan informasi mekanisme bekerja ke luar negeri sampai ke perangkat desa (camat, kades/lurah, RW/RT) 5.Masih rendahnya awareness masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedural 6.PMI belum siap bekerja ke luar negeri yang rentan permasalahan	Multifaktor permasalahan penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Peningkatan Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, perangkat desa, asosiasi lembaga penempatan, asosiasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam rangka pembinaan, monitoring, penyelesaian permasalahan dan pencegahan penempatan PMI unprosedural	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATA N TENAGA KERJA	Persentas e pengesaha n RPTKA Perpanjan gan yang tidak mengandu ng perubaha n Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusaha an pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	12	1.Perizinan TKA secara online terpusat di Kementerian sehingga pengendalian terhadap dokumen perizinan lemah 2.Akses komunikasi terkait dokumen perizinan antara User TKA kepada Admin Pusat dan pembuat kebijakan terbatas 3.Belum optimalnya penyebarluasan informasi kebijakan perizinan dan pengendalian TKA di daerah 4.Keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan	Dokumen perizinan kerja TKA yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Peningkatan Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengendalian dan monitoring penggunaan TKA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr asi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentas e Peningkat an Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh tidak terverifikasi	12	Tidak akuratnya data	Verifikasi tidak menghasilkan data yang valid, sehingga keterwakilan juga tidak sesuai mencerminkan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh	Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dan serikat pekerja/serikat buruh	Kepala Bidang HI dan Jamsos	Triwula n IV 2026

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASA N KETENAGAK ERJAAN	Persentas e perusahaa n yang menerapk an Norma Keselamat an dan Kesehatan kerja	Adanya berbagai faktor bahaya antara lain lalu lintas jalan raya, faktor fisika, faktor kimia, faktor lingkungan kerja, dan faktor kesehatan kerja di tempat kerja/perusaha an	12	Adanya sumber- sumber produksi di tempat kerja yang tidak menerapkan K3 dan belum diterapkannya budaya K3 oleh masyarakat	Sumber produksi yang tidak menerapkan K3 akan menyebabkan adanya potensi bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya paparan bahan kimia dan timbulnya Penyakit Akibat Kerja	1.Mengikuti safety induction pada saat memasuki tempat kerja. 2.mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh tempat kerja/perusahaan. 3.Menggunakan Alat Pelindung Diri yang diwajibkan oleh perusahaan sesuai potensi bahaya yang ada. 4.Mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat pulang pergi tempat kerja. 5.Selalu menerapkan K3 selama di kantor, perjalanan dan di tempat kerja/perusahaan.	Kepala Bidang Pengawas an Ketenagak erjaan	tahun 2026
PROGRAM PENGAWASA N KETENAGAK ERJAAN	Persentas e perusahaa n yang menerapk an Norma Keselamat an dan Kesehatan kerja	Pemalsuan dokumen K3 oleh perusahaan/ok num	10	Ingin lolos tender/proyek tanpa biaya audit K3, cari legalitas cepat, budaya kepatuhan rendah	Sanksi pidana & administratif bagi pelaku, Kondisi membahayakan bagi pekerja karena prosedur riksa uji objek K3 tidak dijalankan dengan benar	Maintenance aplikasi SIK3-SIRIKSAUJI	Kepala Bidang Pegawasa n Ketenagak erjaan	Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Ska la Risi ko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggu ng Jawab	Target Waktu Penyele saian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASA N KETENAGAK ERJAAN	Persentas e perusahaa n yang menerapk an Norma Keselamat an dan Kesehatan kerja	Potensi gratifikasi dalam pengurusan lisensi & buku kerja Petugas P3K	10	- Proses masih manual/tatap muka - Banyak interaksi langsung dengan petugas - Kurangnya transparansi biaya & prosedur - Budaya “uang terima kasih” - Sistem pengawasan dan pengaduan lemah	- Sanksi hukum (UU Tipikor) - Reputasi perusahaan tercoreng - Biaya pengurusan jadi mahal & tidak efisien - Ketergantungan pada jalur tidak resmi	Pengembangan aplikasi SIK3-SIP3K untuk digitalisasi penerbitan lisensi dan buku kerja Petugas P3K	Kepala Bidang Pengawas an Ketenagak erjaan	tahun 2026
PROGRAM PENGAWASA N KETENAGAK ERJAAN	Persentas e perusahaa n yang menerapk an Norma Ketenagak erjaan	1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaa n; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaa n	12	1.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan 2.Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan	1.Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan 2.Tidak terpenuhinya hak- hak normatif dari pekerja	Pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan	Kepala Bidang Pengawas an Ketenagak erjaan	12 bulan

4.3. Dukungan Terhadap 136 Program Daerah

Tabel 4.3
Dukungan Terhadap 136 Program Daerah
Tahun 2026

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Penyusunan/pembaruan Kurikulum Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja	4 dokumen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; Sub kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1) Balai Latihan Kerja Industri 2) Balai Latihan Kerja Pertanian 3) Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata 4) Balai Pengembangan Produktivitas	Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat; Pasar Kerja dan atau Perusahaan/DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan); dan Akademisi
		Bursa Kerja atau Job Fair	100 orang	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan Pengelolaan Informasi pasar kerja; Sub Kegiatan Job Fair/Bursa kerja	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat; Lintas Sektor bersama Perangkat Daerah; Pasar Kerja atau DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan); dan Akademisi
		Pelatihan yang Sesuai Pasar Kerja	2.129 orang	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; Sub kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	1) Balai Latihan Kerja Industri 2) Balai Latihan Kerja Pertanian 3) Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata 4) Balai Pengembangan Produktivitas	Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat; Pasar Kerja dan atau Perusahaan/DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan); dan Akademisi

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
2	Day care untuk buruh di Kawasan Industri	Penyusunan Pergub tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Bagi Pekerja	1 dokumen	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Kegiatan Penetapan Upah Minimum Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; Perusahaan/Kawasan Industri; Dinas di Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat
		Koordinasi dengan pengusaha dan pengelola kawasan industri/perusahaan	4 perusahaan	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Kegiatan Penetapan Upah Minimum Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Pengelola/Perusahaan di Kawasan Industri

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
3	Perlindungan Hak Buruh melalui Fasilitasi Peraturan Gubernur tentang Payung Hukum Ketenagakerjaan	Telah dinaungi dalam Perda Jateng No 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Fokus pada pengawasan dan penyelesaian kasus) -Jaminan cuti hamil, melahirkan bagi pekerja perempuan dan laki-laki -Perlindungan atas hubungan Industrial -Jaminan keterlibatan kaum buruh dalam penetapan upah	500 perusahaan	Program Pengawasan Ketenagakerjaan; Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan; Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas di Kab/Kota dan Pusat; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah; Perusahaan; Dinas Kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan
			180 kasus	Program Pengawasan Ketenagakerjaan; Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan; Sub Kegiatan Penegakan hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas di Kab/Kota dan Pusat; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah; Perusahaan; Dinas Kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
			125 kasus	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi; Sub Kegiatan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi	Bidang Hubungan Industrial	Dinas di Kab/Kota dan Pusat; DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah; Perusahaan; BPJS Ketenagakerjaan; Pengadilan Hubungan Industrial
4	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Aplikasi Ayo Kerjo untuk Pencari Kerja	50 orang	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Antar Lokal)	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; Dinas Komunikasi dan Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah
			200 orang	Program Penempatan Tenaga Kerja; Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab/Kota; Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas di Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat; Dunia Usaha dan Dunia Pendidikan (DUDI)

No	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Perangkat Daerah Kolaborasi
1	2	3	4	5	6	7
	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Aplikasi Ayo Kerjo untuk Pencari Kerja (Pemeliharaan Aplikasi Ayo Kerjo)	1 aplikasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi; Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah; Sub Kegiatan Pemeliharaan Asset Tak Berwujud	Sekretariat	Dinas Komunikasi dan Digitalisasi Provinsi Jawa Tengah

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 telah selesai disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan tahun pertama dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang diimplementasikan ke dalam RENSTRA Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang telah mendasarkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih efektif, efisien dan terpadu. Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pelayanan prima bagi semua masyarakat, penyusunan Rencana Kerja ini juga menganut asas pelaksanaan *Good Governance* pada Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, dengan diterapkannya prinsip efektif, efisien, transparan, *akuntable*, dan *Rule Of Law*.

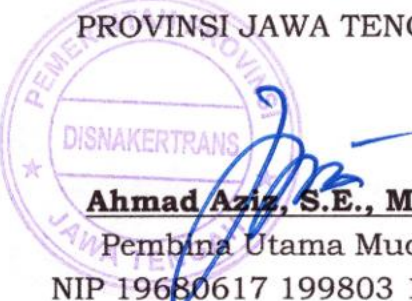
Kami berharap Renja ini dapat mengantarkan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Jawa Tengah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Rencana Kerja ini merupakan dasar monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang berarti bahwa setiap kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu diharapkan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh aparatur dapat melaksanakan tugas secara konsisten, kerjasama dan koordinasi, bertanggungjawab yang tinggi serta berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Semarang, Desember 2025

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH


Ahmad Aziz, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19680617 199803 1 007

LAMPIRAN

a. Identifikasi Risiko

Tabel 1
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	Risiko Strategis	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Balai Latihan Kerja Pertanian
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	- Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi - Daerah Tujuan transmigrasi menolak sebagai lokasi penempatan transmigran, walaupun sudah terbit surat penetapan oleh Pusat/ Kementerian Transmigrasi	Risiko Strategis	Kebijakan daerah tujuan transmigrasi terkait penolakan transmigran	Penempatan Transmigrasi tidak memenuhi target	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	Risiko Strategis	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Pemerintah Daerah dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Sasaran Strategis	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	- Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	Risiko Strategis	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	-Pemerintah Daerah dan Masyarakat - Pengusaha dan Pekerja .
5	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sending Officers)	Risiko Strategis	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
6	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	Risiko Strategis	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. - Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Masyarakat
7	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	Risiko Strategis	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	ASN

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunanan dengan Data dan infromasi seadanya/kurang optimal	Risiko Strategis	- Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi, menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat. - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi operasional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik, sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya, kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik-Kemnaker)	Masyarakat
9	Sasaran Program	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	- Laporan dari OPD tidak dapat disampaikan tepat waktu dan kurang update. - Kurang update reasoning/alasan atau solusi/upaya yang telah dilakukan tidak bisa diikuti secara rutin perkembangan/progress report pelaksanaan dari tiap ketercapaian atau tidaknya indikator kinerja dan anggaran dari unit kerja - Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan data dan infromasi seadanya/kurang optimal	Risiko Strategis	- Kualitas laporan dan evaluasi OPD kurang optimal dan tidak tepat waktu penyampaianya. - SDM petugas di bagian evaluasi dan pelaporan kesulitan untuk mendapatkan penjelasan dari perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pengarahan pimpinan terhadap permasalahan yang terjadi dan untuk memitigasi kemungkinan resiko yang kiranya terjadi.	- Progres report pelaksanaan kegiatan yang berjalan tidak bisa secara rutin bulanan diketahui dan laporan yang diminta oleh stakeholder terkait (Biro Bangda, Biro Kesra, Bappeda Prov.Jateng) tidak bisa segera dipenuhi. - Data dukung dari laporan perkembangan evaluasi program/kegiatan/sub/kegiatan dari Internal Dinas dan UPTD tidak dapat segera digunakan untuk menetapkan bahan pertimbangan kebijakan yang harus segera dipenuhi/prioritas	Organisasi Perangkat Daerah (Disnakertrans Prov.Jateng)
10	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Pencari kerja dan tenaga kerja tidak memiliki kompetensi dan tidak terserapnya menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan	Risiko Strategis	Pencari kerja dan tenaga kerja kurang menguasai bidang keahlian yang dimiliki, kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan	Pekerjaan tidak sesuai dengan kompetensi sehingga belum semuanya bisa terserap di dunia usaha dan dunia industri	Pencari Kerja dan Tenaga Kerja
11	Sasaran Strategis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	Beberapa LPK belum bersertifikat Akreditasi	Risiko Strategis	LPK tidak memahami manfaat dan proses penilaian Akreditasi LPK	Kehilangan kepercayaan di mata masyarakat dan industri karena mutunya tidak terjamin, sehingga sulit menjalin kerja sama, kurang diminati peserta serta mengurangi peluang lulusan untuk diterima kerja.	Lembaga Pelatihan Kerja
12	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Kualitas produk belum memenuhi standar yang ditentukan	Risiko Operasional	Belum semua perusahaan di Jawa Tengah menerapkan peningkatan produktivitas	Produktivitas tenaga kerja rendah dan kurang efektif, efisiensi serta kualitas produksinya belum memenuhi standar yang ditentukan	Masyarakat di dunia usaha dan dunia industri

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Sasaran Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan/atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, mismatch dan sebab lainnya)	Risiko Strategis	Kurang optimalnya penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Mekanisme Penempatan tenaga kerja	1.Kualifikasi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja 2.Informasi Pasar Kerja tidak tersampaikan kepada Pencari Kerja 3.Pencari Kerja yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme penempatan tenaga kerja	Pencari Kerja, Calon Pencari Kerja, Tenaga Kerja, Masyarakat, Pemangku Kepentingan (Pemerintah dan Swasta)
14	Sasaran Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	Pencari Kerja/Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	Risiko Strategis	Berhentinya kegiatan usaha di sektor informal eks peserta/keompok masyarakat pasca Pemberdayaan Kewirausahaan maupun Padat Karya Produktif	Pengangguran meningkat	Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
15	Sasaran Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Penyandang disabilitas belum dapat terserap secara optimal di sektor kerja formal dan/atau kembali menganggur akibat keterbatasan akses, kompetensi, dan penerimaan pasar kerja.	Risiko Strategis	1.Kualifikasi dan kompetensi penyandang disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sektor formal 2.Terbatasnya perusahaan yang membuka kesempatan kerja formal yang inklusif bagi penyandang disabilitas 3.Masih adanya stigma dan rendahnya pemahaman dunia usaha terhadap tenaga kerja disabilitas 4.Akses informasi dan mekanisme penempatan kerja formal bagi penyandang disabilitas belum optimal	1.Rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas di sektor formal 2.Meningkatnya kerentanan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas 3.Terhambatnya pencapaian pembangunan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan inklusif	Penyandang disabilitas, pencari kerja, dunia usaha, masyarakat, pemangku kepentingan (pemerintah dan swasta)
16	Sasaran Program	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi belum terserap secara optimal pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan tingkat keahlian menengah-tinggi (mismatch tenaga kerja).	Risiko Strategis	1.Ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja 2.Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang membutuhkan keahlian menengah-tinggi 3.Kurangnya informasi pasar kerja yang akurat dan mudah diakses oleh lulusan 4.Lemahnya keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan dunia kerja	1.Tingginya tingkat mismatch antara pendidikan dan pekerjaan 2.Rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja 3.Menurunnya daya saing tenaga kerja daerah	Pekerja, pencari kerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi, dunia usaha, masyarakat
17	Sasaran Strategis	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	Calon Transmigran tidak dapat ditempatkan	Risiko Strategis	Alokasi penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi tidak seimbang dengan jumlah masyarakat Jawa Tengah yang telah mendaftar sebagai Calon Transmigran	1.Calon Transmigran yang telah mendaftar dalam program penempatan transmigrasi masuk dalam masa tunggu yang lama untuk ditempatkan 2.Dalam masa tunggu tersebut calon transmigran memiliki resiko melewati batas umur yang ditetapkan peraturan sehingga gagal ditempatkan 3.Pencapaian target penempatan tidak memenuhi sasaran	Masyarakat dan Calon Transmigran

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Sasaran Program	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	Risiko Operasional	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	- Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejala di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pengusaha dan pekerja
19	Sasaran Program	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	Risiko Operasional	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	- Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan - Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, tidak membentuk LKS Bipartit, tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan tidak mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan - Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejala di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pengusaha dan pekerja
20	Sasaran Program	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Hubungan Kerja yang tidak kondusif antara Pekerja dan Pengusaha	Risiko Hukum	Pengusaha tidak mematuhi norma Hubungan Industrial	Pekerja tidak terlindungi	Pekerja dan Pengusaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3.Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4.Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5.Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	Risiko Hukum	1.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3.Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja; 4.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan.	1.Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja; 3.Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 4.Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	Tenaga Kerja dan Pengusaha
22	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Berdasarkan Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja	Risiko Strategis	- Kurangnya fasilitas dan peralatan pelatihan yang memadai terutama di daerah pegunungan - Minimnya Kesadaran dan Partisipasi Pencari Kerja - Kurangnya Keterlibatan Dunia Industri - Kurangnya pelatihan bagi instruktur untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka.	Kurangnya minat untuk mengikuti pelatihan. Kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri.	1.Masyarakat Pencari Kerja 2.Dunia Usaha dan Industri (DUDI) 3.Petani Tembakau
23	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Risiko Strategis	Adanya kelalaian atau kelupaan tentang absensi pegawai secara aplikasi sinaga dan kelalaian kenaikan gaji berkala bagi pegawai di lingkungan BLK Cilacap, kurang lengkapnya arsip pegawai yang bersangkutan.	Di presensi aplikasi sinaga akan muncul keterangan KWK, adanya pegawai yang gaji berkala tidak sesuai dengan tahun pengangkatan karena yang bersangkutan lupa, adanya arsip pegawai yang belum dilengkapi.	ASN
24	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	Program Pelatihan tidak tepat sasaran/ yang dilatih bukan pengangguran	Risiko Fraud	1.Proses seleksi/penentuan calon peserta pelatihan kurang teliti 2.Tidak adanya SOP sebagai panduan proses seleksi	1.Peserta yang mengikuti pelatihan bukan merupakan target pelatihan 2.Rendahnya pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 3.Tidak adanya panduan dalam melaksanakan rekrut peserta pelatihan	1.pencari kerja yang membutuhkan pelatihan 2.OPD
25	Sasaran Program	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	Peserta pelatihan calon transmigrasi tidak hadir pada saat pelaksanaan pelatihan	Risiko Operasional	1.Calon transmigran mengundurkan diri pada saat akan melaksanakan pelatihan 2.Data calon Transmigran berubah - ubah	Target peserta pelatihan calon transmigran tidak tercapai	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian	Pelayanan kepegawaian yang ada di Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan maksimal	Risiko Operasional	1.Pegawai yang memiliki tupoksi kegiatan pelayanan umum berkurang karena purna tugas 2.Kemampuan pegawai yang menjalankan pelayanan umum tidak update	1.ada pekerjaan yang terhambat dan tidak mencapai target 2.Over load beban pekerjaan pada pekerja tertentu 3.Membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pelayanan	Organisasi perangkat Daerah (OPD)
27	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	Hasil pelatihan peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan belum terlacak secara teratur	Risiko Operasional	Terbatasnya sumber daya untuk pelacakan dan atau pendampingan lulusan pelatihan	Peningkatan produktivitas tenaga kerja belum dapat dilihat kenaikannya	Pemerintah, tenaga kerja, pelaku usaha
28	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	Jenis pelatihan peningkatan produktivitas ditujukan kepada tenaga kerja, bukan kepada calon tenaga kerja sehingga tidak match dengan tuntutan penempatan calon tenaga kerja	Risiko Strategis	Jumlah penyerapan tenaga kerja belum bisa terhitung dari yang belum bekerja menjadi sudah bekerja	Rendahnya jumlah penempatan calon tenaga kerja	Pemerintah
29	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	Penerapan hasil bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas belum dilaksanakan secara berkesinambungan	Risiko Operasional	Pelaku usaha tidak konsisten dalam menerapkan alat, teknik, metode peningkatan produktivitas karena tidak ada pengawasan dari pemerintah dalam kontinyuitas peningkatan produktivitas	Peningkatan produktivitas tidak kontinyu	Pemerintah, pelaku usaha
30	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	Tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum perkantoran, kepegawaian dan keuangan	Risiko Operasional	Kenaikan harga barang/jasa pada tahun berjalan	Ada sebagian rencana yang belum atau tidak dapat dilaksanakan karena terjadi penyesuaian terhadap rencana belanja barang/jasa sesuai prioritas kebutuhan	Pelaksana
31	Sasaran Program	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau timbulnya penyakit akibat kerja di perusahaan	Risiko Operasional	Kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan K3 masih kurang	Menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan perusahaan	Tenaga Kerja dan Perusahaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Terganggunya kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah tidak bisa berjalan secara lancar	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan masyarakat pengguna
33	Sasaran Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Tidak sesuai nya realisasi anggaran yang diberikan dengan rencana yang diajukan	Risiko Operasional	Efisiensi dan refokusing anggaran untuk program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah menjadi tidak optimal	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dinas Nakertrans, perusahaan dan masyarakat
34	Sasaran Program	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	- Kurangnya sinkronisasi antara kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri - Sarpras yang kurang memadai - Adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang cepat - Perkembangan DUDI yang pesat yang kurang sesuai dengan kurikulum pelatihan saat ini	Risiko Operasional	- Kurangnya komunikasi dengan DUDI dan Keterbatasan akses ke industri modern - Prioritas yang kurang tepat - Birokrasi organisasi yang kurang efektif - Regulasi yang tidak stabil: Kurangnya sosialisasi, Keterlambatan informasi - Keterbatasan Sarpras	Kurang kesesuaian Kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri	Masyarakat
35	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	Terganggunya kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah/tidak berjalan dengan lancar	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya kebutuhan kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Akan mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1.SDM di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota/Provinsi masih belum memahami secara teknis dalam menyusun perencanaan tenaga kerja daerah. 2.Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di Kab/Kota/Provinsi dalam menyusun kebijakan dan indikator ketenagakerjaan masih ada yang belum mencantumkan nama program/kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan pemuthahirannya Kepmendagri 900.1.2850/2025	Risiko Operasional	1.Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/kota/Prov belum menyusun RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah). 2.SDM yang kompeten (teknis) dalam perencanaan tenaga kerja di kab/kota/prov banyak yang mutasi, promosi dan pensiun 3.Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan OPD Lintas sektor terkait diluar Disnaker belum memanfaatkan dan menerapkan dokumen RTKD sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Renja PD. 4.Dinas Kab/kota/Prov yang membidangi ketenagakerjaan yang telah menyusun Dokumen RTKD/Perencanaan Tenaga Kerja Makro belum sepenuhnya memanfaatkannya sebagai dasar dalam perencanaan serta penganggaran pada dokumen perencanaan (RPJMD/RPD/Renstra/Renja/RKPD). 5.SDM aparatur di dinas Kab/kota/Prov yang membidangi ketenagakerjaan belum sepenuhnya mempunyai pemahaman yang sama dalam menyusun RTKD dan manfaatnya sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk redesign program, redesign budget, redesign supply dan demand dalam penyerapan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.	1.Dinas Kab/kota/prov kurang tepat dalam menetapkan indikator ketenagakerjaan dalam menyusun RPJMD/RPD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD. Sehingga akan menyebabkan kurang tepat sasaran intervensi pembangunan ketenagakerjaan di daerah/provinsi/kabupaten/kota yang dirumuskan dan dicantumkan pada penetapan tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan sub kegiatan yang seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, Renstra, OPD, dsb). 2.Kurang tepatnya sasaran intervensi pembangunan ketenagakerjaan juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, kesenjangan upah/Indeks kesenjangan Gender, tingkat kemiskinan, gini ratio.	1.Masyarakat Umum 2.Pencari kerja 3.Pengusaha dan perusahaan serta tenaga kerja di perusahaan 4.Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	1.Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD kurang optimal dan tidak dapat disampaikan tepat waktu 2.SDM dibagian penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kesulitan untuk mendapat penjelasan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. 3.Kurang update reasoning/alasan atau solusi/upaya yang telah dilakukan tidak bisa diikuti secara rutin perkembangan/progres report pelaksanaan dari tiap ketercapaian tidaknya indikator kinerja dan anggaran dari unit kerja 4.Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan data dan informasi seadanya/kurang optimal	Risiko Strategis	1.Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran serta evaluasi kinerja PD kurang optimal dan tidak tepat waktu penyampaian. 2.SDM petugas di bagian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta pelaporannya kesulitan untuk mendapatkan penjelasan dari unit kerja terkait perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pengarahan pimpinan terhadap permasalahan yang terjadi dan untuk memitigasi kemungkinan resiko yang kiranya terjadi.	1.Progres report dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang berjalan tidak bisa secara rutin dan bulanan untuk diketahui dan laporan yang diminta stakeholder terkait (Bappeda, Biro Bangda, Biro Kesra) tidak bisa segera dipenuhi. 2.Data Dukung dari laporan perkembangan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD baik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Internal Dinas dan UPTD tidak dapat segera digunakan untuk menetapkan bahan pertimbangan kebijakan yang harus segera dipenuhi/prioritas.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
38	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Tidak terpenuhinya perlindungan asuransi kendaraan dinas secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan dinas, serta Tidak tersedianya perlindungan asuransi atas bangunan/gedung kantor yang berpotensi menimbulkan kerugian besar apabila terjadi kebakaran, bencana alam, atau risiko lainnya	Risiko Operasional	Keterlambatan proses pengadaan asuransi kendaraan dinas dan bangunan gedung/kantor, Data kendaraan dinas dan bangunan gedung/kantor tidak lengkap atau tidak mutakhir, Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pertanggungan asuransi kendaraan dinas maupun gedung/kantor, Ketidaksesuaian spesifikasi jaminan asuransi dengan kebutuhan kendaraan dan kebutuhan bangunan gedung/kantor	Untuk Kendaraan Dinas berupa: Kendaraan dinas tidak memiliki perlindungan asuransi, Kerugian keuangan daerah akibat biaya perbaikan atau penggantian kendaraan, Terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, Temuan pemeriksaan karena lemahnya pengamanan aset daerah. Dan Untuk Bangunan Gedung / Kantor berupa :	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pengguna barang, Pengguna kendaraan dinas dan/atau Pegawai dan pengguna layanan bangunan gedung/kantor, Pemerintah Daerah Provinsi selaku Pemilik Aset dan Masyarakat Penerima Layanan Bangunan/Gedung Kantor Inspektorat/BPK (secara pengawasan)
39	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan akibat keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan proses administrasi	Risiko Operasional	keterbatasan SDM, Ketidaklengkapan data, serta proses administrasi belum optimal	tidak tercapainya target persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar, terjadinya keterlambatan penyelesaian layanan kepegawaian, menurunnya kualitas, dan kepuasan layanan perangkat daerah	Pegawai ASN, dan Non ASN Disnakertrans Prov.Jateng

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	tidak tercapainya persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Perencanaan belanja bahan alat listrik, atk bahan kebersihan dan operasional lainnya belum akurat, keterlambatan pengadaan dan pembayaran belanja, kenaikan harga bahan alat listrik, atk bahan kebersihan dan operasional diluar perhitungan awal	Pelayanan administrasi umum perangkat daerah tidak berjalan optimal, terhambatnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, menurunnya kualitas dan ketepatan waktu layanan administrasi, tidak tercapainya target kinerja administrasi umum sesuai standar layanan.	Sub bagian umum dan kepegawaian, pegawai layanan administrasi, pimpinan perangkat daerah dan mayarakat yang menerima layanan
41	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Tidak tercapainya jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai dengan target, spesifikasi, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.	Risiko Reputasi	Perencanaan kebutuhan barang belum sepenuhnya akurat, Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa, Penyedia tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis dan/atau jadwal pengiriman, Kendala administrasi dan perubahan regulasi pengadaan, Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan belum optimal.	Sasaran kegiatan tidak tercapai sesuai indikator kinerja, Terganggunya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, Menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja OPD, Potensi temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pelaksana kegiatan, Unit kerja pengguna barang, Aparatur sipil negara (ASN) sebagai pengguna fasilitas kerja, Masyarakat penerima layanan secara tidak langsung.
42	Sasaran Strategis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Risiko terjadinya gangguan, penurunan kinerja, atau tidak berfungsinya aset tak berwujud (aplikasi/sistem informasi/lisensi software) akibat pemeliharaan yang tidak optimal, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai spesifikasi.	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran pemeliharaan aset tak berwujud, Kurangnya tenaga teknis/SDM yang kompeten di bidang sistem informasi, Tidak adanya perjanjian pemeliharaan (maintenance agreement) dengan penyedia, Pembaruan sistem (update/patch) tidak dilakukan secara berkala, Dokumentasi aset tak berwujud yang tidak lengkap atau tidak mutakhir.	Sistem/aplikasi tidak dapat digunakan secara optimal atau mengalami downtime, Terhambatnya pelayanan dan kegiatan administrasi dinas, Risiko kehilangan data dan informasi penting, Menurunnya efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, Potensi kerugian keuangan dan temuan audit terkait pengelolaan aset.	Perangkat daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Pegawai pengguna sistem/aplikasi, Masyarakat/pemangku kepentingan penerima layanan, Unit pengelola TI dan pengelola aset daerah
43	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Risiko tidak tercapainya sasaran kegiatan pemeliharaan bangunan gedung/kantor akibat kondisi bangunan yang tidak terpelihara secara optimal, keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan, atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan standar teknis yang ditetapkan.	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran pemeliharaan bangunan gedung, Usia bangunan yang sudah tua dan tingkat kerusakan yang tinggi, Pemeliharaan tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal, Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan, Penyedia jasa pemeliharaan tidak sesuai kompetensi atau spesifikasi teknis.	Menurunnya fungsi dan kenyamanan bangunan gedung/kantor, Terhambatnya pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatnya risiko keselamatan dan kesehatan kerja pegawai, Potensi kerusakan lanjutan yang memerlukan biaya lebih besar, Risiko temuan pemeriksaan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pengguna bangunan, Pegawai dan tamu/pengunjung kantor, Unit kerja pengelola aset dan sarana prasarana, Masyarakat penerima layanan.
44	Sasaran Strategis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	Peserta yang tidak kompeten	Risiko Strategis	Peserta kurang menguasai bidang keahlian yang dimiliki, kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap	Pekerjaan tidak sesuai standar sehingga pekerjaan tidak baik	Peserta Uji Kompetensi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Sasaran Strategis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase penganggur/pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	Tidak terserapnya peserta magang menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan	Risiko Strategis	Tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, tidak memiliki kompetensi, minat pendaftar sedikit	Tingkat pengangguran tidak teratasi	Peserta
46	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	LPK yang tidak terakreditasi	Risiko Strategis	LPK tidak memenuhi dokumen KMPI (standar 1 sampai standar 8)	LPK tersebut tidak kredibel di mata masyarakat karena sistem manajemen yang tidak seusai dengan standar pemerintah	Lembaga Pelatihan Kerja
47	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	Peserta pelatihan peningkatan produktivitas dimungkinkan tidak sesuai dengan yang diinginkan	Risiko Operasional	Sumber daya pelatihan (SDP) antara lain kurikulum peserta, lokasi/tempat pelatihan serta sarana dan prasarana	- Peserta tidak memahami materi - peserta tidak mengikuti pelatihan sampai selesai - penyelenggara kurang efektif dalam merekrut peserta	Masyarakat, Pengusaha, pekerja, serta stakeholder terkait
48	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	- Untuk mendapatkan data pengukuran tingkat Makro cukup lama karena berhubungan dengan instansi lain - Untuk tingkat mikro dan Individu umumnya perusahaan sulit untuk memberikan data keuangan - karena kesibukan untuk mengisi form dan bukti dukung agak sulit	Risiko Operasional	- Data yang dibutuhkan masih harus diolah oleh instansi terkait - Perusahaan Belum memahami Pentingnya pengukuran Produktivitas	- Berdampak pada administrasi - Perusahaan tidak mengetahui pencapaian kinerja perusahaan - tidak mengetahui waktu Produktif dan tidak produktif bagi tenaga kerja sehingga tidak dapat mengambil kebijakan, Tidak dapat merencanakan peningkatan produktivitas	Pemerintah, Masyarakat dunia usaha dan industri
49	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantara kerja	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	Risiko Strategis	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan/atau kembali ke pasar kerja	Pencari Kerja, Masyarakat, Calon Tenaga Kerja
50	Sasaran Strategis	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal.	Sarana produktif tidak selesai terbangun sesuai rencana	Risiko Strategis	Sebagian warga miskin dan ekstrim miskin tidak terbiasa melakukan pekerjaan fisik/membangun sarana produktif/teknik pertukangan	Sarana Produktif belum layak untuk digunakan untuk melakukan kegiatan produktif	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Sasaran Strategis	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal.	Peserta pemberdayaan, baik pencari kerja dan masyarakat tidak dapat melanjutkan usaha sesuai pembekalan yang diberikan	Risiko Strategis	- Tidak ada fasilitasi modal untuk bantuan sarana usaha serta modal usaha - Keterbatasan akses pasar - Menjadi wirausaha membutuhkan waktu, mental, konsistensi	Antusiasme melanjutkan usaha rendah dan mudah menyerah saat hasil tidak sesuai ekspektasi	Masyarakat
52	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan	Penyandang disabilitas pencari kerja belum berhasil ditempatkan di pasar kerja.	Risiko Strategis	1.Keterbatasan kesesuaian kualifikasi penyandang disabilitas dengan kebutuhan pasar kerja 2.Masih terbatasnya perusahaan yang membuka lowongan ramah disabilitas 3.Minimnya akses informasi dan pendampingan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas	1.Rendahnya tingkat penempatan kerja penyandang disabilitas 2.Meningkatnya pengangguran pada kelompok rentan 3.Tidak tercapainya target indikator kinerja penempatan tenaga kerja inklusif	Penyandang disabilitas pencari kerja, masyarakat, dunia usaha
53	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan	Permohonan perizinan LPTKS melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) tidak dapat diproses atau diterbitkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.	Risiko Strategis	1.Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen permohonan izin LPTKS 2.Rendahnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan dan prosedur perizinan LPTKS 3.Keterbatasan koordinasi dan verifikasi teknis dalam proses penerbitan izin 4.Perubahan regulasi dan kebijakan perizinan	1.Terhambatnya legalitas operasional LPTKS 2.Tidak tercapainya target indikator kinerja penerbitan izin LPTKS 3.Potensi meningkatnya praktik penempatan tenaga kerja tidak sesuai ketentuan	LPTKS, pencari kerja, masyarakat, dunia usaha
54	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja	Pelaporan Informasi Pasar Kerja dari Kabupaten/Kota tidak lengkap, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai standar data yang ditetapkan.	Risiko Strategis	1.Perbedaan kapasitas dan pemahaman petugas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pelaporan data pasar kerja 2.Keterbatasan kualitas dan konsistensi input data pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja 3.Kendala integrasi dan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja (SIAPkerja/SIPK/ayu kerjo jateng) 4.Kurangnya koordinasi dan monitoring	1.Data Informasi Pasar Kerja tidak akurat dan tidak mutakhir 2.Terganggunya perencanaan, kebijakan, dan layanan penempatan tenaga kerja 3.Berkurangnya kualitas pengambilan keputusan berbasis data	Pencari kerja, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat
55	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau PMI Purna diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	Peserta pemberdayaan, baik PMI Purna dan Keluarga PMI tidak bisa mengembangkan usaha sesuai pembekalan yang diberikan	Risiko Strategis	- Mindset PMI Purna masih terbiasa sebagai mental pekerja - Keterbatasan akses pasar - Menjadi wirausaha membutuhkan waktu, mental, konsistensi	Antusiasme melanjutkan usaha rendah dan mudah menyerah saat hasil tidak sesuai ekspektasi	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	Sasaran Strategis	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	Risiko Hukum	1.Peraturan dan kebijakan penempatan PMI yang banyak, multisektoral dan sering berubah 2.Keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja lembaga penempatan PMI 3.Masih adanya egosektoral antar stakeholder penempatan PMI 4.Belum optimalnya penyebarluasan informasi mekanisme bekerja ke luar negeri sampai ke perangkat desa (camat, kades/lurah, RW/RT) 5.Masih rendahnya awareness masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedural 6.PMI belum siap bekerja ke luar negeri yang rentan permasalahan	Multifaktor permasalahan penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Pencari Kerja Masyarakat Perusahaan/User Pemerintah
57	Sasaran Strategis	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	Risiko Hukum	1.Perizinan TKA secara online terpusat di Kementerian sehingga pengendalian terhadap dokumen perizinan lemah 2.Akses komunikasi terkait dokumen perizinan antara User TKA kepada Admin Pusat dan pembuat kebijakan terbatas 3.Belum optimalnya penyebarluasan informasi kebijakan perizinan dan pengendalian TKA di daerah 4.Keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan	Dokumen perizinan kerja TKA yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	TKA Pemberi Kerja TKA Pemerintah
58	Sasaran Strategis	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	Calon Transmigran tidak dapat ditempatkan	Risiko Strategis	Pembatalan Alokasi dan Perubahan Lokasi Daerah penempatan transmigrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi	1.Calon Transmigran yang telah mendaftar dalam program penempatan transmigrasi mendapatkan lokasi yang berbeda dari tujuan awal mendaftar 2.Dalam masa tunggu Pemberangkatan tersebut calon transmigran memiliki resiko mengundurkan diri, apabila transmigran yang terpilih/lolos mengundurkan diri karena terdampak perubahan Lokasi Penempatan 3.Perubahan Naskah Kesepakatan Antar daerah dan Perjanjian Kerjasama 4.Kabupaten/ Kota kesulitan mencari transmigran pengganti	Masyarakat dan Calon Transmigran
59	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	Perusahaan tidak menyusun peraturan perusahaan	Risiko Operasional	Kurangnya kesadaran pengusaha tentang pentingnya peraturan perusahaan dibentuk di perusahaan.	Kurang teraturnya pelaksanaan ketenagakerjaan terkait syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha, pekerja/buruh di perusahaan.	Pengusaha/perusahaan dan pekerja/buruh.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	Tidak hadirnya peserta yang diundang sosialisasi.	Risiko Strategis	Tidak mengindahkan undangan sosialisasi.	Tidak tersosialisasi informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan	Pengusaha/perusahaan, pekerja/buruh, dan BPJS Ketenagakerjaan.
61	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Tidak aktifnya LKS Bipartit di perusahaan	Risiko Strategis	Kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan	Terhambatnya dialog sosial antara pengusaha dengan pekerja/buruh melalui LKS Bipartit	Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, LKS Bipartit, pengusaha, pekerja/buruh
62	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Tidak semua perusahaan menjalankan peran dan fungsi sarana hubungan industrial di perusahaan	Risiko Strategis	Kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi sarana hubungan industrial di perusahaan	Hubungan industrial menjadi kurang harmonis, banyak aspirasi yang tidak tersalurkan baik dari pengusaha maupun pekerja	Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, pengusaha, pekerja/buruh
63	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembuatan keputusan atau rekomendasi	Risiko Strategis	Adanya ego sektoral masing-masing, sehingga memunculkan ketidaksepakatan dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan dan rekomendasi	Pembahasan dan pengambilan keputusan yang berlarut-larut	Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, stakeholder ketenagakerjaan yang tergabung dalam keanggotaan LKS Tripartit
64	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh tidak terverifikasi	Risiko Operasional	Tidak akuratnya data	Verifikasi tidak menghasilkan data yang valid, sehingga keterwakilan juga tidak sesuai mencerminkan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh	Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serikat pekerja/serikat buruh
65	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Masih tingginya perselisihan penempatan tenaga kerja dan kasus Pekerja Migran Indonesia	Risiko Hukum	Kurangnya kesadaran dari Pemberi Kerja dan Kompetensi Pekerja Migran yang rendah	Kurangnya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia	Pekerja Migran Indonesia
66	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	Masih tingginya perselisihan Hubungan Industrial	Risiko Hukum	Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan	Kondisi Hubungan Industrial tidak Harmonis	Pekerja dan Pengusaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	Pelaksanaan norma hubungan industrial yang rendah	Risiko Hukum	Rendahnya kesadaran Pengusaha akan pentingnya Norma Hubungan Industrial	Rendahnya kesadaran Pengusaha akan pentingnya Norma Hubungan Industrial	Pekerja
68	Sasaran Kegiatan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	Peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK	Risiko Hukum	Kondisi Geopolitik yang tidak kondusif dan menyebabkan lesunya perekonomian dunia yang berpengaruh pada negara-negara tujuan ekspor hasil industri Indonesia	Penurunan tingkat kesejahteraan pekerja	Pekerja dan Pengusaha
69	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Adanya berbagai faktor bahaya antara lain lalu lintas jalan raya, faktor fisika, faktor kimia, faktor lingkungan kerja, dan faktor kesehatan kerja di tempat kerja/perusahaan	Risiko Operasional	Adanya sumber-sumber produksi di tempat kerja yang tidak menerapkan K3 dan belum diterapkannya budaya K3 oleh masyarakat	Sumber produksi yang tidak menerapkan K3 akan menyebabkan adanya potensi bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya paparan bahan kimia dan timbulnya Penyakit Akibat Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan, Pekerja, Pengusaha
70	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Pemalsuan dokumen K3 oleh perusahaan/oknum	Risiko Hukum	Ingin lolos tender/proyek tanpa biaya audit K3, cari legalitas cepat, budaya kepatuhan rendah	Sanksi pidana & administratif bagi pelaku, Kondisi membahayakan bagi pekerja karena prosedur riksa uji objek K3 tidak dijalankan dengan benar	Pengusaha dan pekerja
71	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Potensi gratifikasi dalam pengurusan lisensi & buku kerja Petugas P3K	Risiko Fraud	- Proses masih manual/tatap muka - Banyak interaksi langsung dengan petugas - Kurangnya transparansi biaya & prosedur - Budaya “uang terima kasih” - Sistem pengawasan dan pengaduan lemah	- Sanksi hukum (UU Tipikor) - Reputasi perusahaan tercoreng - Biaya pengurusan jadi mahal & tidak efisien - Ketergantungan pada jalur tidak resmi	Pengusaha, Disnakertrans
72	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Masih ada pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan di bidang K3 pada Disnakertrans Prov. Jateng	Risiko Operasional	- Kanal pengaduan tidak efektif - Harapan masyarakat tinggi tapi tidak dikelola	Turunnya kepercayaan masyarakat & reputasi organisasi	Pengusaha dan pekerja
73	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	Risiko Hukum	1.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	1.Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan 2.Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja	Tenaga Kerja dan Pengusaha

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Berdasarkan Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja	Risiko Strategis	Rendahnya motivasi peserta pelatihan.	Kurangnya minat untuk mengikuti pelatihan.	Masyarakat Pencari Kerja
75	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	~ Sarana tidak memadai. ~ Sarana tidak sesuai dengan kebutuhan industri. ~ Kurangnya perawatan dan pengelolaan	Risiko Strategis	~ Perencanaan yang kurang akurat. ~ Kesenjangan dengan kebutuhan industri. ~ Kurangnya pemeliharaan dan pengelolaan	~ Kualitas pelatihan menurun. ~ Lulusan kurang kompeten. ~ Minat peserta menurun. ~ Pemborosan anggaran. ~ Ketimpangan akses pelatihan	~ BLK Industri ~ Industri dan Perusahaan ~ Masyarakat Umum
76	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	~ Kurangnya mental dan daya juang para pencari kerja ~ Kurangnya minat dan bakat ~ Masih kurangnya perusahaan di kejuruan tertentu	Risiko Strategis	~ Kurangnya mental dan daya juang para pencari kerja ~ Kurangnya minat dan bakat ~ Masih kurangnya perusahaan di kejuruan tertentu	~ Kurangnya minat pencari kerja, ~ Tidak terisinya lowongan kerja di perusahaan. ~ Pendaftar membeludak di kejuruan tertentu. ~ Kurangnya keterbukaan perusahaan di kejuruan tertentu	~ BLK, ~ Perusahaan, ~ Peserta Pelatihan
77	Sasaran Strategis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Sistem aplikasi keuangan eror, server down, atau keterbatasan akses	Risiko Strategis	Gangguan jaringan sistem aplikasi keuangan	Layanan keuangan terhenti	BLK Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
78	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Keterlambatan pengajuan penghapusan	Risiko Strategis	Penumpukan pekerjaan, koordinasi lambat antara pengurus dan pengguna barang	Barang menumpuk & tidak bermanfaat	BLK Industri DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH
79	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Adanya surat yang masuk tidak sesuai dengan tanggal di surat sehingga kadang kadang terjadi keterlambatan informasi undangan pelaksanaan kegiatan	Risiko Strategis	Pengiriman surat yang terlambat sehingga tidak sesuai tanggal di surat dengan tanggal penerimaan surat	Pencatatan tidak sesuai dengan tanggal surat yang ada, sehingga kadang kadang terjadi keterlambatan informasi undangan pelaksanaan kegiatan	BLK Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
80	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Keterlambatan proses pengadaan	Risiko Strategis	Keterlambatan dokumen administrasi, perencanaan kebutuhan kurang matang	Barang tidak tersedia tepat waktu dan menghambat pelaksanaan kegiatan	BLK Industri DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Perubahan kebutuhan layanan di tengah pelaksanaan	Risiko Strategis	Penyesuaian program atau kebutuhan instansi	Terjadi revisi yang memakan waktu dan berpotensi menunda kegiatan	BLK Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
82	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan	Risiko Strategis	Jadwal pemeliharaan tidak tersusun dengan baik atau anggaran terlambat tersedia	Barang cepat rusak dan mengganggu operasional kegiatan	BLK Industri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
83	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	Peserta pelatihan mengundurkan diri pada saat pelatihan berlangsung	Risiko Operasional	Peserta pelatihan tidak komitmen Peserta pelatihan melanjutkan pendidikan atau keterima kerja	Target kinerja organisasi tidak tercapai Jumlah tenaga kerja kompeten yang terlatih berkurang	Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan UPT
84	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	Sarana yang dibelanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan	Risiko Operasional	Tidak ada identifikasi kebutuhan Tidak melibatkan stakeholder internal dalam proses perencanaan	Sarana hasil pengadaan tidak terpakai Pemborosan anggaran	UPT Bagian terkait (Kejuruan) Peserta pelatihan
85	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Lembaga yang mejalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan bidang pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK Pertanian	Risiko Strategis	Tidak adanya identifikasi dunia kerja dan Dunia Industri	1.Naskah kerjasama tidak bermanfaat	Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah
86	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	Calon Transmigran mengundurkan diri pada saat akan dilakukan pelatihan	Risiko Operasional	Calon transmigran berubah niat	Target kinerja tidak tercapai	Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah
87	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jumlah honor yang diberikan melebihi ketentuan yang ada	Risiko Fraud	Tidak melakukan reviu peraturan terkait	Kelebihan pembayaran	1.Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah 2.Negara
88	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan barang administrasi Umum perangkat daerah lebih kecil dari pada kebutuhan	Risiko Operasional	1.Perencanaan tidak melibatkan semua pihak	adanya kegiatan yang tidak tercover/terpenuhi	Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang yang dibutuhkan tidak tersedia di market place yang di tentukan oleh pemerintah	Risiko Operasional	1.minimnya barang yang tersedia di market place yang ditentukan oleh pemerintah 2.Minimnya penyedia	membutuhkan waktu yang lama untuk membelanjakan	Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah
90	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	adanya kenaikan tarif jasa/barang tertentu yang tidak diprediksi (listrik/telepon)	Risiko Operasional	Perencanaan tidak mempertimbangkan proyeksi kenaikan dan riwayat pembayaran sebelumnya	kekurangan dana untuk melakukan pembayaran	Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah
91	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah sarana yang perlu diperbaiki lebih besar daripada anggaran yang tersedia	Risiko Operasional	adanya sarana baru yang membutuhkan perbaikan pada saat anggaran sudah ditetapkan	adanya sarana yang tidak dapat dilakukan perbaikan/pemeliharaan pada saat anggaran sudah ditetapkan	Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah
92	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	Barang yang dibeli tidak sesuai kebutuhan pelatihan	Risiko Operasional	Keterbatasan stok atau perbedaan perkiraan harga pasar dengan kondisi sesungguhnya	Pelatihan Kerja terselenggara dengan keterbatasan	Peserta Pelatihan
93	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas/kewirausahaan	Perusahaan tidak bersedia mengikutkan tenaga kerjanya untuk mengikuti pelatihan karena durasi dinilai cukup lama bagi perusahaan meskipun hanya 3 hari	Risiko Kemitraan	Kurangnya kepedulian perusahaan atas investasi waktu dalam mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam pelatihan	Produktivitas perusahaan memiliki potensi yang rendah untuk meningkat	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas/ kewirausahaan	Mundurnya peserta sebelum pelatihan meskipun sudah daftar ulang	Risiko Operasional	Penyebab internal dari perusahaan calon peserta pelatihan	Kesulitan dalam mencari pengganti sehingga menyebabkan kendala dalam proses administrasi	Pemerintah
95	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas/ kewirausahaan	Peserta tidak menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan di tempat kerjanya	Risiko Operasional	Kurangnya motivasi dari peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan	Produktivitas tenaga kerja dan perusahaan tidak meningkat	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
96	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas/ kewirausahaan	Peserta pelatihan tidak hadir tepat waktu	Risiko Operasional	Penyebab internal dari perusahaan calon peserta pelatihan & kurangnya kedisiplinan peserta	Turunnya efektivitas penyampaian materi pelatihan	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan diberikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas/ kewirausahaan	Jaringan internet ketika melaksanakan kelas online tidak stabil	Risiko Operasional	Provider / Wi-Fi bermasalah	Penyampaian materi pelatihan produktivitas tidak dapat dilakukan optimal.	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
98	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Rendahnya minat perusahaan untuk menjalin kerjasama	Risiko Reputasi	Perusahaan belum memahami manfaat program peningkatan produktivitas	Citra lembaga pemerintah dianggap kurang relevan dengan kebutuhan industri	Pemerintah, perusahaan
99	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Respons lambat dari perusahaan dalam proses komunikasi kerjasama	Risiko Kemitraan	Minimnya akses kontak PIC yang tepat	Jadwal implementasi kegiatan mundur atau terhambat	Pemerintah, perusahaan
100	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Peserta perusahaan dari PHRD tidak mencapai target	Risiko Kemitraan	Topik kegiatan kurang menarik atau tidak relevan	Output kegiatan tidak optimal	Pemerintah, Perusahaan
101	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Pemadaman listrik berkala	Risiko Operasional	Gangguan eksternal	Pelaksanaan kegiatan terhambat	Pemerintah, tenaga kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Keterbatasan SDM pengelola media sosial	Risiko Operasional	Jumlah pengelola media sosial tidak sebanding dengan target konten	Frekuensi dan kualitas konten tidak optimal	Pemerintah, tenaga kerja
103	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Perusahaan tidak bersedia mengikuti prosedur bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas	Risiko Kemitraan	Kurangnya pemahaman perusahaan atas pentingnya peningkatan produktivitas	Produktivitas perusahaan memiliki potensi yang rendah untuk meningkat, tidak ada kreativitas dan inovasi baru dalam keberlangsungan perusahaan	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
104	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Penerapan hasil pendampingan tidak berjalan optimal	Risiko Kemitraan	Hasil pendampingan tidak ditindaklanjuti dengan perubahan yang konsisten	Hasil peningkatan produktivitas tidak signifikan dan perbaikan yang dilakukan tidak berkelanjutan	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
105	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	Perubahan prioritas perusahaan	Risiko Kemitraan	Fokus manajemen bergeser ke isu lain yang dianggap lebih mendesak	Hasil pendampingan tidak dapat dimaksimalkan	Pemerintah, perusahaan, tenaga kerja perusahaan
106	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyelenggaraan administrasi keuangan tidak sesuai standar operasional	Risiko Operasional	Tidak terukurnya hasil penyelenggaraan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan yang terselenggara tidak sesuai standar operasional	Balai Pengembangan Produktivitas

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Administrasi umum perangkat daerah terselenggara tidak sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Kurang memadainya alokasi anggaran untuk menyelenggarakan layanan administrasi umum perangkat daerah	Penyelenggaraan layanan administrasi umum yang tidak sesuai standar layanan	- Balai Pengembangan Produktivitas - Peserta Pelatihan - Masyarakat umum
108	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional kantor	Risiko Operasional	Keterbatasan alokasi anggaran dan/atau ketidakcermatan dalam penyusunan rencana RAB jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terhambatnya operasional kantor karena pengalokasian anggaran jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak memadai	- Balai Pengembangan Produktivitas - Peserta Pelatihan - Masyarakat Umum
109	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal	Risiko Operasional	Keterbatasan alokasi anggaran yang digunakan untuk pemeliharaan barang milik daerah atau ketidakcermatan dalam menentukan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Barang milik daerah tidak dapat dipelihara sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan sehingga tidak berfungsi optimal	- Balai Pengembangan Produktivitas - Peserta Pelatihan - Masyarakat Umum
110	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kegiatan penerapan K3 di perusahaan yang dilakukan oleh Balai K3 (semula Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan)	Meningkatnya angka kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja di perusahaan	Risiko Operasional	Pemahaman dan komitmen tenaga kerja dan pengusaha terhadap pelaksanaan K3 masih kurang	Menurunnya tingkat produktivitas tenaga kerja dan perusahaan	Tenaga Kerja dan Perusahaan
111	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terganggunya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Risiko Operasional	Pencairan keuangan terlambat	Pelaksanaan kegiatan administrasi pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja terganggu	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
112	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kerusakan sarana dan prasarana kantor	Risiko Operasional	Usia sarana dan prasarana kantor dan/atau terjadinya kecelakaan/bencana alam	Kegiatan administrasi dan operasional Balai Keselamatan Kerja tidak bisa dilaksanakan	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan masyarakat pengguna

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Terganggunya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Risiko Operasional	Adanya kejadian yang tidak terduga	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah tidak berjalan dengan baik	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
114	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Spesifikasi barang yang diadakan kurang sesuai dengan kebutuhan	Risiko Operasional	Adanya persyaratan wajib TKDN dalam pengadaan barang	Hasil pekerjaan terkait dengan barang yang diadakan tidak optimal	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan masyarakat pengguna
115	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jasa pelayanan umum tidak terselenggara dengan baik	Risiko Operasional	Kinerja tenaga jasa pelayanan umum kurang baik	Terjadi hal-hal yang merugikan bagi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
116	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadinya kerusakan pada sarana operasional kantor	Risiko Operasional	Usia dari sarana operasional kantor yang sudah tua	Kegiatan operasional kantor tidak terselenggara dengan baik	Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan masyarakat pengguna
117	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan	- Kurikulum pelatihan kurang sinkron dengan kebutuhan industri - Koordinasi antar pihak kurang optimal - perubahan kebijakan yang cepat - Implementasi antara jadwal dengan standar kompetensi kurang optimal - Partisipasi peserta pelatihan yang kurang optimal - Proses administrasi yang kurang efektif.	Risiko Operasional	- Perubahan teknologi dan tren industri yang cepat membuat pelatihan sulit mengikuti perkembangan dan kurangnya komunikasi dengan DUDI serta Keterbatasan akses ke industri modern. - Regulasi yang kurang stabil: Kurangnya sosialisasi, Keterlambatan informasi - Fasilitas praktik yang terbatas - Kurangnya motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan. - Banyaknya aplikasi administrasi yang harus diselesaikan saat penyelenggaraan pelatihan	- Terjadi penyesuaian materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Dudi - Motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan kurang optimal	Masyarakat
118	Sasaran Strategis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan	Informasi pelatihan kurang tersampaikan kepada masyarakat	Risiko Strategis	Kurangnya sosialisasi tentang manfaat pelatihan di BLK Jasa dan Pariwisata, Keterbatasan media promosi dan informasi kurang menarik	Peserta yang direkrut kurang memenuhi kualifikasi, Jumlah animo masyarakat kurang memenuhi target dan Sebagian masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang pelatihan di BLK Jasa dan Pariwisata	Masyarakat Umum Pencari Kerja

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	Sasaran Strategis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan pelatihan	Hasil Training Need Analysis (TNA) Kurang sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri/Perusahaan	Risiko Strategis	Dunia Usaha Dunia Industri kurang terbuka saat pelaksanaan TNA (terjadi resistensi) dan Metode TNA yang kurang tepat	Pemilihan Program Pelatihan di BLK tidak sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri/Perusahaan	BLK Jasa dan Pariwisata
120	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	- Pengadaan peralatan khusus mengalami hambatan - Keterbatasan ruang penyimpanan - Timbul masalah logistik (barang tidak sesuai spec atau terlambat hadir) - Adanya perubahan kebutuhan sarpras karena penyesuaian dengan kebutuhan DUDI	Risiko Operasional	- Peralatan untuk pelatihan PBK memiliki spesifikasi khusus sehingga tidak mudah didapatkan - Diperlukan vendor yang reliable - Cepatnya perkembangan teknologi pada DUDI	Pemenuhan Sarpras kurang optimal	Masyarakat
121	Sasaran Strategis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi/kesepakatan dan kerjasama dengan BLK	Tidak terjalin kemitraan bersama antara BLK Jasa dan Pariwisata dengan Dunia Usaha Dunia Industri/Perusahaan	Risiko Strategis	Bahwa Program Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Tidak relevan/tidak sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja/Kebutuhan dari Pihak Industri	Dengan Tidak terjalinnya Kemitraan Bersama maka akan berdampak pada Pemenuhan Kebutuhan Instruktur di BLK dan berdampak pada Penempatan Peserta Pasca Latih	Dunia Usaha Dunia Industri dan BLK Jasa dan Pariwisata
122	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jika terjadi kekosongan maupun cuti alasan penting pada Pelaksanaan Transaksi Keuangan maka penyerapan anggaran tidak bisa 100%	Risiko Operasional	Pejabat Pelaksanaan Transaksi Keuangan kosong atau cuti alasan penting	capaian realisasi keuangan tidak bisa mencapai target 100%	BLK Jasa dan Pariwisata
123	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Kurang mencukupinya anggaran untuk penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berupa penyediaan lampu penerangan ruangan akan mengganggu kegiatan baik rutin maupun pelatihan yang ada.	Risiko Operasional	Di dalam Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdapat sub kegiatan penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa penyediaan lampu penerangan ruangan, banyaknya lampu penerangan gedung/bangunan yang rusak/padam harus segera diganti agar tidak mengganggu kelancaran kegiatan rutin/pelatihan	Besar dan luasnya gedung BLK Jasa dan Pariwisata membutuhkan sangat banyak lampu penerangan ruangan, besarnya anggaran kurang mencukupi kebutuhan menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa lampu penerangan	BLK Jasa dan Pariwisata
124	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Tidak terpenuhinya target pengadaan barang milik daerah	Risiko Operasional	Tidak terpenuhinya target pengadaan barang milik daerah dikarenakan terkendala dengan TKDN dan pagu anggaran yang tersedia	terkendala dengan TKDN dan pagu anggaran yang tersedia dikarenakan harga barang yang mengandung TKDN melebihi pagu anggaran, dan ada beberapa barang yang belum mengandung TKDN sehingga memerlukan ijin dari Sekda	BLK Jasa dan Pariwisata dan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Kurang tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan, jasa komunikasi dan listrik	Risiko Operasional	Kurangnya tenaga jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dan anggaran belanja tagihan listrik	Terganggunya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah dan terganggunya kegiatan operasional seperti pelatihan yang ada di BLK Jasa dan Pariwisata (karena pelatihan di BLK Jasa dan Pariwisata sangat banyak dan membutuhkan Daya listrik yang cukup besar maka kurangnya anggaran belanja tagihan listrik akan sangat mengganggu kelancaran kegiatan yang ada)	BLK Jasa dan Pariwisata dan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan
126	Sasaran Kegiatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terganggunya kegiatan yang ada di BLK Jasa dan Pariwisata	Risiko Operasional	Banyaknya sarpras yang dimiliki BLK Jasa dan Pariwisata membutuhkan pemeliharaan rutin, seperti gedung dan workshop	Kurangnya pemeliharaan sarpras BLK Jasa dan Pariwisata akan mengganggu kelancaran kegiatan seperti administrasi perkantoran dan pelatihan tenaga kerja	BLK Jasa dan Pariwisata dan Masyarakat (peserta pelatihan)

b. Analisis Risiko

Tabel 2
Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	3	4	12	Ada	Menginformasikan persyaratan tersebut kepada pencari kerja termasuk penyandang disabilitas dan stake holder/Dinas Pendidikan dan lainnya yang terkait persyaratan minimal untuk bekerja di perusahaan tsb harus lulus SD/ijazah SD atau penyetaraan. Serta menyampaikan usulan kepada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	Memadai	3	4	12
- Calon Transmigrasi mengundurkan diri saat pemberangkatan ke daerah tujuan penempatan transmigrasi - Daerah Tujuan transmigrasi menolak sebagai lokasi penempatan transmigran, walaupun sudah terbit surat penetapan oleh Pusat/Kementerian Transmigrasi	3	4	12	Ada	Melakukan Sosialisasi, rekrutmen dan seleksi calon peserta kembali dengan pengganti yang telah diseleksi atau diulang kembali melakukan konsolidasi dengan kab/kota yang bersedia mengirimkan calon transmigran untuk ditempatkan di daerah tujuan, sesuai surat penetapan kuota dari Pusat/Kementerian Transmigrasi. Proses wawancara lebih detail	Memadai	3	3	9
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	3	4	12	Ada	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegawai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di Perusahaan - Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah - Melaporkan hasil keakurasian pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari 6 indikator ketenagakerjaan antara proyeksi/perkiraan dan realisasi nya pada tahun berjalan (Sakernas - BPS)	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	4	4	16	Ada	- Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha/pengelola perusahaan - Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja - Memaksimalkan Lembaga Kerjasama Bipartit di perusahaan. Berkoordinasi dengan stakeholder pengusaha, pekerja, serikat pekerja	Memadai	3	4	12
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sending Officers)	3	4	12	Ada	- Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi - Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Memadai	3	4	12
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	3	4	12	Ada	- Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset - Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku - Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov.Jateng, Biro APBJ Setda Prov.Jateng, Biro Hukum Setda Prov.Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku	Memadai	3	4	12
Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	3	4	12	Ada	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov.Jateng	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - dalam mengukur kinerja pembangunan dengan Data dan informasi seadanya/kurang optimal	3	4	12	Ada	- Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditandatangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. - Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS, Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait data dan informasi ketenagakerjaan	Memadai	3	4	12
- Laporan dari OPD tidak dapat disampaikan tepat waktu dan kurang update. - Kurang update reasoning/alasan atau solusi/upaya yang telah dilakukan tidak bisa diikuti secara rutin perkembangan/progress report pelaksanaan dari tiap ketercapaian atau tidaknya indikator kinerja dan anggaran dari unit kerja - Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan data dan informasi seadanya/kurang optimal	3	4	12	Ada	- Menggunakan WAG sebagai media untuk menyampaikan info kepada pengampu kegiatan di Lingkungan Disnakertrans Prov.Jateng (Sekretariat, Bidang dan UPTD dilingkungan Disnakertrans Jateng) terkait dengan evaluasi kinerja dan anggaran serta cara mengukur capaian dengan yang telah di targetkan dalam dokumen Renstra maupun Renja. - Mengkonfirmasi ulang pada pengampu kegiatan di Sekretariat, Bidang dan UPTD terkait hasil capaian dan permasalahannya melalui WAG atau telpon.	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pencari kerja dan tenaga kerja tidak memiliki kompetensi dan tidak terserapnya menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan	3	4	12	Ada	Melakukan sosialisasi program dan verifikasi terhadap kebutuhan perusahaan serta kompetensi peserta yang akan mengikuti program, sehingga ditemukan kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja dan melaksanakan Uji Kompetensi	Belum Memadai	2	2	4
Beberapa LPK belum bersertifikat Akreditasi	3	4	12	Ada	1.Sosialisasi tentang indikator sertifikasi 2.Monitoring kemajuan LPK yang besertifikat	Belum Memadai	2	2	4
Kualitas produk belum memenuhi standar yang ditentukan	3	4	12	Ada	1.Melaksanakan Forum Sinergitas produktivitas 2.Meningkatkan produktivitas di perusahaan (Unit Peningkatan Produktivitas Perusahaan)	Belum Memadai	3	3	9
Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan/atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, mismatch dan sebab lainnya)	3	4	12	Ada	1.Penyusunan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 2.Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Kapasitas kepada Pencari Kerja, Calon Pencari Kerja, Calon Tenaga Kerja dan Masyarakat 3.Penyebarluasan Informasi Peluang Kerja dan Mekanisme Kerja Prosedural	Memadai	3	4	12
Pencari Kerja/ Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	3	4	12	Ada	1.Memperketat seleksi calon peserta baik secara administratif maupun teknis 2.Pendampingan memulai usaha terhadap peserta pemberdayaan sejak awal kegiatan sampai pasca kegiatan	Belum Memadai	3	4	12
Penyandang disabilitas belum dapat terserap secara optimal di sektor kerja formal dan/atau kembali menganggur akibat keterbatasan akses, kompetensi, dan penerimaan pasar kerja.	3	4	12	Ada	1.Fasilitasi dan pendampingan penempatan kerja penyandang disabilitas pada sektor formal. 2.Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dalam penyediaan lapangan kerja formal yang inklusif. 3.Penyuluhan, bimbingan jabatan, dan peningkatan kompetensi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan pasar kerja. 4.Penguatan peran Unit Layanan Disabilitas dan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja.	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi belum terserap secara optimal pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan tingkat keahlian menengah-tinggi (misssmatch tenaga kerja).	3	4	12	Ada	1.Fasilitasi penempatan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi sesuai kebutuhan keahlian pasar kerja. 2.Penyediaan dan penyebaran informasi pasar kerja berbasis data dan kebutuhan industri. 3.Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyerapan tenaga kerja sesuai keahlian. 4.Sinkronisasi kebutuhan pasar kerja dengan kebijakan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.	Belum Memadai	3	4	12
Calon Transmigran tidak dapat ditempatkan	3	4	12	Ada	berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk mendapatkan alokasi penempatan transmigrasi yang lebih besar dan dapat mendapatkan alokasi tambahan untuk pengisian lokasi yang masih kosong dan luncuran	Memadai	3	3	9
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	3	4	12	Ada	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Memadai	3	4	12
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	3	4	12	Ada	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Memadai	3	4	12
Hubungan Kerja yang tidak kondusif antara Pekerja dan Pengusaha	3	4	12	Ada	Melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3.Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4.Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5.Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	4	5	20	Ada	1.Melakukan pembinaan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 3.Melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada perusahaan dan pengawas ketenagakerjaan; 4.Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan; 5.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam peningkatan penerapan norma ketenakerjaan; 6.Melakukan monitoring hasil pembinaan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan 7.Melakukan penanganan kasus ketenagakerjaan; 8.Memonitoring hasil penanganan kasus ketenagakerjaan; 9.Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam penanganan kasus ketenagakerjaan; 10.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam penanganan kasus ketenagakerjaan 11.Melaksanakan Penydikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan 12.Memberikan pembinaan norma K3 kepada pengusaha/pemberi kerja, pekerja/buruh atau SP/SB; 13.Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian K3 di perusahaan; 14.Memonitoring hasil Pemeriksaan Norma K3 di Perusahaan; 15.Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam penerapan K3 di Perusahaan; 16.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam penerapan K3 di perusahaan.	Memadai	3	4	12
Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Berdasarkan Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja	2	2	4	Ada	- Meningkatkan Sosialisasi secara Efektif melalui media sosial, website, dan kerja sama. - Meningkatkan Motivasi Peserta dengan insentif berbasis kinerja dan sistem seleksi yang efektif. - Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dengan peralatan dan fasilitas yang memadai serta instruktur pelatihan yang efektif.	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	- Dari pihak kantor selalu memberikan peringatan kepada ASN yang belum melaksanakan absen harian pada hari itu juga sebelum jam absen habis - Mengingatkan kepada yang bersangkutan kelengkapan dokumen terkait dengan usulan KGB - Menganjurkan kepada ASN untuk segera melengkapi dokumen administrasi masing masing guna kelengkapan data.	Memadai	2	2	4
Program Pelatihan tidak tepat sasaran/ yang dilatih bukan pengangguran	2	3	6	Ada	1.Melakukan proses seleksi dengan beberapa tahapan (berkas, tertulis dan test wawancara) 2.Melakukan sosialisasi 3.Membuat SOP	Memadai	2	2	4
Peserta pelatihan calon transmigrasi tidak hadir pada saat pelaksanaan pelatihan	2	3	6	Ada	1.Melakukan komunikasi efektif dengan stakeholder terkait 2.Melakukan komunikasi intens di internal OPD	Memadai	2	2	4
Pelayanan kepegawai yang ada di Balai Latihan Kerja Pertanian Provinsi Jawa Tengah tidak berjalan maksimal	2	3	6	Ada	1.Memaksimalkan pegawai yang ada 2.Up skilling bagi pegawai yang ada di pelayanana umum 3.sharing Knowledge	Memadai	1	3	3
Hasil pelatihan peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan belum terlacak secara teratur	3	1	3	Ada	Membentuk tim pendampingan dan atau monitoring pasca pelatihan untuk melakukan pelacakan secara teratur	Belum Memadai	2	1	2
Jenis pelatihan peningkatan produktivitas ditujukan kepada tenaga kerja, bukan kepada calon tenaga kerja sehingga tidak match dengan tuntutan penempatan calon tenaga kerja	3	2	6	Ada	Menambahkan jenis kegiatan kewirausahaan untuk calon wirausaha agar menjadi wirausaha (menyerap calon tenaga kerja)	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penerapan hasil bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas belum dilaksanakan secara berkesinambungan	3	2	6	Ada	1.Direncanakan untuk menyusun payung hukum untuk mentaati peraturan dalam penerapan peningkatan produktivitas pada dunia usaha (difasilitasi bidang Lattas) 2.Membentuk tim pendampingan pasca bimbingan konsultasi	Belum Memadai	3	2	6
Tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum perkantoran, kepegawaian dan keuangan	3	3	9	Ada	Penyusunan anggaran rencana belanja barang/jasa mengacu pada SHB	Belum Memadai	2	2	4
Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau timbulnya penyakit akibat kerja di perusahaan	3	4	12	Ada	Melakukan pembinaan K3 di perusahaan	Memadai	3	3	9
Terganggunya kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	3	3	9	Ada	Segera memenuhi kebutuhan kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Memadai	2	2	4
Tidak sesuainya realisasi anggaran yang diberikan dengan rencana yang diajukan	2	3	6	Ada	Mengoptimalkan SDM, sarana dan prasarana yang ada	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Kurangnya sinkronisasi antara kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri - Sarpras yang kurang memadai - Adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang cepat - Perkembangan DUDI yang pesat yang kurang sesuai dengan kurikulum pelatihan saat ini	2	2	4	Ada	- Menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan DUDI - Berkolaborasi dan berkomunikasi dengan DUDI sebelum penyelenggaraan pelatihan - Melakukan pemeliharaan Sarpras secara berkala	Memadai	1	1	1
Terganggunya kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah/tidak berjalan dengan lancar	1	1	1	Ada	Dengan segera memenuhi kebutuhan kegiatan operasional pada pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.SDM di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota/Provinsi masih belum memahami secara teknis dalam menyusun perencanaan tenaga kerja daerah. 2.Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di Kab/Kota/Provinsi dalam menyusun kebijakan dan indikator ketenagakerjaan masih ada yang belum mencantumkan nama program/ kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan pemuthahirannya Kepmendagri 900.1.2850/2025	4	4	16	Ada	- Melakukan pembinaan dan pendampingan pada aparatur/ASN/pegawai kab/kota/provinsi dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di masing-masing daerah. - Melakukan review terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah setiap tahun - Menyampaikan laporan nilai keakurasian indikator hasil proyeksi indikator RTKD tersebut dan realisasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Sasaran manfaat/peserta pelatihan/pembinaan/ pemberdayaan/penempatan/perlindungan dan sebagainya diarahkan sesuai dengan yang dibutuhkan/kebutuhan tenaga kerja yang tercakup dalam dokumen RTKD dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau dapat dilihat dari RTK Mikro di Perusahaan (Yang akan dilaporkan dalam Wajib Lapori Ketenagakerjaan di Perusahaan/WLKP).	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD kurang optimal dan tidak dapat disampaikan tepat waktu 2.SDM dibagian penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kesulitan untuk mendapat penjelasan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. 3.Kurang update reasoning/alasan atau solusi/upaya yang telah dilakukan tidak bisa diikuti secara rutin perkembangan/progres report pelaksanaan dari tiap ketercapaian tidaknya indikator kinerja dan anggaran dari unit kerja 4.Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan data dan informasi seadanya/kurang optimal	4	4	16	Ada	1.Menggunakan WAG (Whatsshapp Grup) sebagai media untuk penyampaian info kepada pengampu kegiatan di lingkungan Disnakertrans Jateng (Sekretariat, Bidang dan UPTD di lingkungan Disnakertrans Jateng) terkait dengan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD serta cara mengukur capaian dengan telah ditargetkan dalam dokumen Renstra maupun Renja PD. 2.Mengkonfirmasi ulang pada pengampu kegiatan di Sekretariat, Bidang dan UPTD terkait perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD melalui WAG. 3.Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Pengendalian Operasional dilakukan tidak secara rutin baik per bulan atau per triwulan.	Belum Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak terpenuhinya perlindungan asuransi kendaraan dinas secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan dinas, serta Tidak tersedianya perlindungan asuransi atas bangunan/gedung kantor yang berpotensi menimbulkan kerugian besar apabila terjadi kebakaran, bencana alam, atau risiko lainnya	3	3	9	Ada	Mengikutsertakan dalam Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas dan Jaminan Asuransi Bangunan Gedung/Kantor	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
tidak tercapainya persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan akibat keterbatasan sumber daya manusia, serta keterlambatan proses administrasi	2	2	4	Ada	Penerapan SOP, Peningkatan SDM, Pemuktahiran data kepegawaian, optimalisasi sistem informasi serta monitoring dan evaluasi layanan	Memadai	2	2	4
tidak tercapainya persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	3	2	6	Ada	menyusun kebutuhan belanja alat listrik, atk, bahan kebersihan dan belanja operasional lainnya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan prioritas kegiatan serta melakukan afisiensi penggunaan, dan melakukan pemantauan rutin realisasi belanja dan memastikan pembayaran tagihan serta pengadaan belanja operasional tepat waktu	Memadai	2	2	4
Tidak tercapainya jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan sesuai dengan target, spesifikasi, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.	3	3	9	Ada	Menyusun perencanaan kebutuhan barang milik daerah secara lebih akurat dan berbasis kebutuhan riil, Menyusun spesifikasi teknis dan KAK secara jelas dan terukur, Melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengadaan, Meningkatkan koordinasi antara PPK, Pejabat Pengadaan, dan pengguna barang.	Memadai	2	2	4
Risiko terjadinya gangguan, penurunan kinerja, atau tidak berfungsinya aset tak berwujud (aplikasi/sistem informasi/lisensi software) akibat pemeliharaan yang tidak optimal, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai spesifikasi.	3	4	12	Ada	Menyusun dan melaksanakan jadwal pemeliharaan aset tak berwujud secara berkala, Melakukan pembaruan sistem (update, patch, renewal lisensi) sesuai ketentuan, Menyediakan dukungan teknis melalui penyedia jasa/tenaga ahli TI, Melakukan pencadangan (backup) data secara rutin, Menyusun dan memperbarui dokumentasi aset tak berwujud.	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Risiko tidak tercapainya sasaran kegiatan pemeliharaan bangunan gedung/kantor akibat kondisi bangunan yang tidak terpelihara secara optimal, keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan, atau ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan standar teknis yang ditetapkan.	3	4	12	Ada	Menyusun rencana dan jadwal pemeliharaan gedung secara berkala dan terdokumentasi, Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala (atap, struktur, instalasi listrik, air, dan sanitasi), Melakukan pemeriksaan kondisi bangunan secara periodik, Menggunakan penyedia jasa pemeliharaan yang kompeten dan sesuai spesifikasi teknis, Menyediakan anggaran pemeliharaan sesuai kebutuhan riil bangunan, Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pemeliharaan bangunan.	Belum Memadai	2	3	6
Peserta yang tidak kompeten	3	3	9	Belum Ada	Diberikan sosialisasi sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki	Belum Memadai	2	2	4
Tidak terserapnya peserta magang menjadi karyawan atau pegawai di perusahaan	3	3	9	Ada	1.Melakukan sosialisasi program dan verifikasi terhadap kebutuhan perusahaan serta kompetensi peserta yang akan mengikuti program, sehingga ditemukan kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, melaksanakan monitoring pelaksanaan magang 2.Melakukan sosialisasi program pemagangan luar negeri di Kab/kota dengan waktu yang lebih awal	Memadai	2	2	4
LPK yang tidak terakreditasi	3	3	9	Ada	Sosialisasi terhadap LPK dengan melakukan pendampingan Akreditasi	Memadai	2	2	4
Peserta pelatihan peningkatan produktivitas dimungkinkan tidak sesuai dengan yang diinginkan	3	3	9	Ada	- Melaksanakan forum sinergitas produktivitas - Menentukan persyaratan untuk perekrutan peserta - Monitoring pasca kegiatan	Belum Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Untuk mendapatkan data pengukuran tingkat Makro cukup lama karena berhubungan dengan instansi lain - Untuk tingkat mikro dan Individu umumnya perusahaan sulit untuk memberikan data keuangan - karena kesibukan untuk mengisi form dan bukti dukung agak sulit	3	3	9	Ada	Memberikan waktu lebih awal untuk pengumpulan data >memberikan pemahaman pentingnya dan manfaat melakukan pengukuran > memberikan pendampingan bagaiman menerapkannya	Belum Memadai	2	2	4
Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	3	4	12	Ada	1.Penyebarlusan informasi peluang kerja dan mekanisme kerja 2.Penyuluhan, Bimbingan dan Peningkatan Kapasitas Pencari Kerja, Calon Tenaga Kerja dan Masyarakat 3.Peningkatan kapasitas lembaga dan petugas penempatan tenaga kerja	Belum Memadai	3	4	12
Sarana produktif tidak selesai terbangun sesuai rencana	3	4	12	Ada	- Menetapkan persyaratan pekerja padat karya merupakan warga yang sudah terbiasa melakukan pekerjaan pertukangan - Membangun komitmen dengan pemerintah desa, untuk meneruskan/menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dengan sistem swadaya masyarakat	Belum Memadai	3	3	9
Peserta pemberdayaan, baik pencari kerja dan masyarakat tidak dapat melanjutkan usaha sesuai pembekalan yang diberikan	3	4	12	Ada	- Memperketat proses seleksi - Membentuk embrio koperasi untuk permodalan - Pendampingan usaha	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyandang disabilitas pencari kerja belum berhasil ditempatkan di pasar kerja.	3	4	12	Ada	1.Pelayanan dan fasilitasi penempatan kerja bagi pencari kerja penyandang disabilitas melalui layanan antar kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan. 2.Penyuluhan, bimbingan jabatan, dan pendampingan khusus bagi pencari kerja penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesiapan kerja dan kesesuaian kompetensi. 3.Peningkatan kerja sama dengan perusahaan dalam penyediaan lowongan kerja ramah disabilitas. 4.Peningkatan kapasitas petugas penempatan tenaga kerja dan penguatan peran Unit Layanan Disabilitas (ULD).	Belum Memadai	3	4	12
Permohonan perizinan LPTKS melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) tidak dapat diproses atau diterbitkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.	3	4	12	Ada	1.Pelayanan dan fasilitasi proses perizinan LPTKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada LPTKS terkait persyaratan dan prosedur perizinan. 3.Verifikasi administrasi dan teknis dokumen permohonan izin LPTKS secara berjenjang. 4.Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan dan kepastian penerbitan izin.	Belum Memadai	3	4	12
Pelaporan Informasi Pasar Kerja dari Kabupaten/Kota tidak lengkap, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai standar data yang ditetapkan.	3	4	12	Ada	1.Fasilitasi dan pembinaan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelaporan Informasi Pasar Kerja sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 2.Sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas pengelola data pasar kerja Kabupaten/Kota. 3.Pemanfaatan dan penguatan sistem informasi pasar kerja terintegrasi untuk pelaporan data pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja. 4.Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan data Informasi Pasar Kerja.	Belum Memadai	3	4	12
Peserta pemberdayaan, baik PMI Purna dan Keluarga PMI tidak bisa mengembangkan usaha sesuai pembekalan yang diberikan	4	3	12	Ada	Seleksi, Komitmen, Motivasi dan Pendampingan Usaha	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	3	4	12	Belum Ada	Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, perangkat desa, asosiasi lembaga penempatan, asosiasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam rangka pembinaan, monitoring, penyelesaian permasalahan dan pencegahan penempatan PMI unprosedural	Belum Memadai	3	4	12
TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	4	3	12	Ada	Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengendalian dan monitoring penggunaan TKA	Belum Memadai	3	4	12
Calon Transmigran tidak dapat ditempatkan	3	3	9	Ada	berkoordinasi dengan Kementerian Transmigrasi untuk mendapatkan alokasi penempatan transmigrasi yang lebih besar dan dapat mendapatkan alokasi tambahan untuk pengisian lokasi yang masih kosong dan luncuran	Memadai	3	2	6
Perusahaan tidak menyusun peraturan perusahaan	4	3	12	Ada	Pembinaan penyusunan peraturan perusahaan di perusahaan dan Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dan pengusaha/ perusahaan.	Memadai	2	3	6
Tidak hadirnya peserta yang diundang sosialisasi.	3	2	6	Ada	Pembinaan di bidang jaminan sosial dan Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan dan pengusaha/ perusahaan.	Memadai	3	2	6
Tidak aktifnya LKS Bipartit di perusahaan	2	3	6	Ada	Pembinaan pembentukan LKS Bipartit dan melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota	Memadai	2	3	6
Tidak semua perusahaan menjalankan peran dan fungsi sarana hubungan industrial di perusahaan	2	3	6	Ada	Pembinaan di bidang sarana hubungan industrial dan melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota, pengusaha dan pekerja/buruh	Memadai	2	3	6
Sulitnya mencapai kesepakatan dalam pembuatan keputusan atau rekomendasi	2	3	6	Ada	Pembinaan tentang pentingnya peran dan fungsi LKS Tripartit dalam hubungan industrial dan melakukan koordinasi dengan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan stakeholder ketenagakerjaan yang tergabung dalam LKS Tripartit Provinsi	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh tidak terverifikasi	3	4	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dan serikat pekerja/serikat buruh	Memadai	3	4	12
Masih tingginya perselisihan penempatan tenaga kerja dan kasus Pekerja Migran Indonesia	3	4	12	Ada	Melaksanakan pembinaan kepada perusahaan penempatan pekerja migran dan melaksanakan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja dan penanganan kasus PMI	Memadai	2	3	6
Masih tingginya perselisihan Hubungan Industrial	3	4	12	Ada	Melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Memadai	2	3	6
Pelaksanaan norma hubungan industrial yang rendah	3	4	12	Ada	Melaksanakan pembinaan norma hubungan industrial	Memadai	2	3	6
Peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK	4	4	16	Ada	Melaksanakan deteksi dini terhadap pemutusan hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan	Memadai	3	3	9
Adanya berbagai faktor bahaya antara lain lalu lintas jalan raya, faktor fisika, faktor kimia, faktor lingkungan kerja, dan faktor kesehatan kerja di tempat kerja/perusahaan	4	4	16	Ada	1.Mengikuti safety induction pada saat memasuki tempat kerja. 2.mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh tempat kerja/perusahaan. 3.Menggunakan Alat Pelindung Diri yang diwajibkan oleh perusahaan sesuai potensi bahaya yang ada. 4.Mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat pulang pergi tempat kerja. 5.Selalu menerapkan K3 selama di kantor, perjalanan dan di tempat kerja/perusahaan.	Memadai	4	3	12
Pemalsuan dokumen K3 oleh perusahaan/oknum	3	5	15	Ada	Penggunaan aplikasi SIK3-SIRIKSAUJI untuk penerbitan Surat Keterangan Memenuhi K3	Memadai	2	5	10
Potensi gratifikasi dalam pengurusan lisensi & buku kerja Petugas P3K	4	4	16	Ada	Pengembangan aplikasi SIK3-SIP3K untuk pengurusan lisensi dan buku kerja Petugas P3K	Memadai	2	5	10
Masih ada pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan di bidang K3 pada Disnakertrans Prov. Jateng	4	4	16	Ada	Penyediaan hot line aduan pada aplikasi SIK3, pengembangan aplikasi SILADU sebagai salah satu kanal aduan permasalahan ketenagakerjaan termasuk K3	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	4	5	20	Ada	1.Melakukan pembinaan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Melakukan pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 3.Melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada perusahaan dan pengawas ketenagakerjaan; 4.Kerjasama bersama dengan stakeholder terkait dalam peningkatan penerapan norma ketenagakerjaan; 5.Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat dan daerah dalam peningkatan penerapan norma ketenakerjaan; 6.Melakukan monitoring hasil pembinaan dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan	Memadai	3	4	12
Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Berdasarkan Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja	2	2	4	Ada	Meningkatkan Sosialisasi secara Efektif melalui media sosial, website, dan kerja sama.	Memadai	2	2	4
~ Sarana tidak memadai. ~ Sarana tidak sesuai dengan kebutuhan industri. ~ Kurangnya perawatan dan pengelolaan	2	2	4	Ada	~ Optimalkan anggaran. ~ Lakukan perencanaan dan evaluasi berkala. ~ Jalin kemitraan dengan industri. ~ Tingkatkan pemeliharaan	Memadai	2	2	4
~ Kurangnya mental dan daya juang para pencari kerja ~ Kurangnya minat dan bakat ~ Masih kurangnya perusahaan di kejuruan tertentu	2	2	4	Ada	~ Memberikan arahan pada saat wawancara, agar peserta pelatihan mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir. ~ Memberikan motivasi pentingnya keterampilan yang kompeten. ~ Mengupayakan pendekatan dan komunikasi dengan perusahaan. ~ Mengadakan komunikasi dengan perusahaan secara intensif.	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sistem aplikasi keuangan eror, server down, atau keterbatasan akses	2	2	4	Ada	Koordinasi cepat dengan admin pusat/SKPD terkait Menyediakan SOP jika terjadi gangguan (manual backup) Memastikan perangkat komputer dan jaringan selalu diperbarui	Memadai	2	2	4
Keterlambatan pengajuan penghapusan	2	2	4	Ada	prioritaskan penghapusan pada periode terdekat	Memadai	2	2	4
Adanya surat yang masuk tidak sesuai dengan tanggal di surat sehingga kadang-kadang terjadi keterlambatan informasi undangan pelaksanaan kegiatan	2	2	4	Ada	Selalu mengkonfirmasi setiap ada surat undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan	Memadai	2	2	4
Keterlambatan proses pengadaan	2	2	4	Ada	Menyusun rencana pengadaan sejak awal tahun dan mempercepat proses administrasi	Memadai	2	2	4
Perubahan kebutuhan layanan di tengah pelaksanaan	1	1	1	Ada	Menyusun ruang lingkup jasa yang fleksibel namun tetap terkontrol	Memadai	1	1	1
Keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan	2	2	4	Ada	Menyusun jadwal pemeliharaan rutin dan memastikan ketersediaan anggaran tepat waktu	Memadai	2	2	4
Peserta pelatihan mengundurkan diri pada saat pelatihan berlangsung	3	4	12	Ada	Melaksanakan seleksi secara terstruktur (Dokumen dan wawancara), ada validasi dokumen	Memadai	2	2	4
Sarana yang dibelanjakan tidak sesuai dengan kebutuhan	2	4	8	Ada	Melibatkan stakeholder internal pada saat menyusun perencanaan	Memadai	2	2	4
Lembaga yang mejalin kerja sama dengan Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan bidang pelatihan yang diselenggarakan oleh Balatkertrans	2	3	6	Ada	1.Melakukan identifikasi terhadap industri yang akan diajak kerjasama 2.Melakukan penelusuran terhadap industri yang akan di ajak kerjasama	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Calon Transmigran mengundurkan diri pada saat akan dilakukan pelatihan	4	3	12	Ada	melakukan komunikasi efektif dengan stake holder terkait	Memadai	2	2	4
Jumlah honor yang diberikan melebihi ketentuan yang ada	2	4	8	Ada	1.Melakukan reviu peraturan yang terkait 2.koordinasi dengan Dinas Induk	Memadai	2	2	4
Penyediaan barang administrasi Umum perangkat daerah lebih kecil dari pada kebutuhan	3	2	6	Ada	Melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan	Memadai	2	2	4
Barang yang dibutuhkan tidak tersedia di market place yang di tentukan oleh pemerintah	3	3	9	Ada	1.Jika terkait dengan TKDN maka bersurat kepada Sekda/Inspektorat 2.Mencari penyedia yang menyediakan barang yang dibutuhkan	Memadai	2	2	4
adanya kenaikan tarif jasa/barang tertentu yang tidak diprediksi (listrik/telepon)	2	4	8	Ada	Melakukan proyeksi kenaikan tarif bagi jasa/barang penunjang urusan pemerintah daerah	Memadai	2	2	4
Jumlah sarana yang perlu diperbaiki lebih besar daripada anggaran yang tersedia	3	2	6	Ada	Melakukan identifikasi sarana yang memerlukan perbaikan dan potensi perbaikan	Memadai	3	1	3
Barang yang dibeli tidak sesuai kebutuhan pelatihan	2	2	4	Ada	Melakukan survey harga pasar pada saat penyusunan rencana RAB	Memadai	1	1	1
Perusahaan tidak bersedia mengikuti tenaga kerjanya untuk mengikuti pelatihan karena durasi dinilai cukup lama bagi perusahaan meskipun hanya 3 hari	1	2	2	Ada	Peningkatan awareness dalam peningkatan produktivitas ke perusahaan melalui kegiatan Productivity Gathering, upload konten di media sosial	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mundurnya peserta sebelum pelatihan meskipun sudah daftar ulang	3	3	9	Ada	Menyiapkan peserta cadangan yang cukup banyak untuk masuk waiting list	Belum Memadai	2	2	4
Peserta tidak menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pelatihan di tempat kerjanya	3	3	9	Belum Ada	Monitoring progress peserta pasca pelatihan	Belum Memadai	2	3	6
Peserta pelatihan tidak hadir tepat waktu	3	3	9	Ada	Melakukan reminder 1 jam sebelum memulai pelatihan	Memadai	2	2	4
Jaringan internet ketika melaksanakan kelas online tidak stabil	2	3	6	Ada	Menggunakan hotspot	Memadai	2	2	4
Rendahnya minat perusahaan untuk menjalin kerjasama	3	4	12	Ada	Peningkatan awareness dalam peningkatan produktivitas ke perusahaan melalui kegiatan Productivity Gathering dan Konten terkait Produktivitas pada platform media sosial	Memadai	2	2	4
Respons lambat dari perusahaan dalam proses komunikasi kerjasama	2	3	6	Ada	Menyusun jadwal terstruktur kedua pihak untuk memastikan tindak lanjut berjalan tepat waktu	Memadai	1	2	2
Peserta perusahaan dari PHRD tidak mencapai target	3	3	9	Ada	Menyesuaikan tema dan materi dengan isu produktivitas yang relevan bagi industri	Memadai	2	2	4
Pemadaman listrik berkala	2	3	6	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	3	6
Keterbatasan SDM pengelola media sosial	3	3	9	Ada	Menambah jumlah admin atau menunjuk tim kecil khusus yang mengelola konten digital	Memadai	2	2	4
Perusahaan tidak bersedia mengikuti prosedur bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas	3	2	6	Ada	Peningkatan awareness dalam peningkatan produktivitas ke perusahaan melalui kegiatan Productivity Gathering dan Konten terkait Produktivitas pada platform media sosial	Memadai	2	2	4
Penerapan hasil pendampingan tidak berjalan optimal	3	2	6	Ada	Melakukan monitoring secara intensif pada perusahaan yang memperoleh pendampingan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Perubahan prioritas perusahaan	3	2	6	Ada	Menyusun rencana pengganti apabila terjadi perubahan prioritas, seperti pemindahan fokus ke area yang sedang diprioritaskan tanpa menghentikan program sepenuhnya.	Memadai	2	2	4
Penyelenggaraan administrasi keuangan tidak sesuai standar operasional	3	3	9	Ada	Menyusun rencana RAB tahun anggaran berikutnya dengan cermat dan sesuai dengan kebutuhan	Memadai	2	2	4
Administrasi umum perangkat daerah terselenggara tidak sesuai standar layanan	2	2	4	Ada	Menyusun rencana RAB kebutuhan layanan administrasi umum perangkat daerah secara cermat	Memadai	2	2	4
Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional kantor	3	3	9	Ada	Menyusun rencana RAB layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan cermat sesuai kebutuhan	Memadai	2	2	4
Pemeliharaan barang milik daerah yang tidak optimal	2	2	4	Ada	Menyusun rencana RAB untuk pemeliharaan barang milik daerah dengan cermat sesuai kebutuhan dan skala prioritas	Memadai	2	2	4
Meningkatnya angka kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja di perusahaan	3	4	12	Ada	Melakukan pengujian lingkungan kerja dan in-house training K3 bagi tenaga kerja di perusahaan	Memadai	3	3	9
Terganggunya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	2	4	Ada	Melakukan tertib administrasi keuangan	Memadai	1	1	1
Kerusakan sarana dan prasarana kantor	2	4	8	Ada	Mengasuransikan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Memadai	2	2	4
Terganggunya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	3	2	6	Ada	Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Memadai	2	2	4
Spesifikasi barang yang diadakan kurang sesuai dengan kebutuhan	3	4	12	Ada	Memilih produk barang TKDN dengan spesifikasi paling tinggi	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jasa pelayanan umum tidak terselenggara dengan baik	2	3	6	Ada	Memilih vendor penyedia jasa pelayanan umum secara selektif	Memadai	2	2	4
Terjadinya kerusakan pada sarana operasional kantor	3	4	12	Ada	Melakukan pengadaan peralatan baru dan melaksanakan pemeliharaan sarana operasional kantor dengan skala prioritas	Memadai	2	3	6
- Kurikulum pelatihan kurang sinkron dengan kebutuhan industri - Koordinasi antar pihak kurang optimal - perubahan kebijakan yang cepat - Implementasi antara jadwal dengan standar kompetensi kurang optimal - Partisipasi peserta pelatihan yang kurang optimal - Proses administrasi yang kurang efektif.	2	2	4	Ada	- Selalu aktif memantau perkembangan DUDI - Memberikan motivasi dan softskill kepada peserta saat peserta sudah berada di BLK Jasa dan Pariwisata - Berkolaborasi dengan DUDI di bidang pariwisata dan perhotelan - Berkolaborasi dengan NGO (Plan Indonesia) dalam pemberian softskill kepada peserta pelatihan	Memadai	1	1	1
Informasi pelatihan kurang tersampaikan kepada masyarakat	1	1	1	Ada	Melaksanakan Sosialisasi Pelatihan dan Promosi Pelatihan dengan media sosial atau melalui Pemasaran secara langsung melalui event event kegiatan kepada Masyarakat	Memadai	1	1	1
Hasil Training Need Analysis (TNA) Kurang sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri/Perusahaan	1	1	1	Ada	Melaksanakan Training Need Analysis dengan berbagai Metode (melalui Wawancara dengan pihak HRD Perusahaan, Melaksanakan FGD TNA dan menyebar Kuesioner TNA)	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- Pengadaan peralatan khusus mengalami hambatan - Keterbatasan ruang penyimpanan - Timbul masalah logistik (barang tidak sesuai spec atau terlambat hadir) - Adanya perubahan kebutuhan sarpras karena penyesuaian dengan kebutuhan DUDI	2	2	4	Ada	- Mencari vendor yang reliable - Mengadakan survey dan penilaian sebelum mengadakan kerjasama dengan vendor - Mengadakan study tiru di DUDI atau BLK yang mengadakan pelatihan serupa. - Membuka peluang kerjasama dengan stakeholder lain terkait dengan CSR dalam pengadaan sarpras pelatihan. - Berkolaborasi dengan vendor yang reliable - Berkolaborasi dengan tim pengadaan barang dan jasa - Berkolaborasi dengan BUMN/BUMD terkait bantuan CSR	Memadai	1	1	1
Tidak terjalin kemitraan bersama antara BLK Jasa dan Pariwisata dengan Dunia Usaha Dunia Industri/Perusahaan	1	1	1	Ada	Lebih menekankan Koordinasi terlebih dahulu dengan Dunia Usaha Dunia Industri/Perusahaan yang akan diajak untuk bermitra	Memadai	1	1	1
Jika terjadi kekosongan maupun cuti alasan penting pada Pelaksanaan Transaksi Keuangan maka penyerapan anggaran tidak bisa 100%	1	1	1	Ada	Menunggu petunjuk dan arahan dari Dinas Induk	Memadai	1	1	1
Kurang mencukupinya anggaran untuk penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang berupa penyediaan lampu penerangan ruangan akan mengganggu kegiatan baik rutin maupun pelatihan yang ada.	2	2	4	Ada	Mengidentifikasi kebutuhan dan dengan mengurangi volume belanja, atau usulan penambahkan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya agar kebutuhan bisa terpenuhi secara maksimal	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko Yang Melekat			Pengendalian Yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tidak terpenuhinya target pengadaan barang milik daerah	1	1	1	Ada	Identifikasi kebutuhan barang dan membuat surat ijin pembelian barang non TKDN	Memadai	1	1	1
Kurang tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa jasa tenaga kebersihan, tenaga keamanan, jasa komunikasi dan listrik	1	1	1	Ada	Mengidentifikasi kebutuhan, terutama kebutuhan belanja tagihan listrik. Dengan segera menambah atau mengganti tenaga jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah serta menambah anggaran untuk berlangganan listrik pada perubahan anggaran maupun untuk tahun anggaran selanjutnya agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Kekurangan anggaran untuk belanja tagihan listrik saat ini dapat dilakukan dengan cara penghematan energi berupa mematikan AC ruangan jika tidak digunakan	Memadai	1	1	1
Terganggunya kegiatan yang ada di BLK Jasa dan Pariwisata	1	1	1	Ada	Identifikasi kerusakan dan Pemeliharaan sarpras secara rutin, serta usulan penambahan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya	Memadai	1	1	1

c. Penetapan Risiko Prioritas

Tabel 3
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif/tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif/tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun
-Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif/tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sending Officers)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sending Officers)	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. - Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian
Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. - Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan Data dan informasi seadanya/kurang optimal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi, menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat. - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi operasional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik, sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya, kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik-Kemnaker)

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan Data dan informasi seadanya/kurang optimal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi, menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat. - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi operasional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketrasmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik, sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya, kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik-Kemnaker)
Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan/atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, mismatch dan sebab lainnya)	12	Pencari Kerja, Calon Pencari Kerja, Tenaga Kerja, Masyarakat, Pemangku Kepentingan (Pemerintah dan Swasta)	Kurang optimalnya penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Mekanisme Penempatan tenaga kerja	1. Kualifikasi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja 2. Informasi Pasar Kerja tidak tersampaikan kepada Pencari Kerja 3. Pencari Kerja yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme penempatan tenaga kerja
Pencari Kerja/ Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Berhentinya kegiatan usaha di sektor informal eks peserta/kelompok masyarakat pasca Pemberdayaan Kewirausahaan maupun Padat Karya Produktif	Pengangguran meningkat

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi belum terserap secara optimal pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan tingkat keahlian menengah-tinggi (mismatch tenaga kerja)	12	Pekerja, pencari kerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi, dunia usaha, masyarakat	1.Ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja 2.Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang membutuhkan keahlian menengah-tinggi 3.Kurangnya informasi pasar kerja yang akurat dan mudah diakses oleh lulusan 4.Lemahnya keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan dunia kerja	1.Tingginya tingkat mismatch antara pendidikan dan pekerjaan 2.Rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja 3.Menurunnya daya saing tenaga kerja daerah
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	- Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	- Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan - Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, tidak membentuk LKS Bipartit, tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan tidak mendaftarkan pekerja/buruh pada BPJS Ketenagakerjaan - Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3.Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4.Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5.Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	12	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3.Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja; 4.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan.	1.Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja; 3.Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 4.Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
1.SDM di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota/Provinsi masih belum memahami secara teknis dalam menyusun perencanaan tenaga kerja daerah. 2.Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di Kab/Kota/Provinsi dalam menyusun kebijakan dan indikator ketenagakerjaan masih ada yang belum mencantumkan nama program/kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan pemuthahirannya Kepmendagri 900.1.2850/2025	12	Kepala Dinas. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	1.Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/kota/Prov belum menyusun RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah). 2.SDM yang kompeten (teknis) dalam perencanaan tenaga kerja di kab/kota/prov banyak yang mutasi, promosi dan pensiun 3.Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan OPD Lintas sektor terkait diluar Disnaker belum memanfaatkan dan menerapkan dokumen RTKD sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Renja PD. 4.Dinas Kab/kota/Prov yang membidangi ketenagakerjaan yang telah menyusun Dokumen RTKD/Perencanaan Tenaga Kerja Makro belum sepenuhnya memanfaatkannya sebagai dasar dalam perencanaan serta penganggaran pada dokumen perencanaan (RPJMD/RPD/Renstra/Renja/RKPD). 5.SDM aparatur di dinas Kab/kota/Prov yang membidangi ketenagakerjaan belum sepenuhnya mempunyai pemahaman yang sama dalam menyusun RTKD dan manfaatnya sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk redesign program, redesign budget, redesign supply dan demand dalam penyerapan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.	1.Dinas Kab/kota/prov kurang tepat dalam menetapkan indikator ketenagakerjaan dalam menyusun RPJMD/RPD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD. Sehingga akan menyebabkan kurang tepat sasaran intervensi pembangunan ketenagakerjaan di daerah/provinsi/kabupaten/ kota yang dirumuskan dan dicantumkan pada penetapan tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan sub kegiatan yang seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, Renstra, OPD, dsb). 2.Kurang tepatnya sasaran intervensi pembangunan ketenagakerjaan juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, kesenjangan upah/Indeks kesenjangan Gender, tingkat kemiskinan, gini ratio.

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
1.Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD kurang optimal dan tidak dapat disampaikan tepat waktu 2.SDM dibagian penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kesulitan untuk mendapat penjelasan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. 3.Kurang update reasoning/alasan atau solusi/upaya yang telah dilakukan tidak bisa diikuti secara rutin perkembangan/progres report pelaksanaan dari tiap ketercapaian tidaknya indikator kinerja dan anggaran dari unit kerja 4.Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan data dan informasi seadanya/kurang optimal	12	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	1.Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran serta evaluasi kinerja PD kurang optimal dan tidak tepat waktu penyampaiannya. 2.SDM petugas di bagian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta pelaporannya kesulitan untuk mendapatkan penjelasan dari unit kerja terkait perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pengarahan pimpinan terhadap permasalahan yang terjadi dan untuk memitigasi kemungkinan resiko yang kiranya terjadi.	1.Progres report dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang berjalan tidak bisa secara rutin dan bulanan untuk diketahui dan laporan yang diminta stakeholder terkait (Bappeda , Biro Bangda, Biro Kesra) tidak bisa segera dipenuhi. 2.Data Dukung dari laporan perkembangan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD baik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Internal Dinas dan UPTD tidak dapat segera digunakan untuk menetapkan bahan pertimbangan kebijakan yang harus segera dipenuhi/prioritas.
Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Pencari Kerja, Masyarakat, Calon Tenaga Kerja	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan/atau kembali ke pasar kerja

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Penyandang disabilitas pencari kerja belum berhasil ditempatkan di pasar kerja.	12	Penyandang disabilitas pencari kerja, masyarakat, dunia usaha	1.Keterbatasan kesesuaian kualifikasi penyandang disabilitas dengan kebutuhan pasar kerja 2.Masih terbatasnya perusahaan yang membuka lowongan ramah disabilitas 3.Minimnya akses informasi dan pendampingan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas	1.Rendahnya tingkat penempatan kerja penyandang disabilitas 2.Meningkatnya pengangguran pada kelompok rentan 3.Tidak tercapainya target indikator kinerja penempatan tenaga kerja inklusif
Permohonan perizinan LPTKS melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) tidak dapat diproses atau diterbitkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.	12	LPTKS, pencari kerja, masyarakat, dunia usaha	1.Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen permohonan izin LPTKS 2.Rendahnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan dan prosedur perizinan LPTKS 3.Keterbatasan koordinasi dan verifikasi teknis dalam proses penerbitan izin 4.Perubahan regulasi dan kebijakan perizinan	1.Terhambatnya legalitas operasional LPTKS 2.Tidak tercapainya target indikator kinerja penerbitan izin LPTKS 3.Potensi meningkatnya praktik penempatan tenaga kerja tidak sesuai ketentuan
Pelaporan Informasi Pasar Kerja dari Kabupaten/Kota tidak lengkap, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai standar data yang ditetapkan.	12	Pencari kerja, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat	1.Perbedaan kapasitas dan pemahaman petugas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pelaporan data pasar kerja 2.Keterbatasan kualitas dan konsistensi input data pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja 3.Kendala integrasi dan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja (SIAPkerja/SIPK/ayu kerjo jateng) 4.Kurangnya koordinasi dan monitoring pelaporan data dari Kabupaten/Kota	1.Data Informasi Pasar Kerja tidak akurat dan tidak mutakhir 2.Terganggunya perencanaan, kebijakan, dan layanan penempatan tenaga kerja 3.Berkurangnya kualitas pengambilan keputusan berbasis data

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	12	Pencari Kerja, Masyarakat, Perusahaan/User, Pemerintah	1.Peraturan dan kebijakan penempatan PMI yang banyak, multisektoral dan sering berubah 2.Keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja lembaga penempatan PMI 3.Masih adanya egosektoral antar stakeholder penempatan PMI 4.Belum optimalnya penyebaran informasi mekanisme bekerja ke luar negeri sampai ke perangkat desa (camat, kades/lurah, RW/RT) 5.Masih rendahnya awareness masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedural 6.PMI belum siap bekerja ke luar negeri yang rentan permasalahan	Multifaktor permasalahan penempatan tenaga kerja ke luar negeri
TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	12	TKA Pemberi Kerja TKA Pemerintah	1.Perizinan TKA secara online terpusat di Kementerian sehingga pengendalian terhadap dokumen perizinan lemah 2.Akses komunikasi terkait dokumen perizinan antara User TKA kepada Admin Pusat dan pembuat kebijakan terbatas 3.Belum optimalnya penyebaran informasi kebijakan perizinan dan pengendalian TKA di daerah 4.Keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan	Dokumen perizinan kerja TKA yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh tidak terverifikasi	12	Kepala Bidang HI dan Jamsos	Tidak akuratnya data	Verifikasi tidak menghasilkan data yang valid, sehingga keterwakilan juga tidak sesuai mencerminkan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Adanya berbagai faktor bahaya antara lain lalu lintas jalan raya, faktor fisika, faktor kimia, faktor lingkungan kerja, dan faktor kesehatan kerja di tempat kerja/perusahaan	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Adanya sumber-sumber produksi di tempat kerja yang tidak menerapkan K3 dan belum diterapkannya budaya K3 oleh masyarakat	Sumber produksi yang tidak menerapkan K3 akan menyebabkan adanya potensi bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya paparan bahan kimia dan timbulnya Penyakit Akibat Kerja
Pemalsuan dokumen K3 oleh perusahaan/oknum	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Ingin lolos tender/proyek tanpa biaya audit K3, cari legalitas cepat, budaya kepatuhan rendah	Sanksi pidana & administratif bagi pelaku, Kondisi membahayakan bagi pekerja karena prosedur riksa uji objek K3 tidak dijalankan dengan benar
Potensi gratifikasi dalam pengurusan lisensi & buku kerja Petugas P3K	10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	- Proses masih manual/tatap muka - Banyak interaksi langsung dengan petugas - Kurangnya transparansi biaya & prosedur - Budaya “uang terima kasih” - Sistem pengawasan dan pengaduan lemah	- Sanksi hukum (UU Tipikor) - Reputasi perusahaan tercoreng - Biaya pengurusan jadi mahal & tidak efisien - Ketergantungan pada jalur tidak resmi
1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	12	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	1.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	1.Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan 2.Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja

d. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Tabel 4
Rencana Tindak Pengendalian

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Pencari kerja belum dapat ditempatkan karena tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja (tidak mempunyai ijazah SD atau penyetaraan)	12	Pencari kerja kurang mendapatkan informasi mengenai kondisi pasar kerja yang inklusif	Pencari kerja yang belum ditempatkan menambah jumlah pengangguran	Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan, Pembekalan, dan Pengembangan Aplikasi Ayo Kerjo	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Evaluasi dan Monitoring terkait penyusunan RTK Makro/RTK Mikro pada Dinas di Kab/Kota/ Prov dan perusahaan di Jateng	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan pembinaan dan pendampingan pada pegawai di Kab/Kota/Prov dalam menyusun Dokumen RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Bimtek penyusunan RTKD/RTK Makro dan RTK Mikro di perusahaan bagi Pegawai Kab/Kota/Provinsi dan perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang ditetapkan kurang tepat	12	- Kurangnya pemahaman SDM dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kab/Kota dalam menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah - Pegawai di Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kab/Kota yang menangani perencanaan tenaga kerja mutasi atau promosi ke OPD lain - Dokumen RTKD yang telah disusun belum dimanfaatkan dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD	- Kurang tepatnya dalam menentukan target persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja serta neraca tenaga kerja dalam perencanaan ke depan, sehingga menyebabkan kurang tepat dalam pengambilan dan penentuan kebijakan Pembangunan ketenagakerjaan di daerah. - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kab/Kota banyak yang keliru dalam menetapkan indikator dari urusan tenaga kerja yang harus digunakan dalam menyusun Rencana Strategis OPD dan Renja OPD di Kab/kota masing-masing - Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota banyak yang keliru dalam menghitung akurasi hasil perkiraan indikator RTKD dengan realisasi yang diterbitkan BPS, yang harus dilaporkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) di Kab/Kota masing-masing	Melakukan Reviu terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	- Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Sosialisasi, pelatihan/bimtek peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas baik untuk pencari kerja, tenaga kerja di perusahaan dan wirausaha baru di masyarakat serta pengusaha/pengelola perusahaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	- Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Perusahaan membuat SOP tentang bidang pekerjaan untuk tenaga kerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	- Terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), akibat kompetensi dan produktivitas tenaga kerja rendah. - Terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha, terganggunya produktivitas tenaga kerja	12	- Kurangnya kompetensi tenaga kerja dan pemahaman produktivitas tenaga kerja di perusahaan - Tidak diterapkannya Sistem dan Prosedur Produktivitas di Perusahaan - Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja	- Produktivitas tenaga kerja kurang optimal, sehingga perusahaan tidak mendapat nilai tambah yang tinggi (tetap) dan menyebabkan insentif /tunjangan tenaga kerja tidak naik secara signifikan - Hubungan Industrial yang tidak harmonis dan tingkat produktivitas tenaga kerja menurun	Memaksimalkan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan, Berkolaborasi dengan stake holder pengusaha, pekerja serikat pekerja	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sending Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri	Intensifikasi dalam peningkatan kapasitas pegawai terkait etos kerja dan budaya kerja supaya berintegritas yang tinggi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten	Terjadinya gratifikasi saat melakukan verifikasi untuk rekomendasi LPK SO (Sending Officers)	12	- Pengelola LPKS/Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SO (LPK SO) ingin cepat mendapat rekomendasi LPK tersebut, supaya dapat dengan cepat untuk melatih pencaker tanpa dilakukan verifikasi oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat/verifikator untuk merekrut peserta pelatihan dengan job order/permintaan khususnya dari luar negeri - Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS SO) yang tidak mempunyai ijin dari Dinas ketenagakerjaan Kab/Kota setempat, tapi sudah melakukan operasional/merekrut peserta pelatihan dan menarik biaya pelatihan dari peserta pelatihan tersebut sehingga merugikan peserta tsb.	- Kompetensi calon tenaga kerja tersebut tidak terjamin kelayakannya akibat lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan tersebut belum dinyatakan layak menyelenggarakan pelatihan/belum diverifikasi - Pemalsuan dokumen negara termasuk kasus pidana - Dimungkinkan ada indikasi terjadinya gratifikasi dalam pelayanan dalam verifikasi ijin LPK SO - LPKS SO tidak mendapat ijin untuk mengirimkan peserta magang ke luar negeri dan merugikan peserta sudah mengikuti pelatihan tidak jadi berangkat magang ke luar negeri	Sosialisasi Rekrutmen magang ke Jepang tidak dikenakan biaya	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. - Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	Menegur yang bersangkutan di kegiatan tersebut untuk mengajukan nota dinas sebelum menggunakan aset	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Adanya pemanfaatan penggunaan aset yang tidak melalui prosedur yang benar	12	- Pemanfaatan kamar dan ruang pertemuan di Balai Penca (Pudak Payung) untuk pelatihan. Padahal kondisi gedung tidak layak pakai dan tidak diasuransikan. - Adanya pihak kedua, yang mengelola aset tanpa melalui prosedur yang benar	Kebijakan Dinas bahwa Peserta magang/diklat yang menggunakan aset Disnakertrans harus diikutkan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian	- Pengelolaan aset diberikan kepada Pihak lain sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku - Menyusun aturan/kebijakan serta Berita Acara dalam pengelolaan aset berkolaborasi dengan BPKAD Prov.Jateng, Biro APBJ Setda Prov.Jateng, Biro Hukum Setda Prov.Jateng sesuai dengan prosedur yang berlaku	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Terdapat indikasi adanya pengancaman/intimidasi yang dilakukan pemeriksa dari Inspektorat sebagai peminat barang terhadap pengurus barang terkait dengan proses lelang/penjualan aset	12	Seseorang sebagai peminat lelang/penjualan aset mempunyai keinginan untuk memenangkan lelang tersebut tanpa prosedur yang benar	Proses lelang/penjualan aset tanpa prosedur sehingga tidak sesuai dengan aturan dan Pengurus barang menjadi ketakutan karena diintimidasi sehingga mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas kerja	Melaporkan secara lisan kepada Inspektorat Prov.Jateng	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan Data dan informasi seadanya/kurang optimal	12	- Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi, menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat. - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi operasional data dan informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik, sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya, kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik-Kemnaker)	Menyusun SK Satu Data ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang harus ditandatangani oleh Gubernur (Tahun 2025 sampai saat ini belum ditanda tangani Gub) yang anggotanya dari Bidang dan UPTD Disnakertrans serta SDM Kab/Kota Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	- SDM pegawai petugas di subbag evaluasi dan pelaporan kurang optimal dalam menganalisa dan Menyusun laporan kinerja dan memverifikasi dan konfirmasi capaian kinerja dan anggaran dari unit kerja serta melaporkannya ke dinas dan instansi terkait. - Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan Data dan informasi seadanya/kurang optimal	12	- Kurangnya Kualitas SPIP dan pengendalian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang berjalan terhadap pencapaian target indikator kinerja dan tujuan dan sasaran organisasi, menyebabkan pelaporan kinerja dan anggaran terlambat. - SDM belum mempunyai pemahaman yang sama terhadap pentingnya pengelolaan data dan informasi (definisi operasional data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasi) sebagai indikator kinerja dan alat ukur kinerja keberhasilan pembangunan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, baik dalam perencanaan pembangunan urusan Nakertrans dan evaluasi pembangunan Nakertrans	Penyampaian laporan tidak tepat waktu. - Banyak pekerjaan yang tidak terkelola dengan baik, sehingga lebih banyak dikerjakan di akhir tahun - Kebijakan yang digunakan dalam perencanaan selanjutnya, kurang menggambarkan kondisi yang keadaan yang seharusnya - Data dan informasi serta dokumentasi yang dikumpulkan tidak terpenuhi (semua indikator) yang harus juga dilaporkan ke Pusat (Pusdatik-Kemnaker)	Mengkoordinasikan dengan Pusat Data dan Informasi ketenagakerjaan dan BPS, Bappeda serta Diskomfo Jateng terkait data dan informasi ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Pencari Kerja yang belum bisa ditempatkan di Pasar Kerja dan/atau Tenaga Kerja yang kembali ke Pasar Kerja (terdampak pandemi, PHK, kurang kompeten, miss match dan sebab lainnya)	12	Kurang optimalnya penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Mekanisme Penempatan tenaga kerja	1.Kualifikasi Pencari Kerja tidak sesuai dengan kebutuhan Pasar Kerja 2.Informasi Pasar Kerja tidak tersampaikan kepada Pencari Kerja 3.Pencari Kerja yang bekerja tidak sesuai dengan mekanisme penempatan tenaga kerja	Optimalisasi Program Penempatan Tenaga Kerja yang meliputi unsur Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan dan Perantaraan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 Bulan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	Pencari Kerja/Masyarakat yang belum bisa ditempatkan di Sektor Informal	12	Berhentinya kegiatan usaha di sektor informal eks peserta/kelompok masyarakat pasca Pemberdayaan Kewirausahaan maupun Padat Karya Produktif	Pengangguran meningkat	1.Memperketat seleksi calon peserta baik secara administratif maupun teknis 2.Pendampingan memulai usaha terhadap peserta pemberdayaan sejak awal kegiatan sampai pasca kegiatan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi belum terserap secara optimal pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan tingkat keahlian menengah-tinggi (mismatch tenaga kerja).	12	1.Ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja 2.Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja yang membutuhkan keahlian menengah-tinggi 3.Kurangnya informasi pasar kerja yang akurat dan mudah diakses oleh lulusan 4.Lemahnya keterkaitan (link and match) antara dunia pendidikan dan dunia kerja	1.Tingginya tingkat mismatch antara pendidikan dan pekerjaan 2.Rendahnya produktivitas dan kualitas tenaga kerja 3.Menurunnya daya saing tenaga kerja daerah	Penguatan link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha melalui pemetaan kebutuhan keahlian, fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kompetensi, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pasar kerja.	Ketua Kelompok kerja Penempatan Tenaga Kerja	12 Bulan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	- Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	Perusahaan tidak menerapkan tata kelola kerja yang layak	12	Perusahaan tidak mengetahui, memahami atau tidak mau melaksanakan aturan tentang PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	- Tidak kondusifnya hubungan industrial yang ada di perusahaan - Terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat PP, tidak membentuk LKS Bipartit, tidak menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, dan tidak mendaftarkan pekerja/ buruh pada BPJS Ketenagakerjaan - Terdapat disharmonisasi dalam hubungan industrial yang menyebabkan tidak kondusifnya hubungan industrial di masyarakat yang berdampak pada kepercayaan publik/masyarakat secara umum dan khususnya pengusaha dan pekerja/buruh berkaitan dengan pelaksanaan tata kerja yang layak (PP, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan BPJS Ketenagakerjaan), sehingga akan menimbulkan gejala di masyarakat, misalnya unjuk rasa	Pembinaan: PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, serta BPJS Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Januari - Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban dari Pengusaha dan Tenaga Kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan; 3.Adanya aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan berkaitan dengan hak-hak pekerja/buruh; 4.Adanya aduan kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; 5.Terjadinya kecelakaan kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja	12	1.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; 3.Rendahnya kesadaran akan potensi bahaya di tempat kerja; 4.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan K3 di perusahaan.	1.Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan; 2.Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja; 3.Tingginya jumlah aduan pelanggaran norma ketenagakerjaan; 4.Tingginya jumlah kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja.	1.Monitoring hasil penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 di perusahaan 2.Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang melanggar Peraturan Ketenagakerjaan	1.Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 2.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12 bulan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PERENCANAAN TENAGAKERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	1.SDM di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota/Provinsi masih belum memahami secara teknis dalam menyusun perencanaan tenaga kerja daerah. 2.Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di Kab/Kota/Provinsi dalam menyusun kebijakan dan indikator ketenagakerjaan masih ada yang belum mencantumkan nama program/kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai Permendagri 90/2019 dan pemuthakirannya Kepmendagri 900.1.2850/2025	12	1.Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/kota/Prov belum menyusun RTKD (Rencana Tenaga Kerja Daerah). 2.SDM yang kompeten (teknis) dalam perencanaan tenaga kerja di kab/kota/prov banyak yang mutasi, promosi dan pensiun 3.Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan OPD Lintas sektor terkait diluar Disnaker belum memanfaatkan dan menerapkan dokumen RTKD sebagai pedoman/acuan dalam menyusun Renstra dan Renja PD. 4.Dinas Kab/kota/Prov yang membidangi ketenagakerjaan yang telah menyusun Dokumen RTKD/Perencanaan Tenaga Kerja Makro belum sepenuhnya memanfaatkannya sebagai dasar dalam perencanaan serta penganggaran pada dokumen perencanaan (RPJMD/RPD/Renstra/Renja/RKPD). 5.SDM aparatur di dinas Kab/kota/Prov yang membidangi ketenagakerjaan belum sepenuhnya mempunyai pemahaman yang sama dalam menyusun RTKD dan manfaatnya sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk redesign program, redesign budget, redesign supply dan demand dalam penyerapan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.	1.Dinas Kab/kota/prov kurang tepat dalam menetapkan indikator ketenagakerjaan dalam menyusun RPJMD/RPD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD. Sehingga akan menyebabkan kurang tepat sasaran intervensi pembangunan ketenagakerjaan di daerah/provinsi/kabupaten/kota yang dirumuskan dan dicantumkan pada penetapan tujuan, sasaran OPD, program, kegiatan dan sub kegiatan yang seharusnya masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (Renja, Renstra, OPD, dsb). 2.Kurang tepatnya sasaran intervensi pembangunan ketenagakerjaan juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, kesenjangan upah/Indeks kesenjangan Gender, tingkat kemiskinan, gini ratio.	- Melakukan pembinaan dan pendampingan/fasilitasi pada aparatur/ASN/pegawai kab/kota/provinsi dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di masing-masing daerah. - Melakukan review terhadap RTKD Provinsi Jawa Tengah setiap tahun - Menyampaikan laporan nilai keakurasian indikator hasil proyeksi indikator RTKD tersebut dan realisasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) - Sasaran manfaat/peserta pelatihan/pembinaan/pemberdayaan/penempatan/perlindungan dan sebagainya diarahkan sesuai dengan yang dibutuhkan/kebutuhan tenaga kerja yang tercakup dalam dokumen RTKD dan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan atau dapat dilihat dari RTK Mikro di Perusahaan (Yang akan dilaporkan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan/WLKP).	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	1 Januari 2026 - 31 Desember 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	1.Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD kurang optimal dan tidak dapat disampaikan tepat waktu 2.SDM dibagian penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kesulitan untuk mendapat penjelasan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. 3.Kurang update reasoning/alasan atau solusi/upaya yang telah dilakukan tidak bisa diikuti secara rutin perkembangan/progres report pelaksanaan dari tiap ketercapaian tidaknya indikator kinerja dan anggaran dari unit kerja 4.Dalam mengukur kinerja pembangunan dengan data dan informasi seadanya/kurang optimal	12	1.Kualitas dokumen perencanaan, penganggaran serta evaluasi kinerja PD kurang optimal dan tidak tepat waktu penyampaian. 2.SDM petugas di bagian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta pelaporannya kesulitan untuk mendapatkan penjelasan dari unit kerja terkait perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan pengarahannya terhadap permasalahan yang terjadi dan untuk memitigasi kemungkinan resiko yang kiranya terjadi.	1.Progres report dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang berjalan tidak bisa secara rutin dan bulanan untuk diketahui dan laporan yang diminta stakeholder terkait (Bappeda, Biro Bangda, Biro Kesra) tidak bisa segera dipenuhi. 2.Data Dukung dari laporan perkembangan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD baik Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Internal Dinas dan UPTD tidak dapat segera digunakan untuk menetapkan bahan pertimbangan kebijakan yang harus segera dipenuhi/prioritas.	1.Melakukan Rapat terkait Perencanaan dan Penganggaran serta Evaluasi PD baik Renja dan Renstra maupun RKPD. 2.Memberikan pembinaan pada Internal PD terkait indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mencapai Tujuan dan Sasaran serta Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. 3.Pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Pengendalian Operasional dilakukan secara rutin baik per bulanan (baik secara Online atau Offline) .	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	1 Januari 2026 - 31 Desember 2026
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapatkan fasilitasi perantaraan kerja	Pencari Kerja yang belum ditempatkan di Pasar Kerja	12	Kualifikasi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Pencari kerja yang tidak terserap dan/atau kembali ke pasar kerja	Optimalisasi Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Lintas Kab/Kota Program Penempatan Tenaga Kerja	Ketua Kelompok Kerja Penempatan Tenaga Kerja	12 Bulan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penyandang disabilitas yang ditempatkan	Penyandang disabilitas pencari kerja belum berhasil ditempatkan di pasar kerja.	12	1.Keterbatasan kesesuaian kualifikasi penyandang disabilitas dengan kebutuhan pasar kerja 2.Masih terbatasnya perusahaan yang membuka lowongan ramah disabilitas 3.Minimnya akses informasi dan pendampingan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas	1.Rendahnya tingkat penempatan kerja penyandang disabilitas 2.Meningkatnya pengangguran pada kelompok rentan 3.Tidak tercapainya target indikator kinerja penempatan tenaga kerja inklusif	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan penempatan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan pendampingan, perluasan jejaring perusahaan ramah disabilitas, dan penguatan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja.	Ketua Kelompok Kerja Penempatan Tenaga Kerja	12 Bulan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase ijin LPTKS yang diterbitkan	Permohonan perizinan LPTKS melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA) tidak dapat diproses atau diterbitkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.	12	1.Ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian dokumen permohonan izin LPTKS 2.Rendahnya pemahaman pemohon terhadap persyaratan dan prosedur perizinan LPTKS 3.Keterbatasan koordinasi dan verifikasi teknis dalam proses penerbitan izin 4.Perubahan regulasi dan kebijakan perizinan	1.Terhambatnya legalitas operasional LPTKS 2.Tidak tercapainya target indikator kinerja penerbitan izin LPTKS 3.Potensi meningkatnya praktik penempatan tenaga kerja tidak sesuai ketentuan	Optimalisasi pelayanan perizinan LPTKS berbasis OSS-RBA melalui peningkatan kualitas pendampingan pemohon, penguatan verifikasi teknis, dan penyesuaian terhadap regulasi perizinan terbaru.	Ketua Kelompok Kerja Penempatan Tenaga Kerja	12 Bulan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota yang meliputi data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja	Pelaporan Informasi Pasar Kerja dari Kabupaten/Kota tidak lengkap, tidak tepat waktu, atau tidak sesuai standar data yang ditetapkan.	12	1.Perbedaan kapasitas dan pemahaman petugas Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pelaporan data pasar kerja 2.Keterbatasan kualitas dan konsistensi input data pencari kerja, lowongan kerja, dan penempatan tenaga kerja 3.Kendala integrasi dan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja (SIAPkerja/SIPK/ayokerja Jateng) 4.Kurangnya koordinasi dan monitoring pelaporan data dari Kabupaten/Kota	1.Data Informasi Pasar Kerja tidak akurat dan tidak mutakhir 2.Terganggunya perencanaan, kebijakan, dan layanan penempatan tenaga kerja 3.Berkurangnya kualitas pengambilan keputusan berbasis data	Optimalisasi pelaporan Informasi Pasar Kerja Kabupaten/Kota melalui penguatan kapasitas petugas, standarisasi data, dan peningkatan integrasi sistem informasi pasar kerja.	Ketua Kelompok Kerja Penempatan Tenaga Kerja	12 Bulan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	PMI/CPMI yang rentan dan belum siap masuk ke pasar kerja	12	1.Peraturan dan kebijakan penempatan PMI yang banyak, multisektoral dan sering berubah 2.Keterbatasan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kinerja lembaga penempatan PMI 3.Masih adanya egosektoral antar stakeholder penempatan PMI 4.Belum optimalnya penyebarluasan informasi mekanisme bekerja ke luar negeri sampai ke perangkat desa (camat, kades/lurah, RW/RT) 5.Masih rendahnya awareness masyarakat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedural 6.PMI belum siap bekerja ke luar negeri yang rentan permasalahan	Multifaktor permasalahan penempatan tenaga kerja ke luar negeri	Peningkatan Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah, perangkat desa, asosiasi lembaga penempatan, asosiasi masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam rangka pembinaan, monitoring, penyelesaian permasalahan dan pencegahan penempatan PMI unprosedural	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	TKA yang bekerja tidak sesuai dengan izin kerja	12	1.Perizinan TKA secara online terpusat di Kementerian sehingga pengendalian terhadap dokumen perizinan lemah 2.Akses komunikasi terkait dokumen perizinan antara User TKA kepada Admin Pusat dan pembuat kebijakan terbatas 3.Belum optimalnya penyebarluasan informasi kebijakan perizinan dan pengendalian TKA di daerah 4.Keterbatasan dalam pelaksanaan pengendalian dan pembinaan	Dokumen perizinan kerja TKA yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Peningkatan Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan instansi Ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka pengendalian dan monitoring penggunaan TKA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	12 bulan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh tidak terverifikasi	12	Tidak akuratnya data	Verifikasi tidak menghasilkan data yang valid, sehingga keterwakilan juga tidak sesuai mencerminkan keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh	Melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota dan serikat pekerja/serikat buruh	Kepala Bidang HI dan Jamsos	Triwulan IV 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Adanya berbagai faktor bahaya antara lain lalu lintas jalan raya, faktor fisika, faktor kimia, faktor lingkungan kerja, dan faktor kesehatan kerja di tempat kerja/perusahaan	12	Adanya sumber-sumber produksi di tempat kerja yang tidak menerapkan K3 dan belum diterapkannya budaya K3 oleh masyarakat	Sumber produksi yang tidak menerapkan K3 akan menyebabkan adanya potensi bahaya mekanik, bahaya listrik, bahaya paparan bahan kimia dan timbulnya Penyakit Akibat Kerja	1.Mengikuti safety induction pada saat memasuki tempat kerja. 2.mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh tempat kerja/perusahaan. 3.Menggunakan Alat Pelindung Diri yang diwajibkan oleh perusahaan sesuai potensi bahaya yang ada. 4.Mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat pulang pergi tempat kerja. 5.Selalu menerapkan K3 selama di kantor, perjalanan dan di tempat kerja/perusahaan.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	tahun 2026
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Pemalsuan dokumen K3 oleh perusahaan/oknum	10	Ingin lolos tender/proyek tanpa biaya audit K3, cari legalitas cepat, budaya kepatuhan rendah	Sanksi pidana & administratif bagi pelaku, Kondisi membahayakan bagi pekerja karena prosedur riksa uji objek K3 tidak dijalankan dengan benar	Maintenance aplikasi SIK3-SIRIKSAUJI	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Tahun 2026
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	Potensi gratifikasi dalam pengurusan lisensi & buku kerja Petugas P3K	10	- Proses masih manual/tatap muka - Banyak interaksi langsung dengan petugas - Kurangnya transparansi biaya & prosedur - Budaya “uang terima kasih” - Sistem pengawasan dan pengaduan lemah	- Sanksi hukum (UU Tipikor) - Reputasi perusahaan tercoreng - Biaya pengurusan jadi mahal & tidak efisien - Ketergantungan pada jalur tidak resmi	Pengembangan aplikasi SIK3-SIP3K untuk digitalisasi penerbitan lisensi dan buku kerja Petugas P3K	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	tahun 2026

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	1.Perusahaan tidak menerapkan norma ketenagakerjaan; 2.Perusahaan tidak mengetahui hak dan kewajiban bagi pengusaha dan tenaga kerja dalam penerapan norma ketenagakerjaan	12	1.Rendahnya kesadaran perusahaan terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan 2.Ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan	1.Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan 2.Tidak terpenuhinya hak-hak normatif dari pekerja	Pengawasan penerapan norma ketenagakerjaan	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	12 bulan